

SOSIOLOGI PENDIDIKAN KEINDONESIAAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN KEINDONESIAAN

Dr. Silfia Hanani, M.Si.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN KEINDONESIAAN

Dr. Silfia Hanani, M.Si.

Editor: Rose KR
Proofreader: Nur Hidayah
Desain Cover: Anto
Desain Isi: Joko

Penerbit:

AR-RUZZ MEDIA

Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Jogjakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-602-7874-42-8
Cetakan I, 2013

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA

Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:

Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hanani, Silfia

Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan/Silfia Hanani-Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2013

216 hlm, 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-602-7874-42-8

1. Pendidikan

I. Judul

II. Silfia Hanani



Pada saat ini, bukan sebuah rahasia jika pendidikan di Indonesia berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Carut-marut penataan sistem pendidikan seperti rumusan kurikulum yang jauh panggang dari api, profesionalitas para pemangku kepentingan pendidikan yang tidak memadai, fasilitas yang tidak merata antarsekolah, dan lambannya respons pemerintah menjadi beberapa hal yang mendukung kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Sementara itu, berbagai pemikiran dan tulisan menyoroti kelemahan pendidikan pun marak menghiasi media massa dan penerbitan buku-buku. Namun, banyak dari pemikiran dan tulisan tersebut hanya sebatas seperti arisan keprihatinan.

Berbagai wacana pendidikan pun terus berkembang. Istilah-istilah seperti pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan berbasis agama, pendidikan multikultural, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, serta banyak lagi ramai diperbincangkan. Istilah-istilah tersebut diajukan dengan penuh keyakinan seakan itulah jawaban atas segala persoalan yang menimpa sistem pendidikan di Indonesia. Benarkah

demikian? Jika memang itu jawabannya, dengan ramainya wacana-wacana istilah tersebut mengapa sampai sekarang dunia pendidikan tetap saja seperti berjalan di tempat? Sebab, memang untuk memajukan kualitas pendidikan yang dibutuhkan tidak hanya menggelembungkan wacana, tetapi praktik nyata sebuah aksi. Apalagi hanya berbincang dengan berbelit-belit membicarakan soal parameter angka yang sudah kedaluwarsa.

Oleh sebab itu, perlu kiranya memerhatikan sosiologi pendidikan di Indonesia. Sebab, pendidikan terkhusus institusi pendidikan bukan lembaga atau badan yang berdiri sendiri seperti menara di tengah hutan, melainkan berjalan berkelindan dalam formasi sosial masyarakat. Aspek sosiologis dari pendidikan akan memberikan ruang pemahaman mengapa pendidikan seakan mati suri dan bagaimana kebijakan terbaik untuk memperbaikinya.

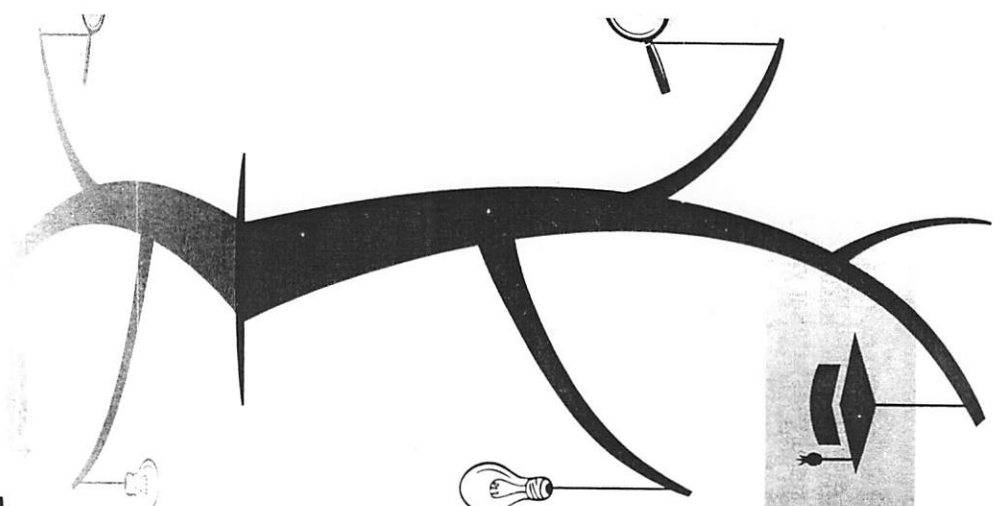
Yogyakarta, Mei 2013
Redaksi



PENGANTAR PENERBIT	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENGENALAN KONSEP DASAR SOSIOLOGI	
 PENDIDIKAN & RUANG LINGKUPNYA	11
A. Pendahuluan	12
B. Pendidikan dan Persekolahan	14
BAB II OBJEK SOSIOLOGI PENDIDIKAN: SOCIAL	
 GROUPS, STRATIFIKASI, PERUBAHAN, &	
 PERILAKU SOSIAL	21
A. Pendidikan Berbasis Kelokalan	22
B. Social Groups	26
C. Stratifikasi Sosial	39
D. Perubahan Sosial dan Perilaku Sosial	42
BAB III PENDEKATAN TEORI DALAM KAJIAN	
 SOSIOLOGI PENDIDIKAN	51
BAB IV LEMBAGA PENDIDIKAN & PERANAN	
 HUMANISASI	63

	A. Rendahnya Kualitas Pendidikan.....	64		C. Pendidikan Islam dalam Membangun Semangat Entrepreneur.....	173
	B. Sekolah dan Motivasi <i>Achievement</i>	68			
BAB V	TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT, PEMERINTAH, & KELUARGA TERHADAP PENDIDIKAN.....	73	BAB VIII	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	175
	A. Wujud Tanggung Jawab Nyata dalam Membangun Minat Baca	74		A. Korupsi di Indonesia.....	176
	B. Dampak Minat Baca yang Rendah.....	76		B. Pendidikan Antikorupsi	177
	C. Membedah Akar Permasalahan	81	BAB IX	MENGGUGAT “CUKONG” DI DUNIA PENDIDIKAN.....	181
	D. Membangun Perpustakaan Sekolah Berbasis Masyarakat.....	84		A. Kondisi Suram Pendidikan di Indonesia	182
	E. Membangun Peran Serta Masyarakat	90		B. Menggugat Cukong Intelektual	184
	F. Harapan Peningkatan Kualitas Pendidikan	95	BAB X	MENGEMBALIKAN PENDIDIKAN PERTANIAN DI NEGERI AGRARIS.....	187
BAB VI	OTONOMI DAERAH & PENDIDIKAN.....	107		A. Krisis di Bidang Pertanian.....	188
	A. Kebijakan Pendidikan di Otonomi Daerah.....	108		B. Mewujudkan Pendidikan Pertanian yang Diminati.....	193
	B. Institusi Pendidikan di Era Otonomi Daerah....	143	BAB XI	MERUMUSKAN KEMBALI SASTRA LISAN DALAM PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBANGUN MORAL	197
	C. Evaluasi Profesionalisme Tenaga Pendidik Sebagai Penyelenggara Pendidikan	144			
	D. Strategi Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik.....	146	DAFTAR PUSTAKA		203
	E. Implikasi Profesionalisme Tenaga Pendidik dalam Pembelajaran Berbasis Materi	149	INDEKS		211
BAB VII	SEKILAS TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DALAM REALITAS MASYARAKAT.....	153	BIOGRAFI PENULIS.....		215
	A. Sekilas tentang Islam dan Identitas Indonesia ...	157			
	B. Peranan Pendidikan dalam Mengatasi Kemiskinan	169			

BAB I



PENGENALAN KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN & RUANG LINGKUPNYA

A. Pendahuluan

Sosiologi seperti ilmu yang lainnya memiliki asal-usul kelahiran. Keberadaannya bukan dalam kondisi sosial masyarakat yang kosong, melainkan terus berkembang. Seperti halnya dikatakan oleh Thomas Khun, pengetahuan itu selalu berenang dalam lautan-lautan paradigma yang selalu berubah dan memunculkan paradigma yang baru (Khun, 2000).

Sadar atau tidak sadar, perubahan sosial saat ini begitu cepat terjadi, sementara untuk mengatasi efek-efek jeleknya tidak secepat perubahan itu berjalan. Inilah sebuah fenomena global yang dialami oleh manusia pada masa ini. Kelambatan-kelambatan untuk mengatasi efek jeleknya itu yang menyebabkan realitas sosial yang sering berbanding terbalik dengan harapan kehidupan. Misalnya, semakin menyebar luas sekolah dan semakin banyak orang berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan sekolah atau pendidikan. Kondisi-kondisi seperti itu sedang menjejal di hadapan kita semua, kondisi ini disebut oleh Giddens dengan istilah *jugernaut* (Giddens, 2000: x).

Keterlambatan dalam membuat benteng dari pengaruh buruk itu, tentu disebabkan oleh tidak pahamnya manusia dengan lingkungan sosial. Termasuk dunia pendidikan, kurang memerhatikan tentang kemanusiaan sebagai objek pendidikan itu sendiri. Penghargaan terhadap manusia yang kurang, dipengaruhi oleh adanya opini yang dibangun sejak kolonial, gap antara keilmuan sosial dan ilmu esakta. Di negara-negara berkembang yang pro dengan modernisasi ala Barat sangat sangat kental gap itu sehingga ada penomorsatuan dan penomorduaan sebuah keilmuan.

Kasus di Indonesia sangat terasa dampak dengan gap tersebut. Ilmu sosial dan humaniora yang diposisikan pada nomor dua menjadikan perhatian kemanusiaan jelas tidak setara dengan perhatian

pada perkembangan teknologi dan kemajuannya. Namun, setelah ada perubahan apa yang terjadi, krisis kemanusiaan tidak dapat dielakkan. Perilaku-perilaku manusia berbanding terbalik dengan kesejatiannya dan semestinya berbanding lurus dengan perilaku tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, perilaku pelajar yang tribal suka berkelahi antar-sesamanya, konflik yang mudah terjadi, toleransi agama yang sering memicu kekerasan, kejujuran yang semakin menghilang, korupsi yang telah menjadi tradisi, dan seterusnya.

Tentu masalah-masalah negatif tersebut sebagai bentuk dari kelelahan dunia pendidikan dalam memerhatikan kemanusiaan manusia. Terpinggirkannya kemanusiaan dari pendidikan. Keterpinggiran ini didukung pula oleh semakin hilangnya nilai-nilai dan kearifan-kearifan lokal sebagai bagian yang terpenting dalam menata kemanusiaan karena kekuatan modernisasi yang semakin diyakini oleh bagian pengambil kebijakan dalam membangun dunia pendidikan.

Akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan itu tidak dikembangkan hanya diajarkan dalam bentuk hafalan-hafalan dan tekstualitas sehingga nilai-nilai yang membentuk manusia sebagai makhluk yang sempurna itu tidak terinternalisasi. Nilai-nilai tersebut adalah navigator dalam kehidupan manusia. Jika nilai-nilai itu hilang, dapat dibayangkan anomali-anomali kemanusiaan berkuasa. Manusia akan menjadi *hyperhedonisme* dengan melakukan tindakan di luar kemanusiaannya.

Kehilangan nilai-nilai juga ternyata membangun tradisi kehidupan manusia yang transaksional. Tradisi transaksional ini menjalar dalam pengelolaan negara dan aset-asetnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang membangun pemberian dan penerimaan jasa. Kondisi ini semakin memperkuat pengelolaan negara dengan cara kolaborasi nonprofesional, tetapi dengan kolaborasi atas tukar-menukar jasa.

Inilah yang membuat kekayaan negara terkuras dengan mudah oleh kelompok-kelompok kolaborasi itu.

Selanjutnya, kehilangan nilai-nilai tersebut juga telah menjungkir-balikkan kejujuran di negeri ini. Kedustaan menjadi bagian yang sudah mentradisi. Dusta itu tidak lagi hanya dilakukan secara diam-diam, tetapi terbuka di hadapan publik secara bersama-sama. Bahkan, dunia pendidikan sempat dihebohkan oleh kasus-kasus luntarnya kejujuran dalam mengerjakan ujian akhir di sekolah-sekolah yang dilakukan atas kolaborasi guru dan murid.

Lalu, di manakah peran pendidikan? Pendidikankah yang salah? Pertanyaan itu adalah pertanyaan dasar yang sedang dipertanyakan, mengingat pendidikan adalah proses pendewasaan manusia, sebagai proses pembentukan karakteristik manusia yang manusiawi, sebagai proses pencerdasan manusia, dan seterusnya. Pertanyaan itu harus dijawab dengan pendekatan kritis.

B. Pendidikan dan Persekolahan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama yang harus dibedakan adalah antara pengertian pendidikan dan persekolahan. Pendidikan memiliki pengertian yang berbeda dengan persekolahan. Ivan Illich (Freire dkk., 2009: 581–581) telah mendefinisikan perbedaan kedua kata itu. Pendidikan sangat berbeda artinya dari persekolahan. Penekanan perbedaan yang paling esensial antara dua kata itu adalah pendidikan bermakna membebaskan manusia dari keterbelakangan, ketidaktahuan, ketidakberadaban, membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang mengikat kemanusiaannya, dan seterusnya. Sementara persekolahan merupakan alat bantu dalam pendidikan yang mengarahkan dan membawa manusia mendapatkan kebebasan itu.

Pendidikan secara luas dapat berlangsung di mana saja. Pendidikan tidak diikat oleh masa, waktu, dan ruang sehingga pendidikan tersebut berjalan sepanjang hayat. Oleh sebab itu, guru dalam pendidikan bukan orang-orang yang diformalitaskan, melainkan merupakan aspek-aspek yang memberikan kesejatian manusia. Oleh sebab itu, tidak salah di Minangkabau berkembang istilah *alam ta kambang jadi guru* (alam terbentang jadi guru).

Persekolahan sebagai lembaga yang mengelola pendidikan supaya teratur dan semua orang mendapatkan kesempatan untuk pendidikan sesuai dengan perkembangannya. Dalam persekolahan, pendidikan dirancang secara sistematis dan kritis sehingga pendidikan memengaruhi pola pikir, tindakan, perilaku, dan akhirnya membentuk manusia yang sejati. Dalam persekolahan akhirnya kita mengenal guru, murid, dan sarana-prasarana pendidikan.

Begitu pentingnya pendidikan dimiliki oleh manusia maka negara harus membangun sekolah untuk tujuan pendidikan. Negara bertanggung jawab atas pendidikan warga negaranya. Oleh sebab itu, sekolah harus menjadi sarana utama dalam suatu negara untuk membangun pendidikan warga negaranya. Ketika pendidikan sudah dikelola melalui persekolahan dengan semestinya, berkembang, dan menginternalisasi peranan pendidikan dalam kehidupan manusia. Pola pikir, sikap, moralitas dan rasa kemanusiaan anak bangsa berjalan dalam rel-rel pendidikan itu yang dirancang dalam sistem persekolahan.

Jika demikian, persekolahan adalah lembaga yang memproses manusia terdidik. Sebagai proses, sekolah harus dikelola dengan baik dan profesional dengan beragam pendekatan yang dapat menjadikan sekolah betul-betul menghasilkan manusia terdidik. Di antara pendekatan-pendekatan yang dapat menjadikan sekolah dapat

menjalankan peranannya sebagai lembaga yang memproses manusia terdidik sebagai berikut.

1. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya bisa disebut juga dengan pendekatan lingkungan. Sekolah bukan menara gading, bukan pula unsur yang bebas dari lingkungan. Sekolah sebagai proses kemanusiaan berada dalam lingkungan manusia dan budaya. Dalam lingkungan ini ada budaya yang membentuk manusia. Eksistensi budaya, ada yang radikal menghambat proses kemajuan manusia dan ada pula yang sebaliknya mendorong kemajuan. Oleh sebab itu, tidak semua budaya yang ada dalam suatu masyarakat ditentang oleh dunia persekolahan.

Dalam konteks ini, persekolahan sebagai proses kemanusiaan, harus memerhatikan dua perihal budaya tersebut. Lingkungan budaya yang menghambat proses kemanusiaan untuk maju itu dijadikan salah satu fokus perhatian dilakukan oleh pendidikan. Apalagi di Indonesia, sebagai negara yang memiliki berbagai budaya lokal, perhatian pendidikan tidak dapat lepas dari konteks manusia sebagai pemilik budaya tersebut.

Pendekatan budaya dalam persekolahan terkait dengan kemampuan sekolah sebagai institusi pendidikan dalam mentransformasikan pendidikan terhadap masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, persekolahan tidak dapat lepas dari budaya dalam masyarakat tempat persekolahan tersebut berada karena sekolah juga sebagai penjabar nilai-nilai dan moralitas manusia. Dalam pendekatan budaya ini, dunia persekolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Menurut Kluckhohn, ada lima masalah dasar yang harus diselesaikan oleh manusia sebagai berikut.

1. Persoalan dasar sifat dasar manusia (*human nature*).
2. Persoalan hubungan manusia dengan alam.
3. Persoalan titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia.
4. Persoalan mengenai kegiatan manusia.
5. Persoalan manusia dengan sesamanya.

Penyelesaian masalah dasar yang dihadapi oleh manusia tidak dapat serta-merta dihadapi hanya dengan pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh sekolah tanpa melakukan pendekatan budaya yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan ini, berbagai kasus telah dapat ditemukan betapa bobroknya perilaku manusia terdidik. Ketika persekolahan meninggalkan dan menganggap budaya lokal sebagai hal yang tak penting diperkenalkan dan diganti dengan budaya tawaran modernisasi, yang terjadi adalah krisis kebudayaan, krisis nilai-nilai, dan seterusnya.

2. Pendekatan Kemanusiaan

Persekolahan sebagai lembaga pendidikan tidak semestinya menganggap manusia yang belajar sebagai objek pendidikan. Sekolah harus membebaskan manusia dari keterkungkungan. Oleh sebab itu, dunia persekolahan tidak serta-merta hanya menjadikan orang-orang yang bersekolah cerdas tanpa moralitas. Ketika dunia persekolahan lebih mementingkan kecerdasan logika daripada kecerdasan jiwa atau ruhani maka yang terjadi adalah sekolah hanya menghasilkan manusia-mesin yang cerdas tanpa dapat mengendalikan perubahan. Manusia yang seperti ini dianalogkan oleh Piliang (2003), sebagai berikut.

Manusia Mesin antiperubahan	Zona antiperubahan	Dengan cara teror, horor, <i>chaos</i> , parasit, mikrofasis
Manusia Mesin oportunistis	Zona kepalsuan	Dengan mesin-mesin simulakrum, kepalsuan, disinformasi

Dua wujud manusia sebagai mesin-mesin oportunistis dan antiperubahan terlihat dalam realitas kebangsaan Indonesia saat sekarang. Bagaimana bangsa ini kehilangan kesadaran moral dalam kehidupan kesehariannya, baik secara individual maupun bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam pendekatan terhadap kemanusiaan, tentu sekolah juga sebagai agen kesadaran moral bagi manusia. Sebab, bagaimanapun juga manusia harus memiliki moral dalam kehidupannya. Kohlberg sebagaimana dirujuk oleh Habermas (McCarthy, 2011) membuktikan pentingnya kesadaran moral tersebut. Kesadaran moral memiliki beberapa tahap. Masing-masing tahapan sangat ditentukan oleh pendidikan. Skema tahap-tahap kesadaran moral menurut Kohlberg sebagai berikut.

I. Level Prakonvensional

Respons terhadap aturan atau label kultural terhadap kebaikan dan keburukan, benar salah berdasarkan atas tindakan yang dilakukan. Level ini terdiri dari dua tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap orientasi hukum dan kepatuhan, yakni tindakan menentukan kebaikan dan keburukan.
2. Tahap relativis instrumental, yakni tahap menentukan kebaikan terhadap diri sendiri dan kebaikan pada orang lain.

II. Level Konvensional

Tindakan kebaikan atau keburukan atas dasar pengenalan kelompok, keluarga, atau bangsa. Kesadaran moral pada level ini juga terdiri dari dua tahap, sebagai berikut.

1. Tahap orientasi penyesuaian individual atau orientasi anak baik. Memperkenalkan perilaku yang menyenangkan terhadap diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa.
2. Tahap orientasi hukum dan perintah, yakni tindakan baik dan buruk yang mengarah atau dilandasi dengan aturan-aturan dan tatanan sosial.

III. Level Pascakonvensional, Otonom, atau Berprinsip

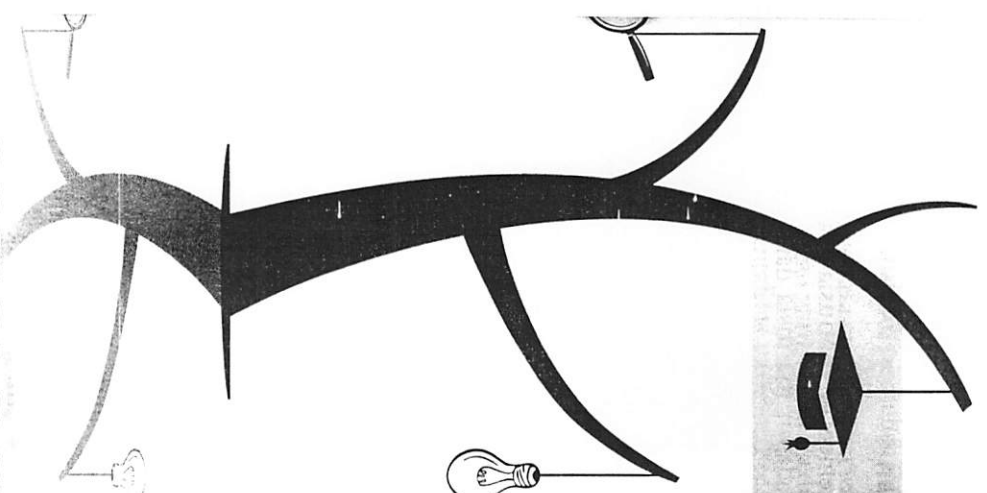
Adanya usaha-usaha untuk mendefinisikan nilai-nilai dan prinsip moral. Tindakan-tindakan yang dilakukan yang dikaitkan dengan otoritas kelompok atau memegang prinsip moral yang telah digariskan dalam kelompok. Pada level ini, ada dua tahap perkembangan yang terjadi dalam kesadaran moral manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap legalisasi kontrak sosial moral, yakni kesadaran penuh yang dilakukan oleh manusia dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat secara bersama.
2. Tahap prinsip etis universal, tindakan yang dilakukan atas dasar kesadaran hati nurani dengan merujuk pada prinsip-prinsip etis, logis, dan universal.

Sosiologi pendidikan sangat dekat dengan masalah budaya dan kemanusiaan ini. Jika membuat pengertian tentang sosiologi pendidikan, sosiologi pendidikan adalah pendekatan yang dipakai dalam pendidikan terkait dengan manusia dan budayanya.



BAB II



OBJEK SOSIOLOGI PENDIDIKAN: SOCIAL GROUPS, STRATIFIKASI, PERUBAHAN, & PERILAKU SOSIAL

A. Pendidikan Berbasis Kelokalan

Sistem pendidikan sudah berjalan semenjak manusia ada di bumi ini. Pendidikan berproses dalam peradaban manusia dan kemudian membentuk manusia yang *bercivilization*. Perubahan peradaban manusia dari savagery-barbarisme kemudian memasuki *civilization* merupakan bagian dari hasil proses pendidikan. Atau, perubahan peradaban dari agrokultural-industrial ke informasi sebagai konsekuensi logis dari pendidikan. Oleh sebab itu, peradaban dan pendidikan merupakan dua hal yang saling beriringan. Pendidikan adalah jantung dari peradaban dan peradaban adalah hasil dari pendidikan itu sendiri.

Pendidikan sebagai suatu proses *civilization* berlangsung secara terencana dan gradualistik, tidak muncul dengan begitu saja. Ada penataan sistem atau perangkat untuk mengoperasionalkannya. Penataan sistem ini harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi karena pendidikan sangat terkait dengan perubahan mentalitas manusia.

Pada umumnya di negara-negara berkembang, sistem pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sistem lokal. Hal ini disebabkan sistem lokal merupakan bagian dari mentalitas masyarakatnya. Menurut Dove, sesungguhnya dalam tradisi lokal terdapat faktor penting yang dapat memodernisasi manusia. Oleh sebab itu, tidak layak dikatakan tradisi lokal sebagai penghambat pembangunan seperti yang dianut oleh paham teori pembangunan (Dove, 1998).

Sistem pendidikan merupakan bagian dari paradigma pendidikan. Dalam perjalanan sejarah peradaban dunia, menurut Comte ada tiga proses paradigma peradaban. Ketiga-tiganya juga berlaku dalam sistem-sistem yang ada, yakni berproses dari teologis, metafisika, dan empirika. Ini disebut sebagai hukum tiga tahap dalam proses peradaban manusia (Johnson, 1987).

Ibn Khaldun pernah memberikan gambaran mentalitas peradaban manusia antara masyarakat yang hidup dalam geografis yang tidak subur dengan yang subur. Kedua bentuk masyarakat tersebut tecermin dalam mentalitas yang berbeda-beda. Perbedaan itu juga dipengaruhi oleh budaya lokal atau tradisi lokal yang berbeda-beda pula. Untuk membangun orientasi dan masa depan mereka harus dengan cara yang berbeda-beda pula, yakni dengan mempertimbangkan kondisi tradisi yang ada pada mereka.

Begitu pula halnya di Nusantara yang dihuni oleh beraneka bahasa, budaya, dan agama, yang mana keanekaragaman tersebut menjadi bagian dari *world view*. Maka untuk menghadapi pembangunan mentalitasnya, pendidikan harus memerhatikan keanekaragaman ini sebagai bingkai atau kerangka dalam sistem pendidikan. Budaya lokal juga merupakan bagian penting yang membentuk psikologi masyarakat. Oleh sebab itu, psikoanalisis yang berbasis lokalisme dalam sistem pendidikan perlu dijabarkan. Salah satu tujuannya di sini adalah untuk menghindari adanya aspek-aspek sebagai berikut.

1. Kolonialisme Pemikiran

Dalam sejarah peradaban manusia, kolonialisme pemikiran dengan jelas dapat dilihat sebelum terjadinya revolusi pemikiran. Revolusi pemikiran pertama terjadi ketika Martin Luther menggugat monopoli gereja dalam berbagai urusan, termasuk dalam pemikiran. Kemudian berkembang menjadi semangat ingin memisahkan negara dari gereja sehingga muncul istilah *sekularisasi*. Sekularisasi pada masa itu tidak sama artinya memisahkan diri dari Tuhan atau mengingkari Tuhan, akan tetapi melepaskan ikatan campur tangan gereja dari otoritas yang berlebihan, baik terhadap negara maupun terhadap pemikiran.

Setelah revolusi pemikiran ini, berkembang ilmu pengetahuan dalam berbagai klasifikasi sehingga terjadi kebangkitan peradaban yang ditandai dengan munculnya Revolusi Industri. Revolusi Industri mendorong semangat ekspansi untuk mencari bahan mentah keluar wilayah. Dalam ekspansi inilah berkembang pemikiran kolonialisme. Yaitu eksploitasi terhadap *civilization* dengan tidak menghargai budaya lokal tempatan dan menganggap *civilization* yang ada di daerah jajahan sebagai *civilization* yang rendah.

Setelah Perang Kedua berakhir, eksploitasi *civilization* berlanjut ke dalam teori pembangunan, yang mana Negara-Negara Ketiga dipaksa mengikuti pemikiran dua kutub, yakni sosialis atau kapitalis. Persoalan inilah yang membuat Dunia Ketiga menjadi kebingungan menata dirinya. Sementara itu, aset kultural lokal tidak dijadikan pijakan untuk menyusun kebijakan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Di Indonesia, semenjak terjadinya modernisasi pembangunan juga terlihat adanya pengabaian terhadap kultur lokal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya pembebasan terhadap multikultural. Modernisasi pemikiran, terlalu berangan-angan dan menjauhkan budaya dan tradisi lokal yang ada. Kemudian, tanpa disadari terjadi benturan-benturan budaya yang ada sehingga melahirkan anarkisme.

Pemikiran kolonialisme kemudian tidak dihambat oleh sistem pendidikan malah dibiarkan. Kondisi ini terjadi akibat sistem pendidikan itu sendiri yang terpengaruh oleh sistem modernisasi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan. Akhirnya, pendidikan pun tidak dapat melahirkan mentalitas manusia yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan.

Sistem pendidikan mengawang-awang dengan budaya modernisasi dan bersifat hafal-hafalan kognitif yang tidak menyentuh akar rumput (*grass root*). Malahan, pendidikan kurang berhasil

melahirkan manusia yang berkualitas dan bermentalitas sehingga terjadi distorsi di akhir tahun 1995 dan sebelumnya diawali dengan kehilangan moralitas dan mentalitas, dengan berjangkitnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. *Violence Civilization*

Violence civilization merupakan salah satu dampak dari pemikiran kolonialisme sekaligus akibat dari pengabaian terhadap kultur lokal yang multikultural. Sistem pendidikan tidak memberikan peluang untuk membicarakan budaya lokal. Sistem pendidikan baru memasukkan muatan budaya lokal dalam konteks kognitif.

Penekanan terhadap multikultural budaya dalam sistem pendidikan yang dangkal ini tidak mampu menahan konflik-konflik yang terjadi. Padahal, pendidikan diyakini sebagai pembentuk mentalitas manusia yang berkualitas. Maka, dalam memahami kondisi ini, sistem pendidikan tidak dapat lepas dari kearifan-kearifan budaya lokal, dimana pendidikan itu diterapkan.

3. Membangun Karakteristik Pemikiran

Kelemahan sistem pendidikan yang riskan dirasakan adalah ketidakmampuan mendesain karakteristik pemikiran. Hal ini cukup beralasan karena sistem pendidikan lebih berorientasi pada industrialisasi. Kemudian, tidak ada akumulasi yang tegas antara penekanan kognitif dengan psikomotorik sehingga sistem pendidikan yang dijabarkan melalui kurikulum mampu membangun ruang kognitif. Pemikiran-pemikiran hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Sementara bentuk pertumbuhan ekonomi yang keindonesiaan pun tidak terwujud sehingga yang ada adalah pemikiran pinjaman atau meminjam teori dari negara-negara lain.

Sementara, untuk membangun teori yang relevan harus mengetahui kondisi multikultural yang ada dalam masyarakat yang akan dibangun. Dalam konteks ini ada keterkaitan sistem pendidikan dengan waktu dan tempat (*time and space*). Waktu merupakan konsekuensi realitas, sedangkan tempat adalah ruang di mana sistem itu dioperasikan dengan maksud harus mempertimbangkan area kultural. Dalam konteks inilah pemaknaan social groups, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan perilaku sosial dipahami.

B. Social Groups

Social groups merupakan sasaran kelompok-kelompok sosial yang harus menjadi sasaran dalam pendidikan. Kelompok sosial ini tidak hanya terkait dengan masalah komunitas yang ada, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah masalah keadaan mentalitas dan fisik. Termasuk area atau kawasan yang ada. Artinya, pendidikan harus menyentuh kelompok itu semua. Di samping itu, sosial group ini penting kegunaannya sebagai peta pembangun pelaksanaan pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini sangat membutuhkan peta-peta sosial group ini karena sangat banyaknya groups sosial yang muncul, di samping Indonesia juga sebagai negara yang multikultural. Hal yang lebih penting lagi, dari groups sosial ini adalah akan melahirkan teknik-teknik dan profesional dalam bidang pendidikan. Apalagi saat sekarang dengan banyaknya masalah yang muncul, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia maka ia membutuhkan pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial, mental, dan keadaan.

Di Sumatra Barat misalnya, ternyata pasca-gempa kita sangat membutuhkan pendidikan pemulihan gempa. Sebelum terjadinya gempa kita tidak memilikinya, sekarang setelah terjadinya gempa kita sangat membutuhkannya. Pendidikan anak korban gempa dengan

anak yang tidak mengalami gempa adalah berbeda. Maksud masuknya social groups dalam sosiologi pendidikan, manfaat yang pertama adalah untuk dapat memetakan dan mengidentifikasi keperluan pendidikan yang dibutuhkan oleh kelompok sosial tertentu. Dari masalah anak korban gempa di Sumatra Barat kita dapat melihat kerja identifikasi keperluan pendidikan itu.

- **Contoh Identifikasi yang Diolah dari Social Groups**

Sebagaimana data tercatat dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, jumlah sekolah di kawasan ini semuanya 562 unit sekolah. Akibat gempa tahun 2009, sebanyak 419 unit di antaranya rusak. Sebanyak 432 unit mengalami rusak berat dan 272 unit sudah membuat komitmen untuk diperbaiki dan sedang dilaksanakan pembangunannya. Di balik itu ternyata ditemukan tingkat perhatian masyarakat dan Pemerintah lebih tinggi pada perbaikan infrastruktur dibandingkan pada masalah psikologis dan masalah minat belajar bagi anak-anak korban gempa. Terlihat begitu gedung sekolah usai maka usai pula perhatian terhadap anak-anak korban gempa. Padahal, anak-anak korban gempa merupakan anak-anak yang dikategorikan anak yang mengalami masalah dalam pendidikan.

Kelompok anak-anak korban gempa akan mengalami hambatan psikologis dan hambatan fasilitas. Pertama, hambatan psikologis karena ingatan anak-anak masih teringat dan trauma melihat realitas dari bencana gempa. Kondisi-kondisi yang mereka hadapi waktu gempa tersebut masih teringat dalam benaknya dan itu selalu menghantuinya serta masih merasa ketakutan. Kedua, berkaitan dengan hambatan fasilitas, gedung sekolah, pakaian sekolah, alat-alat tulis termasuk dengan lokal yang digunakan sangat tidak memadai untuk syarat belajar optimal sehingga tidak mendukung untuk proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar

dipaksakan seperti dalam kondisi yang ideal, padahal kondisi mereka berbeda dengan kondisi belajar yang ideal. Ketiga, guru tidak memiliki kecakapan dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah akibat korban gempa sehingga pelajaran tetap dilaksanakan seperti biasanya.

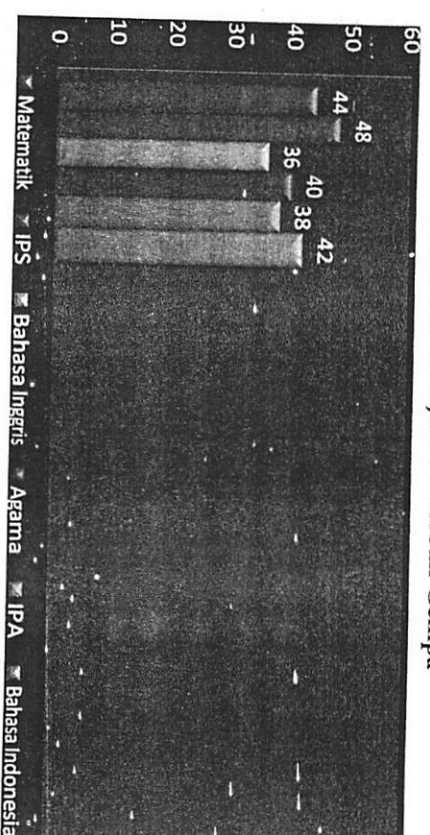
Melihat kondisi yang demikian, dapat dipastikan minat belajar dan prestasi belajar anak korban gempa tergolong rendah. Guru-guru pun kewalahan bagaimana bentuk kegiatan proses belajar mengajar yang tepat dalam kondisi yang darurat dan dalam kondisi psikologis anak-anak yang terganggu itu. Sementara guru-guru tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam menghadapi anak-anak yang dalam keadaan psikologis yang bermasalah, guru tetap melaksanakan proses belajar mengajar seperti dalam kondisi tidak bermasalah. Padahal, cara dan proses belajar mengajar anak korban gempa jelas tidak dapat disamakan sistem belajarnya dengan kondisi keadaan normal atau anak-anak yang tidak memiliki masalah psikologis.

Semestinya, proses belajar mengajar harus memerhatikan lingkungan dan kondisi yang terjadi. Perhatian ini sangat penting maknanya dalam upaya memberikan kepastian terhadap anak didik. Kepastian tentang apa yang diajarkan karena situasi belajar mengajar sangat menentukan terhadap terkuasai atau tidaknya subjek pelajaran yang diberikan. Dalam konteks ini sangat diperlukan proses belajar mengajar yang bersesuaian dengan situasi sehingga proses belajar mengajar yang terjadi tidak hanya sebagai bentuk pemaksaan pencapaian tujuan tanpa mempertimbangkan terkuasai atau tidaknya pelajaran tersebut pada anak didik.

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan seperti kondisi normal itu, ternyata tidak dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil proses belajar yang dilakukan terhadap korban gempa. Hampir 50% anak-anak korban gempa tidak dapat menjawab soal-soal setelah dilaksanakan pembelajaran. Hasil tes

mereka sangat rendah. Tes ini dilaksanakan setelah guru menerangkan mata pelajaran, jumlah soal sangat sedikit dan tidak menyulitkan karena ditulang berkali-kali oleh guru. Soal ini dikerjakan oleh anak kelas enam sejumlah 30 orang, dengan materi mengulang materi kelas lima. Soal tersebut pun diberikan setelah dijelaskan dan diterangkan oleh guru di hadapan kelas. Hasil tes tersebut menunjukkan betapa rendahnya minat belajar dari pada anak-anak korban gempa.

Tabel 2.1
Grafik Hasil Belajar Anak Korban Gempa



Dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar anak korban gempa tidak dapat disamakan dengan anak-anak yang tidak mengalami masalah. Oleh sebab itu, proses belajar mengajar anak korban gempa harus dilakukan dengan pemulihan psikologis mereka. Salah satu bentuk pemulihan psikologis adalah dengan melakukan membaca bergembira bersama. Kegiatan yang tidak menyiksa, tetapi membebaskan anak-anak dari rasa kekesiksaan dari belajar atau pendidikan. Kondisi masalah psikologis ini dapat dilihat ketika sedang belajar dan ketika mereka memaknai arti sekolah. Masalah-masalah anak-anak korban gempa

pada saat proses belajar mengajar, yakni sering melamun, termenung, tidak mendengarkan guru menjelaskan, bahkan ada yang menangs. Di samping itu, juga ada yang tidak mau datang ke sekolah dan trauma dengan kondisi belajar yang memaksa pada mereka.

Anak-anak korban gempa memerlukan pemulihan psikologis. Belajar yang dipaksakan untuk mencapai target menjadi beban yang memberatkan sehingga mereka malas datang ke sekolah, malas belajar, dan seterusnya. Sekolah menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka. Kondisi seperti itulah yang membuat anak-anak korban gempa mudah terlibat dengan perdagangan manusia karena mudah dibawa oleh siapa saja dengan berbagai alasan, karena bagi mereka keluar dari keadaan yang tidak mereka sukai itu. Oleh sebab itu, anak korban gempa bumi membutuhkan sekolah yang memerdakan jiwa dan batinnya. Belajar yang memaksakan merupakan penjara dan cengkeraman yang sangat membosankan. Salah satu jalan keluar yang harus dilakukan adalah memerdakan jiwa mereka tanpa meninggalkan sekolah atau pelajaran. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD), salah satu langkah yang ditempuh adalah melaksanakan kegiatan gembira bersama dengan membaca untuk memulihkan psikologis dan minat belajarnya. Jika pemulihan tidak terjadi, anak-anak korban gempa perlahan-lahan akan mengalami keterbelakangan mental dan sekolah akan dianggap sebagai lembaga penyiksaan sehingga mereka akan malas belajar.

Program gembira bersama dengan membaca merupakan kegiatan pemulihan psikologis melalui pendekatan pembelajaran membaca secara bersama dengan bahan bacaan apa saja. Program ini merupakan kegiatan mahasiswa yang peduli terhadap pendidikan anak-anak korban gempa, terutama di daerah yang terpencil dan tidak banyak mendapat akses dari luar. Bahan bacaan dikumpulkan kepada

masyarakat, dengan mengerjakan program sumbangan buku bekas dan baru. Bahan bacaan yang terkumpul kemudian dikelola dengan baik dan dipinjamkan kepada sekolah-sekolah secara bergiliran untuk dibaca oleh anak-anak sekolah. Ketika saat pemulangan buku, diadakan kegiatan "gembira membaca bersama", dimana mahasiswa sebagai tutor mendatangi sekolah-sekolah, berkumpul dengan murid-murid dalam tumpukan bahan bacaan. Ada beberapa kegiatan yang dirancang dalam tumpukan bahan bacaan tersebut.

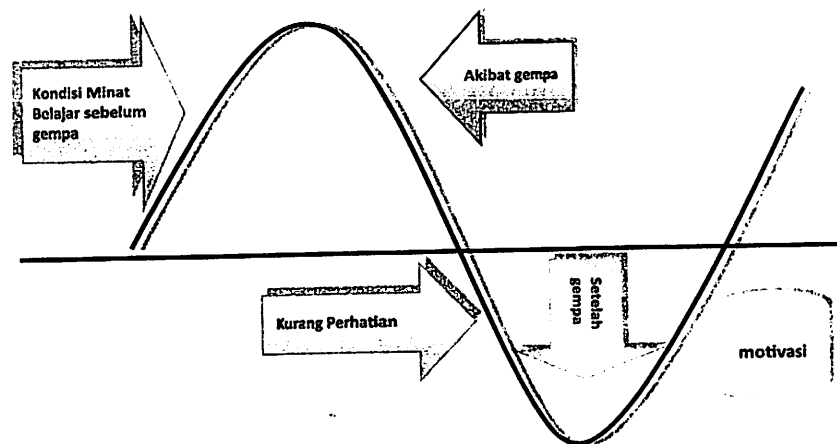
Kegiatan bergembira bersama merupakan kegiatan pengembangan dan pembinaan interaksi secara harmonis, interaksi sesama anak-anak dan tutor, di antara tumpukan buku. Tujuannya adalah menjalin harmonisasi antara sesama dan bersahabat dengan alam. Tutor dan anak-anak berkumpul secara bersama, bercerita dengan anak-anak, bercerita apa saja. Anak-anak juga diminta untuk bercerita, bercerita yang mereka inginkan, termasuk bercerita masalah isi buku yang mereka baca. Di antara anak-anak yang bercerita akan diberi hadiah berupa sebuah buku bacaan.

Kegiatan gembira bersama merupakan kegiatan dimana anak-anak bercerita, bergerak, dan beraktivitas secara luas di hadapan kelompoknya. Dengan kegiatan ini mereka mendengar, beraktivitas, dan bergembira secara bersama-sama. Pola kebersamaan mereka adalah pola kebersamaan yang menonjolkan solidaritas dan komunikasi. Menurut Durkheim, salah satu yang mempercepat pulihnya masalah rasa kemanusiaan adalah karena adanya pola-pola sosial yang membimbing seseorang untuk saling mengerti dan saling berempati dalam menghadapi permasalahan (Kaplan, 2000).

Secara langsung, kegiatan bergembira bersama ini merupakan salah satu media untuk memulihkan masalah psikologis mereka dan sekaligus sebagai salah satu media untuk mendorong mereka belajar dengan giat kembali. Dalam kegiatan gembira bersama itu juga, para

tutor memberikan motivasi melalui cerita dari tokoh-tokohnya. Supaya cerita itu menarik untuk mereka dengar maka penceritaan tokoh kadang disampaikan dengan nyanyian-nyanyian, pantun, seni, dan kolaborasi dengan beberapa cara, kadang-kadang melalui pemutaran film atau animasi. Bantuan kolaborasi cara-cara penyampaian tersebut, telah membantu mereka untuk berkonsentrasi dan memerhatikan, juga cara pemaknaan anak-anak terhadap apa yang didengar, dilihat, dan dijelaskan dari sebuah materi.

Kata McClelland (Marzali, 2007), individu yang tengah menghadapi masalah, sebenarnya tengah membutuhkan motivasi yang kuat untuk keluar dari masalahnya itu. Perubahan sikap dan perubahan bertindak salah satunya memberikan rangsangan-rangsangan positif seperti yang dilakukan dalam kegiatan bergembira bersama. Rangsangan tersebut berupa pemberian motivasi dengan pendekatan psikologis sehingga belajar di sekolah bukan menjadi media penyiksa atau sesuatu hal yang ditakutinya.



Gambar 2.1
Penurunan Motivasi Pada Anak Korban Gempa

Dari kegiatan bergembira bersama ada beberapa masalah anak-anak yang dapat ditanggulangi dan diselesaikan. Pertama, dapat menanggulangi masalah psikologis anak-anak yang masih trauma dengan gempa. Trauma akibat gempa lama berkesan pada anak-anak. Apalagi bagi mereka yang orangtua dan keluarganya ikut meninggal serta melihat kondisi-kondisi alam lingkungan yang amburadul dan sangat mengesankan, hal ini sangat berpengaruh terhadap psikologisnya. Pengaruh psikologis ini berdampak terhadap minat belajar dan aktivitas anak-anak. Banyak di antara anak-anak korban gempa tidak mau kembali belajar ke sekolah, sekalipun sekolah mereka telah dibangun, mereka masih enggan untuk ke sekolah. Bagi yang telah kembali ke sekolah, ternyata prestasi dan minat belajar mereka rendah karena sekolah tidak melakukan pemulihan terhadap kondisi psikologis mereka dan hanya melaksanakan proses belajar mengajar seperti anak-anak yang tidak bermasalah. Padahal, anak-anak tersebut sangat membutuhkan pemulihan kondisi psikologis.

Dengan belajar bergembira, mereka berinteraksi, beraktivitas secara bersama-sama dengan bergembira sehingga mereka tidak tersiksa. Ternyata dengan kegiatan seperti ini dapat menghilangkan rasa ketakutan, rasa kesedihan, rasa trauma, dan seterusnya. Belajar bersama dengan gembira itu pula yang membuat mereka ingin bersatu kembali di sekolah, kembali bersemangat belajar di sekolah.

Hal ini terbukti anak-anak yang trauma dan tidak mau sekolah kemudian kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Ada perubahan psikis juga terlihat ketika belajar di sekolah. Perubahan itu di antaranya dari semula mereka merasa tersiksa mengikuti pelajaran dan merasa belajar sebagai aktivitas yang membebani, secara perlahan dapat mengikuti pelajaran seperti dalam kondisi psikologis yang normal.

Kedua, dapat meningkatkan minat baca anak korban gempa dengan sadar, tidak terpaksa, dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Masalahnya, minat baca anak-anak korban gempa total terhenti karena situasi akibat gempa itu sendiri. Sekolah mereka roboh, buku-buku sekolah hancur, hilang, dan tidak terselamatkan. Di samping itu, tidak satu pun bantuan-bantuan dari berbagai kalangan yang peduli terhadap pembangunan minat baca anak-anak korban gempa ini karena bantuan lebih didominasi dalam bentuk bahan-bahan konsumtif. Malahan sampai gedung sekolah mereka usai dibangun dan anak-anak sekolah seperti biasa, masalah perhatian minat baca tetap tidak menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu, kegiatan gembira bersama ini menjadi salah satu gerakan untuk menumbuhkembangkan kembali minat baca mereka. Walau hanya dibantu dengan buku-buku bekas yang dikumpulkan melalui relawan. Buku-buku bekas tersebut menjadi bahan bacaan bagi mereka dan sekaligus mengatasi kekurangan bacaan di tengah-tengah situasi sekolah dan lingkungannya. Indikator-indikator keberhasilan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Keberhasilan Gembira Membaca Buku

Kegiatan Membaca Buku Bersama	Indikator	Sikap Yang Termanifestasi Dengan Sadar
Baca gembira bersama Prestasi	Psikologis	Kembali ceria, tidak murung, semangat belajar
	Membaca	Mau membaca dengan kesadaran, tidak dengan paksaan, membaca menjadi kebutuhan
	Berkomunikasi	Mau bercerita, mengungkapkan pikiran pada sesama
	Prestasi	Meningkatnya hasil belajar dengan belajar dengan sungguh-sungguh nilai rapor meningkat, bisa menjawab pertanyaan yang diajukan
	Kembali ke sekolah	Mau kembali belajar ke sekolah, sekolah tidak menjadi lembaga penyiksaan

Melalui buku-buku tersebut, terlihat mereka terangsang untuk membaca, minimal ada keinginan untuk melihat buku. Setiap meminjam buku-buku bekas tersebut, mereka berebut untuk mendapatkannya. Hal ini menjadi ukuran bahwa ada keinginan mereka untuk membaca. Kemudian, pada waktu pemulangan buku seperti yang dijadwalkan, mereka bergabung bersama dengan tutor dan menceritakan isi buku yang dibacanya. Dengan adanya program ini, pihak sekolah secara langsung atau tidak langsung, sangat terbantu dalam menumbuhkan kembali semangat belajar dan membaca dari program gembira bersama dalam tumpukan buku ini.

Kegiatan gembira kedua adalah gembira bersama membaca alam. Kegiatan ini adalah bersama-sama menafsir, menghayati, dan memaknai konteks kondisi sosial alam semesta. Prinsip ini diambil dari tradisi orang Minang yang berguru kepada alam (*alam takambang menjadi guru*). Anak-anak korban gempa diperintahkan menulis apa yang mereka lihat dan rasakan saat kegiatan ini dilakukan.

Kegiatan membaca alam merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kelas dan di alam terbuka. Kegiatan yang dilakukan dalam kelas biasanya menyuruh anak-anak menuliskan apa yang mereka lihat dari lingkungan selama di sekolah. Kemudian, semua yang mereka tulis tersebut dibacakan. Pemilik cerita yang bagus diberi imbalan berupa buku bacaan. Sementara kegiatan membaca alam di luar kelas adalah anak-anak dibawa ke alam terbuka untuk melihat semua fenomena alam. Mereka diminta untuk memilih salah satu objek yang mereka lihat dari alam terbuka itu.

Objek yang mereka pilih tersebut kemudian mereka ceritakan dengan apa adanya. Selanjutnya, tutor menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, apa manfaatnya, dan seterusnya. Peran tutor sangat penting di sini terutama untuk menjelaskan semua fenomena yang

mereka rekam, kemudian dari kejadian itu menjadi satu pelajaran penting. Kegiatan membaca alam ini secara langsung atau tidak langsung membuka pengetahuan yang luas terhadap anak-anak korban gempa.

Objek lingkungan juga berkenaan dengan lingkungan sosial. Kegiatan membaca alam bersama, terkait dengan memaknai lingkungan kemanusiaan atau sosial. Mereka diperkenalkan dengan kemanusiaan, menghargai orang lain, menghargai sesama, dan seterusnya. Mereka diajarkan sikap sopan santun, tolong-menolong, dan bersolidaritas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bergembira membaca alam lebih efektif bagi anak-anak korban gempa untuk bertindak ramah dan bersahabat dengan alam. Mereka diajak memaknai alam sebagai sahabat yang harus diperlakukan dengan baik. Di samping itu, juga sangat efektif untuk memberikan pengetahuan terhadap lingkungan kepada anak-anak korban gempa. Mengajak mereka bersikap bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap pengendalian diri dalam bersikap bagi anak-anak korban gempa supaya hidup teratur dan memiliki kedisiplinan dalam bertindak. Kegiatan ini juga sangat membantu program sekolah pada wilayah gempa dalam membina kebersihan anak-anak korban gempa.

Keunggulan kegiatan membaca alam secara bersama ini adalah menjadikan anak-anak korban gempa tidak traumatik melihat lingkungannya dan sekaligus membimbing mereka memaknai alam sebagai sahabat. Dengan demikian, mereka akan terbiasa memelihara lingkungan, menghadirkan diri dalam alam semesta. Indikator-indikator keberhasilan program ini sebagai berikut.

Tabel 2.3
Indikator Keberhasilan Memaknai Lingkungan Sosial

Kegiatan Membaca Alam	Indikator	Sikap Yang Termanifestasi Dengan Sadar
<i>Lingkungan Sosial</i>	Berbicara	Menghargai dan mendengar orang lain
	Tolong-menolong	Memberikan pertolongan pada orang lain
	Saling menghormati	Memaknai sikap orang lain, menghormati orang lain
	Tidak memaksakan kehendak	Bersikap tidak egois dan individual

Tabel 2.4
Indikator Keberhasilan Memaknai Lingkungan Alam

Kegiatan Membaca Alam	Indikator	Sikap Yang Termanifestasi Dengan Sadar
<i>Lingkungan Alam</i>	Menjaga lingkungan	Bersih, membuang sampah pada tempat, buang air pada tempatnya
	Ramah terhadap alam	Menanam tumbuhan di lingkungan sekolah, menjaga tumbuh-tumbuhan di taman
	Bersahabat alam	Tidak mudah membunuh binatang, menjaga kelestariannya

Diketahui bahwa anak-anak korban gempa sangat membutuhkan media motivasi dan media penguatan psikologis mereka. Pendekatan-pendekatan terhadap alam merupakan salah satu media yang memberikan arti penting dalam memulihkan atau memperkuat kembali psikologis mereka dan melahirkan tindakan sikap sadar mereka terhadap alam. Media ini, menjelaskan pada anak-anak korban gempa bahwa alam sebagai sahabat, sebagai ilmu, dan seterusnya. Implikasi yang mendasar dari kegiatan ini adalah anak-anak korban gempa tidak stres hidup di bedeng-bedeng penampungan yang jauh sama sekali

kondisinya dari kehidupan semula di rumah mereka. Kondisi hidup di bedengan yang tidak normal tersebut menyebabkan anak-anak tidak mau bersekolah, di bedengan sering berkelahi, hidup dalam kondisi tidak menentu sehingga mudah dipengaruhi. Kondisi seperti itu memperparah minat belajar dan rasa ketertekanan psikologis mereka cukup tinggi.

Oleh sebab itu, mereka diajari makna kehidupan bersama, diajari makna alam dengan bergembira supaya rasa tertekan mereka dapat dipulihkan. Hasilnya menunjukkan, di bedeng dan sekolah mereka bisa menjaga kebersihan. Hidup di bedengan, di antara mereka saling mengingatkan untuk kembali belajar ke sekolah. Di sekolah pun mereka melakukan gotong royong dengan gembira, mereka membuat kebun-kebun bunga di halaman sekolah yang baru selesai dibangun, dan seterusnya.

Jadi, anak-anak korban gempa pada dasarnya sangat membutuhkan penguatan-penguatan psikologis dengan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan alam yang disampaikan secara gembira. Hal ini penting diperhatikan karena kondisi yang dialaminya setelah gempa sangat berbeda dengan sebelumnya. Mereka mengalami *shock culture* yang berpengaruh terhadap arti belajar bagi mereka dan kegiatan belajar mereka itu sendiri. Dengan pendekatan-pendekatan belajar membaca alam yang bergembira itu, mereka bisa kembali memaknai arti penting belajar dan mengembangkan diri. Tidak lama berada dalam kungkungan ketersiksaan kondisi yang berlaku setelah gempa. Implikasinya sangat jelas terlihat dampaknya terhadap motivasi belajar mereka. Sekolah dan belajar tidak menjadi beban yang menakutkan, mereka melakukan sesuatu penuh dengan kesadaran, dan seterusnya.

C. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah hierarki yang ada dalam masyarakat. Hierarki ada yang sengaja dibuat dan ada yang terlahir secara alamiah. Namun, yang sangat penting dari kita dalam mengenal hierarki ini adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa kita hidup tidak hanya satu kelompok saja, kita tidak hanya sendiri, tetapi terdiri dari berbagai kelompok.

Stratifikasi sosial yang diperkenalkan kegunaannya adalah untuk menumbuhkan pendidikan yang humanis, pendidikan yang berkeadaban, dan pendidikan yang tidak memarginalkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terkait dengan masalah stratifikasi ini lahirlah pendidikan multikultural. Salah satunya terlihat gambarannya dalam pasal 4 dari Undang-Undang Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan multikultural adalah memosisikan manusia dalam konteks kesederajatan.

Walaupun konsep dan teori multikultural sudah diperkenalkan semenjak tahun 1950-an di Kanada, permasalahan konflik etnik, agama, ras, dan ketidaksetaraan di dunia belum selesai. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk menjelaskan perbedaan ini karena bagaimanapun juga dunia ini bukan diwujudkan dalam satu tatanan dan bentuk budaya yang sama. Pendidikan multikultural penting maknanya bagi negara-negara yang mempunyai keanekaragaman. Hal ini terkait dengan semakin menguatnya pemaknaan etnosentrisme dalam era globalisasi. Penguatan etnosentrisme telah menimbulkan perbenturan-perbenturan budaya yang merugikan manusia dan alam semesta. Menurut Huntington (2000), kebangkitan etnosentrisme yang menjadi "musuh" umat manusia era global ini. Pendidikan multikultural diperlukan untuk menjawab agar keberagaman tidak tercemar ke dalam benturan-benturan tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural

merupakan sarana yang berpotensi untuk menjelaskan toleransi dalam keberagaman.

Pendidikan multikultural sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dunia yang sudah tercabik-cabik akibat penguatan pemaknaan etnosentrisme yang negatif sehingga pertikaian-pertikaian telah menelan korban banyak sekaligus memporak-porandakan kedamaian dunia. Setidaknya, saat ini sedang terjadi 35 pertikaian besar antar-etnis di dunia. Sekitar 38 juta jiwa terusir dari negeri kediannya dan paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslovakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilanka, India hingga Indonesia. Kemudian sepanjang 10 tahun terakhir, peperangan dan konflik antaretnis di dunia semakin menampakkan kebrutalan.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural diharapkan mampu merespons perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat dipahami sebagai suatu kesederajatan dan kesamaan. Pendidikan mempunyai peranan yang besar untuk mewujudkan hal tersebut karena pendidikan seperti dikatakan Paulo Freire, bukan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya, melainkan pendewasaan manusia yang berbudaya dan bermoralitas dengan menjunjung tinggi prinsip universalisme kemanusiaan.

Indonesia sebagai bangsa besar dan sangat beranekaragam maka pendidikan multikultural sangat penting dibangun di sini. Pendidikan multikultural tidak sekadar retorika demokrasi, tetapi sudah harus menemukan konsep dan sistem pengajaran yang relevan dengan konteks negara ini. Keterlambatan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia telah terbukti menghilangkan nilai-nilai

demokrasi, harmonisasi, dan humanisme sehingga keanekaragaman tersebut terseret dalam konflik yang sangat meruntuhkan nilai-nilai universal. Tidak dapat dimungkiri terjadinya benturan-benturan etnik, budaya, agama, dan sebagainya di Indonesia merupakan salah satu akibat dari tidak jelasnya konsep pengajaran pendidikan multikultural dan terlambatnya pendidikan tersebut diajarkan sehingga bangsa ini kehilangan cara membangun keberagaman yang toleran dan kehumanisan.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural harus mampu menjelaskan arti perbedaan-perbedaan dalam keberagaman yang ada sebagai satu hal yang harus dihayati dalam kerangka kesamaan dan kesederajatan. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa memelihara keberagaman sama dengan merawat Indonesia karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman (Azra, 2007).

Pendidikan multikultural pada dasarnya membangun jejaring perbedaan-perbedaan agar bernilai toleransi, saling memahami satu sama lain, dan bukan saling mencurigai (Parekh, 2008). Pendidikan multikultural bermuatan psikologis dalam membangun mentalitas masing-masing individu. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural memerlukan profesionalitas tenaga pendidik. Pendidikan multikultural di Indonesia tidak dapat diajarkan bagian kulit luar seperti yang terjadi selama ini, dimana anak didik hanya digiring untuk menghafal dari perbedaan-perbedaan yang ada (*Tsaqafah*, Vol I No 2 Tahun 2003). Keanekaragaman, menurut Parekh harus dijelaskan dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masing-masing keanekaragaman tersebut. Malahan K. Gandhi, menegaskan perlu dikemukakan dalam pendidikan multikultural adalah nilai-nilai moralitas yang universal sehingga klaim kebenaran (*truth claim*) tidak menjadi gejala pada masing-masing individu. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural

adalah menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi terhadap perbedaan. Masing-masing perbedaan tersebut tidak dipandang mempunyai kelebihan atas satu sama lain, tetapi dimaknai sederajat dan sama sehingga tidak ada permusuhan di antaranya.

Kearifan dari masing-masing keanekaragaman itu dipahami sebagai modal sosial yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat berguna dalam membangun hidup bersama secara harmoni. Hal ini pula yang menyebabkan pentingnya pendidikan multikultural diajarkan di Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia bahkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan (Fadjar, 2008). Pendidikan multikultural harus menjadi agenda untuk mendukung penyelamatan kebhinekaan dan masa depan bangsa. Di samping itu, sebagai proses yang berguna untuk mewujudkan demokrasi sehingga kebangkitan demokrasi di Indonesia tidak berbenturan satu sama lain.

D. Perubahan Sosial dan Perilaku Sosial

Perubahan sosial merupakan bentuk-bentuk baru dari kondisi yang lama. Perubahan sosial terjadi sebagai konsekuensi aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains, dan sebagainya. Perubahan sosial ini menjadi salah satu kajian terpenting dalam sosiologi pendidikan. Malahan, perubahan sosial yang terjadi membuat kajian sosiologi pendidikan semakin kompleks dan luas. Sebagaimana dikatakan Ritzer & Goodman (2004), perubahan sosial menjadi *setting* kajian sosiologi yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, kemunculan revolusi politik, yaitu Revolusi Prancis pada 1789 dan revolusi yang berlangsung sepanjang abad ke-19 merupakan faktor yang paling besar peranannya dalam perkembangan teori sosiologi. Perubahan sosial yang terjadi dalam sejarah dunia, seperti Revolusi

Industri, kemunculan kapitalisme, sosialisme, feminisme, urbanisme, perubahan keagamaan, dan pertumbuhan sains semua menjadi agen yang membangun perkembangan kajian perubahan sosial dari sudut sosiologi. Dari kajian perubahan sosial itu pula lahir pelbagai aliran teori dalam sosiologi.

Mulai dari Ibn Khaldun (1332–1406), Comte (1798–1878), Durkheim (1858–1917), Marx (1818–1883), Weber (1864–1920), Parsons (1902–1979) sampai pada sosiologi modern, perkembangan teori yang dikemukakan oleh masing-masing sosiolog tersebut tidak terlepas dari kajian perubahan sosial. Oleh sebab itu, perubahan sosial menjadi kajian yang berterusan dalam sosiologi pendidikan sampai kini.

Dalam mengkaji perubahan sosial, terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan para sosiolog. Perbedaan pendekatan tersebut telah melahirkan berbagai kesimpulan. Comte (Johnson, 1987; Adam & Sydie, 2000; Ritzer & Goodman, 2004) telah menguraikan perubahan sosial yang berlaku dalam tiga tahap sebagai berikut... *theological or fictitious stage, metaphysical or abstract stage, scientific or positive stage*. Durkheim (Hafekam & Smelser, 1992; Adams & Sydie, 2000; Ritzer & Goodman, 2004) menjelaskan perubahan sosial berupa perubahan solidaritas mekanik kepada organik. Dalam pandangan Marx (Johnson, 1987; Hafekam & Smelser, 1992; Adam & Sydie, 2000), perubahan sosial dapat dilihat dengan nyata ketika terjadi perubahan penguasaan modal. Ibn Khaldun (Johnson, 1987; Soewardi, 1999; Ritzer & Goodman, 2004) menjelaskan perubahan sosial sebagai akibat perubahan tradisi berpindah-pindah bertukar menjadi menetap.

Walaupun demikian, ada kesepakatan dari segi memaknai perubahan sosial, yaitu sama-sama memaknai perubahan sosial sebagai peralihan suatu keadaan masyarakat pada suatu keadaan yang baru.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai uraian yang dikemukakan oleh, misalnya Ibn Khaldun dalam pembahasan perubahan sosial yang terjadi dalam suku nomad yang menetap (Soewardi, 1999), uraian Comte dalam hukum tiga tahap proses sosial (Johnson, 1987; Adam & Syedi, 2000; Ritzer & Goodman, 2004), uraian Durkheim dalam perubahan solidaritas mekanik ke organik (Johnson, 1987; Adam & Syedie, 2000), dalam uraian Tonnies tentang *gemeinschaft* dan *gesellschaft* (Johnson, 1987), uraian Marx tentang pertentangan kelas (Hafekam & Smelser, 1992; Adam & Syedie, 2000), dalam kajian Ogburn tentang pengaruh teknologi dalam perubahan sosial (Laeyendecker, 1983; Johnson, 1987) dan uraian sosiolog lainnya. Dalam prinsip yang sama, pengertian perubahan sosial sebagai peralihan dapat juga dilihat dalam istilah lain yang dikemukakan oleh para sosiolog, seperti istilah *social dynamics* (Adam & Syedie, 2000) dan pertukaran sosial dalam istilah Homans (Johnson, 1987). Oleh sebab itu, pengertian perubahan sosial dapat dirumuskan sebagai perubahan satu realitas ke dalam bentuk realitas yang lain, yang berbeda daripada realitas dasarnya.

Parsons (Ritzer & Goodman, 2004) telah pula memberikan arti perubahan sosial sebagai pertukaran yang berlaku dalam sistem sosial. Pertukaran satu sistem akan memengaruhi sistem sosial lainnya. Konsep perubahan Parsons ini, dapat dipakai untuk menganalisis perubahan dalam konteks yang lebih mikro dan makro. Bagi Parsons, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tradisional tidak saja dapat diukur dari struktur sosial yang berubah, tetapi juga dapat dilihat dari perubahan tindakan individu atau masyarakat.

Sehubungan perubahan sosial yang mengandung makna sebagai peralihan sebuah realitas yang berbeda dari semula maka para ilmuwan sosial juga membagi dua jenis bentuk perubahan sosial. Dua jenis tersebut adalah perubahan sosial evolusioner dan revolusioner. Model evolusioner

bergerak sama halnya dengan pergerakan sejarah. Model evolusioner mengambil model perubahan seperti halnya perubahan dalam alur sejarah, yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dan kumulatif. Sementara perubahan model revolusioner merupakan perubahan yang terjadi dengan begitu cepat tanpa diprediksikan sebelumnya.

Kegunaan konsep perubahan sosial dalam pendidikan adalah untuk mengetahui akar persoalan perubahan dan bentuk apa yang harus dilakukan pada masyarakat yang berubah tersebut. Misalnya saat sekarang, perilaku masyarakat yang jauh berubah dalam masalah pemaknaan moralitas maka yang diperlukan dalam pendidikan adalah pendidikan moral dengan mengedepankan tokoh-tokoh rujukan.

Mencermati Indonesia belakangan ini ada satu kegelisahan yang mendalam menghantui kita. Kegelisahan tersebut dilatarbelakangi karena negara yang berpenduduk hampir 240 juta jiwa ini setiap harinya hampir tidak pernah berhenti dari amukan kekerasan. Sebuah potret yang sangat menyedihkan di tengah kondisi Indonesia yang sedang membangun demokratisasi. Sebuah kegelisahan di tengah Indonesia membangun peradaban, sebuah kecemasan di tengah Indonesia membangun religiusitas yang mendamaikan, dan seterusnya.

Coba bayangkan, kekerasan sudah menjadi tradisi, sudah menjadi satu *adab* kebiasaan yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh orang-orang perkotaan yang hidup dalam ranah sosial yang heterogen, tetapi merebak ke ranah sosial pedesaan yang homogen. Dengan demikian, pencitraan sosial Indonesia tidak luput dari konflik dan kekerasan, tidak luput dari perang berdarah-darah, tidak luput dari amukan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan.

Risiko dari keterlambatan dari pendidikan multikultural di Indonesia, terjadinya perbenturan budaya, etnis dan agama belakangan

ini. Perbenturan ini, telah merugikan dinamika sosial, politik, ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Melihat dari besarnya risiko itu semua, baru pada pasca-Orde Baru ini menguat wacana pendidikan multikultural. Pendidikan yang memberikan cara pandang terhadap dunia luar yang mengedepankan universal kemanusiaan. Tidak menjadikan perbedaan agama, ras, etnis, bahasa dan budaya sebagai ancaman terhadap satu sama lainnya, tetapi melihatnya sebagai satu kesatuan dengan mengedepankan universalisme kemanusiaan.

Dilihat dari berbagai laporan yang dilakukan oleh berbagai pihak tentang masalah konflik akibat mengatasnamakan agama yang terjadi di Indonesia ternyata tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Sikap intoleransi atas dasar agama dan keyakinan pun menjadi kasus yang terlalu mudah dilakukan oleh masyarakat. Menurut laporan Wahid Institute, jumlah kasus intoleransi ini jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan 2011, terjadi peningkatan 16%, yakni dari 134 kasus meningkat menjadi 184 kasus. Bentuk intoleransi atas nama agama itu di antaranya dapat dilihat:

Tabel 2.5

BENTUK TINDAKAN INTOLERANSI / DISKRIMINASI 2011		
Intimidasi dan ancaman kekerasan		48
Pernyataan dan penyebaran kebencian	27	
Pembakaran / Perusakan properti	26	
Diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan	26	
Penyerangan fisik & penganiayaan	14	
Pencokan rumah ibadah agama lain	12	
Pemaksaan keyakinan	23	
Pelarangan ibadah dan kebebasan berekspresi	9	
Pembunuhan / teror	6	
Tuduhan sesat	3	

Sumber: www.wahidinstitute.org

Tindak intoleransi atas nama agama ini, sangat berpotensi terhadap terjadinya konflik agama yang lebih luas. Agama akan dijadikan landasan pacu untuk membentuk antara satu pemeluk agama dengan yang lain. Pelebaran konflik atas nama agama juga dapat dilihat melalui tingginya eskalasi kekerasan dengan mengatasnamakan agama yang digerakkan oleh pemeluk agama. Bentuk kekerasan itu, tidak hanya terkait dengan kemanusiaan, tetapi juga dapat diukur dengan *trend* pembakaran terhadap rumah ibadah. Menurut CRCS UGM sebagaimana dipublikasi di www.crcs.ugm.ac.id, selama tahun 2011 telah terjadi 36 kasus pembakaran terhadap rumah ibadah yang terdiri dari 26 kasus (72%) terkait keberadaan gereja dan 10 kasus (28%) terkait masjid. Sebagian besar kasus tersebut, 25 kasus (70%) merupakan konflik antar-agama dan 11 kasus (30 %) berupa konflik internal dalam suatu komunitas agama. Sementara dilihat dari asal lokasi kejadian terbanyak terjadi kasus tersebut Jawa bagian barat (Jabar, Banten, DKI) masih menjadi titik konsentrasi masalah, yaitu 9 kasus (25%), menyusul Jawa Tengah (7 kasus atau 19 %) dan Sumatera Utara dan Riau masing-masing 4 kasus (11 %). Sisanya tersebar di Kaltim, Kalteng, Suliteng, Sulsel, Maluku, NTT, dan Papua. Masalah-masalah menyangkut rumah ibadah tersebut termasuk berupa pembakaran, teror bom, penutupan, pembongkaran, dan pelemparan rumah ibadah.

Sementara, kasus konflik antaretnis juga tidak kalah kejadiannya dengan kasus kekerasan atas nama agama. Menurut laporan penelitian Institut Titian sebagaimana dipublikasikan dalam <http://m.inilah.com/read/detail/75397/menguk-bantu-kekerasan-2008>, yang mana selama tahun 2008 sudah terjadi 1.136 insiden kekerasan di Indonesia artinya setiap hari rata-rata terjadi tiga insiden di Indonesia. Terdapat beberapa insiden yang menonjol selama tahun 2008, yaitu penghakiman massal

sebanyak 30% atau 338 insiden, tawuran dengan 21% atau 240 insiden, konflik politik dengan 16% atau 180 insiden, selanjutnya menyusul konflik sumber daya ekonomi sebanyak 11% atau 123 insiden konflik sumber daya alam 10% atau 109 insiden pengerojukan menempati 4% atau sebanyak 47 insiden, disusul oleh konflik etnis/agama sebanyak 2% atau 28 insiden, dan lain lain. Beberapa wilayah di Indonesia dengan intensitas kekerasan tertinggi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera dan Nanggroe Aceh Darussalam kekerasan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 1.736 orang luka-luka.

Pergulatan kekerasan ini oleh Samuel P. Huntington (2000) disebutkan sebagai benturan peradaban dan ancaman yang sudah diprediksi akan terjadi di era milenium, terutama dialami oleh negara-negara multikultur, negara yang memiliki kepebagian etnis, agama, ras, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semestinya negara-negara pemilik multikultural harus cepat mengantisipasi dengan memasukkan pendidikan multikultural pada dunia pendidikan.

Indonesia sebagai negara yang beragam etnis itu terlanjut mengeset pendidikan multikultural sehingga salah satu risiko yang dialami bangsa Indonesia adalah amukan-amukan yang tiada henti seperti sekarang ini. Pendidikan kita hanya mengenal toleransi dalam teori-teori yang tidak membumi sehingga keberagaman menjadi pemicu pemusnahan. Padahal, keragaman itu akan ada gunanya jika dalam keragaman ada toleransi. Toleransi itu yang kandas kita bangun bahkan dianggap tidak perlu. Oleh sebab itu, dunia pendidikan harus merumuskan pendidikan multikultural sehingga nilai-nilai toleransi terinternalisasi, dimana orang tidak berani membunuh manusia di luar golongannya, tidak berani merusak rumah ibadah selain dari rumah ibadah agamanya, tidak berani memmerangi saudaranya, dan sebagainya.

Selama pemerintah tidak serius menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekerasan yang mengambang itu maka ia menjadi benang kusut yang selalu mengancam keharmonisan. Kekerasan menjadi peristiwa yang berkepanjangan. Di samping itu, pemerintah mestinya harus peka terhadap gejala-gejala pemicu kekerasan dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah harus memiliki konsep dan strategi dalam menangani masalah-masalah kekerasan tersebut. Dalam konteks ini kita semakin meyakini perlunya pendidikan multikultural, pendidikan yang dapat memprediksi, mengatasi, dan mendamaikan masyarakat yang beragam dengan rasa kemanusiaan, bukan dengan kekerasan.

Satu hal yang dialami Indonesia saat ini adalah kehilangan tokoh-tokoh rujukan. Tokoh-tokoh yang dapat memberikan contoh dan teladan dalam membangun kemanusiaan, tokoh-tokoh yang dapat menyelipkan perdamaian di atas keberagaman, serta tokoh-tokoh lainnya yang mampu membangun wajah Indonesia dengan penuh persahabatan. Dalam alur sejarah, tokoh-tokoh seperti itu sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan keindonesiaannya.

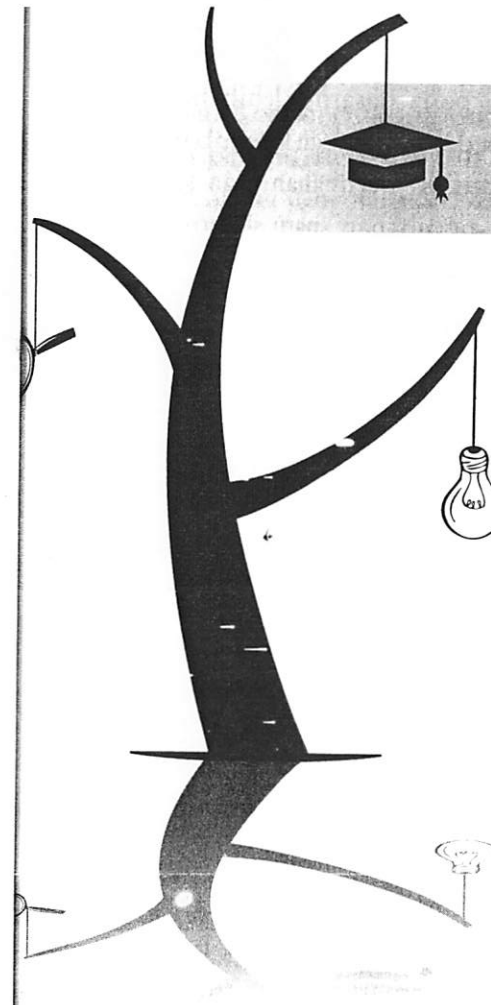
Kini tokoh-tokoh seperti tempo lalu itu tidak tumbuh dan berkembang. Sekarang hanya tokoh-tokoh yang lahir dari pencitraan melalui karbitan perpaduan antara materialistik dengan peran media massa sebagai media mempopulerkannya. Pencitraan *transaksional* jalan pintas, jalan yang membawa seseorang menjadi elite, bukan dibentuk melalui proses pendidikan, proses alamiah dan karismatik kepribadian yang dimilikinya. Tetapi, diukur dari kemampuannya mampu mengeluarkan uang, diukur dengan kemampuannya bisa memenangkan seseorang, dan seterusnya. Tumbuh berkembang adalah elite-elite yang egois dengan perilakunya sangat ditentukan oleh uang

dan kekuasaan. Idealisme dijunjkalbalikkan, kualitas kepemimpinan kendor, dan bahkan tidak berkesan dari waktu ke waktu membangun pencerahan.

Kinilah ingin sekali kita merasakan kembali hadir sosok kultur Bung Hatta yang sederhana, sosok Soekarno yang idealis tak mau dieja, sosok pejuang-pejuang bangsa yang tanpa pamrih. Sosok pendidik yang mendidik dengan hati nurani, sosok politikus yang berdiri di atas semua golongan dan seterusnya. Saat sekarang kita hanya mengenang tokoh-tokoh itu sebatas kenangan karena nilai-nilai yang ditanamkannya tidak pernah lagi kita cermati dengan bijak. Pendidikan kita tidak menolehnya sebagai sebuah aset kultural bangsa yang berguna untuk membangun perilaku anak didik, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang kehilangan tokoh-tokoh rujukan yang dapat menjadi pembangun moralitas bangsa.

Bangsa yang berjalan di atas ketandusan moralitas ditambah dengan elite yang sedikit melakukan pencerahan maka persoalan yang dihadapi bangsa ini sering tidak terselesaikan. Persoalan yang tidak terselesaikan itu akhirnya menjadi polemik bahkan menjadi pemicu frustrasi sosial di akar rumput. Tidak ayal, kekerasan yang merebak sekarang ini sebagai suatu bukti ketidakmampuan Pemerintah menjembatani permasalahan-permasalahan bangsa. Rakyat menjadi geram tumbuh dalam permasalahan yang silih berganti. Akhirnya, rakyat mencari jalan keluar dengan “ala” tribal dan anarkis.

BAB III



PENDEKATAN TEORI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Dalam teori sosiologi klasik, pada dasarnya lebih banyak menilai keadaan sosial berada dalam keadaan keseimbangan, harmonis, dan tidak berkonflik. Perubahan juga sangat terkait dengan sistem sosial sehingga perubahan suatu sistem akan memengaruhi terhadap sistem lainnya. Oleh sebab itu, manusia yang dimaknai dengan insan yang kreatif tidak pernah berhenti dari perubahan sistem dalam kehidupan. Berkaitan dengan itu tidak akan pernah ditemui masyarakat yang statis, tetapi setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir sehingga perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat (Dahrendorf, 1959: 162).

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat menandakan manusia mengalami evolusi sosiokultural. Kecenderungan dari evolusi sosiokultural ini adalah bertambahnya kompleksitas masyarakat (Lauer, 1989). Robert Cernairo menyebutkan perubahan sebagai evolusi sosiokultural yang mengarah semakin kompleksnya masyarakat. Evolusi sosiokultural ini memiliki banyak dimensi dan arah kecenderungan. Evolusi sosiokultural meliputi seluruh sistem sosiokultural. Oleh sebab itu, perubahan berawal dari satu komponen dan menimbulkan perubahan-perubahan pada komponen yang lain. Seluruh mata rantai sebab akibat bergerak sehingga akhirnya menghasilkan transformasi pada seluruh sistem sosiokultural (Sanderson, 1995: 64–65).

Evolusi sosiokultural adalah sebuah proses perubahan sosial dengan arah tertentu yang mencakup transformasi bentuk sosial lama ke bentuk baru. Marvin Harris (Rahimah, 1997) mengatakan, perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan penjumlahan dari evolusi sistem sosiokultural. Sosiokultural memiliki komponen-komponen dasar maka perubahan satu komponen memengaruhi komponen

lainnya. Komponen-komponen dasar dari sistem sosiokultural itu adalah pertama, superstruktur ideologis, terdiri dari ideologi umum, agama, ilmu pengetahuan, kesenian, kesastraan, dan seterusnya. Kedua, struktur sosial terdiri dari ada atau tidaknya stratifikasi sosial, ada atau tidaknya stratifikasi rasial dan etnis, kepolitikkan, pembagian kerja, keluarga, dan keberabatan serta pendidikan. Ketiga, teknologi, ekonomi, ekologi, dan demografi.

Perspektif perubahan seperti yang dikemukakan di atas adalah perspektif sosiologis biologis, yang mana perubahan satu sistem menyebabkan perubahan lainnya. Berbeda dengan perubahan sosiologis nonbiologis seperti teori konflik. Sosiologis biologis memandang perubahan selalu dalam konteks keseimbangan, sedangkan konflik sebaliknya, perubahan atau konflik tidak mesti berada dalam stadium keseimbangan (*equilibrium*).

Asumsi dasar dari pendekatan konflik adalah (1) masyarakat senantiasa dalam perubahan yang tidak pernah berakhir; (2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik dalam dirinya atau dengan kata lain, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat; (3) Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Sementara kelompok sosiologis biologis terutama konsep pendekatan perubahan struktural fungsional, menekankan asumsi dasar dalam melihat masyarakat dan bagaimana kondisi perubahannya, sebagai berikut.

1. Masyarakat merupakan suatu sistem dari sistem yang lain.
2. Suatu sistem dengan sistem yang lain saling memengaruhi sehingga perubahan satu sistem memengaruhi sistem yang lainnya.
3. Secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis.

4. Sistem sosial selalu berproses ke arah penyesuaian institusional.
5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner.
6. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yakni pertama, penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*). Kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional. Ketiga, penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat (Nasikun, 1984: 11-12).

Parsons lebih jauh menganalisis perubahan sistem biologis ini melalui sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu teori sistem. Teori ini menekankan bahwa perubahan satu sistem memengaruhi terhadap sistem yang lainnya. Oleh sebab itu, teori sistem bagi Parsons sangat terkait terhadap pemakaian aksi dalam setiap konteks karena perubahan adalah sebuah akses dari hubungan timbal balik dari setiap sistem.

Perubahan seperti yang dikemukakan Parsons merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu proses perubahan terhadap sistem yang lainnya. Dengan kata lain, perubahan adalah tipe proses khusus yang menimbulkan perubahan dalam struktur sosial. Perubahan sebagai suatu proses ada empat jenis, yaitu (1) proses keseimbangan, meliputi proses di dalam sistem sosial; (2) Perubahan struktural, mencakup perubahan fundamental dari sistem; (3) Diferensiasi struktural meliputi perubahan satu subsistem atau lebih, tetapi tidak menyebabkan perubahan sistem secara keseluruhan; (4) Evolusi, yakni proses yang melukiskan pola perkembangan masyarakat sepanjang waktu (Luer, 1989: 111).

Proses keseimbangan dapat dianalisis menurut empat hukum, yaitu sebagai berikut.

1. "Prinsip kelambatan" yang menegaskan kelangsgan laju dan arah suatu proses, kecuali bila kekuatan pendorong yang berlawanan menimpa proses tersebut.
2. "Prinsip aksi dan reaksi" yang menegaskan bahwa setiap perubahan arah suatu proses akan diimbangi oleh perubahan lain yang kekuatan pendorongnya dan kekuatan dari arah berlawananya adalah setara.
3. "Prinsip upaya" yang menyatakan bahwa perubahan dalam laju proses sebanding dengan besarnya kekuatan pendorong yang digunakan atau yang diambil.
4. "Prinsip sistem integrasi" yang menegaskan bahwa nasib unsur-unsur suatu pola tergantung pada nilai unsur tersebut sebagai faktor pemersatu (Parsons dalam Luer, 1989).

Penekanan keseimbangan ini sangat penting artinya bagi Parsons dalam melihat perubahan yang terjadi karena tolak ukur perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem atau subsistem yang lainnya. Begitu pula halnya dengan perubahan struktural. Perubahan struktural dalam suatu sistem sosial adalah perubahan dalam kultur dan institusi-institusi yang melembaga dalam masyarakat. Sementara diferensiasi struktural menimbulkan perubahan di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial secara keseluruhan. Pada dasarnya diferensiasi adalah proses yang menyebabkan berbagai jenis perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat.

Bagi Parsons ada empat struktur institusional yang ada dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. *Struktur kekerabatan*. Struktur ini berhubungan dengan pengungkapan perasaan seksual, pemeliharaan, dan pendidikan anak muda.
2. *Struktur prestasi instrumental dan stratifikasi*. Struktur ini menyalurkan semangat dorong individu dalam memenuhi tugas yang perlu untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama.
3. *Teritorial, kekuatan, dan integrasi dalam sistem kekuasaan*. Semua masyarakat harus memiliki suatu bentuk organisasi teritorial.
4. *Agama dan integrasi nilai*. Secara tradisional agama memberikan kerangka arti simbol yang bersifat umum karenanya sistem nilai dalam masyarakat memperoleh makna akhir atau mutlak (Johnson, 1986: 126).

Dalam konteks perubahan ini, Parsons semakin mempertegas bahwa masyarakat mana pun di dunia ini selalu mengalami evolusi. Arah umum evolusi sosial menuju pada peningkatan kemampuan adaptasi. Parsons menganalisis evolusi sosial dengan satu paradigma yang dimulainya dari proses diferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi menurut Parsons menimbulkan unit-unit baru yang berbeda baik struktur maupun makna fungsionalnya bagi sistem yang lebih luas (Soekanto, 1986).

Berkaitan dengan proses perubahan ini, Parsons berusaha membuat visualisasi sistem aksi secara menyeluruh yang mencakup kebudayaan, struktur sosial, kepribadian, dan organisme sebagai subsistem. Setiap sistem mempunyai empat fungsi makna, yaitu setiap sistem harus mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah; adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola yang tersembunyi (Lauer, 1989: 109).

Berdasarkan perubahan timbal balik antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, Parsons menegaskan strategi analisis fungsionalnya berkaitan dengan struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keharusan ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang universal. Oleh sebab itu, transformasi dan perubahan yang muncul sebagai akibat dari perubahan sistem lainnya.

Penekanan Parsons terhadap perubahan adalah hubungan sebab akibat antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Signifikansi hubungan itu dijelaskannya secara lebih mendetail dengan analisis fungsional (*functional imperative* atau *prasyarat*). Ciri-ciri umum yang ada dalam seluruh sistem yang hidup ialah persyaratan atau *functional imperative*. Menurut Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah (1) berhubungan dengan kebutuhan internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya, dan (2) Berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Paloma, 1984: 181).

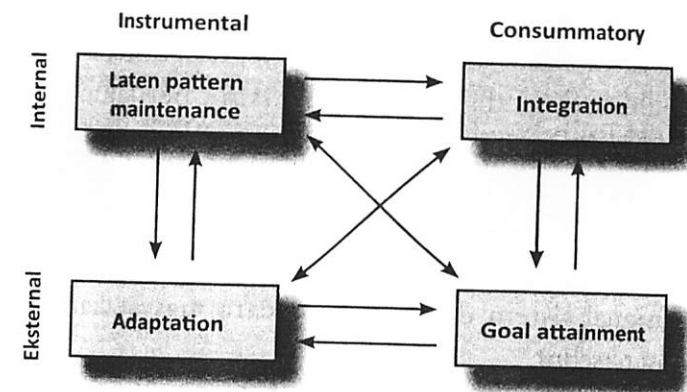
Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Dalam konteks ini, perubahan adalah sebuah proses transisional yang harus dicermati melalui konteks-konteks analisis yang tajam sehingga dapat diketahui bagaimana akses perubahan tersebut terhadap masyarakat dan kulturnya. Keterkaitan dengan masalah ini pembahasan perubahan menurut Parsons dapat dilihat melalui tingkat kefungsionalan.

Menurut Parsons, ada empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem dalam konteks perubahan ini. Keempat

persyaratan tersebut merupakan fundamen yang digambarkan melalui skema A-G-I-L. Skema A-G-I-L ini kemudian menjadi *mainstream* dari teori sistem Parsons, fungsi *adaptation*, atau menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem untuk menghadapi lingkungannya. Ada dua dimensi permasalahan yang harus dibedakan. Pertama, harus ada suatu penyesuaian dari sistem terhadap tuntutan kenyataan yang keras dan tidak dapat diubah. Kedua, ada proses transformasi aktif dari situasi. Fungsi *goal attainment* merupakan persyaratan fungsional yang muncul dari pandangan Parsons bahwa tindakan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuannya. Tujuan yang diperhatikan di sini bukan tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial (Paloma, 1984; 181–183).

Fungsi *integration* merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara anggota-anggota dalam sistem sosial. Fungsional dalam hal integrasi berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian timbal balik dari unit-unit atau subsistem-subsistem. Fungsi *latent pattern maintenance* adalah fungsi pemeliharaan pola yang mengacu pada keharusan mempertahankan stabilitas budaya terlembaga yang mendefinisikan struktur dari sistem.

Keempat persyaratan fungsional ini bergerak secara dinamis dan saling terkait satu sama lain sehingga perubahan merupakan suatu akses dari pertukaran sistem. Pertukaran ini dapat digambarkan sebagai berikut.



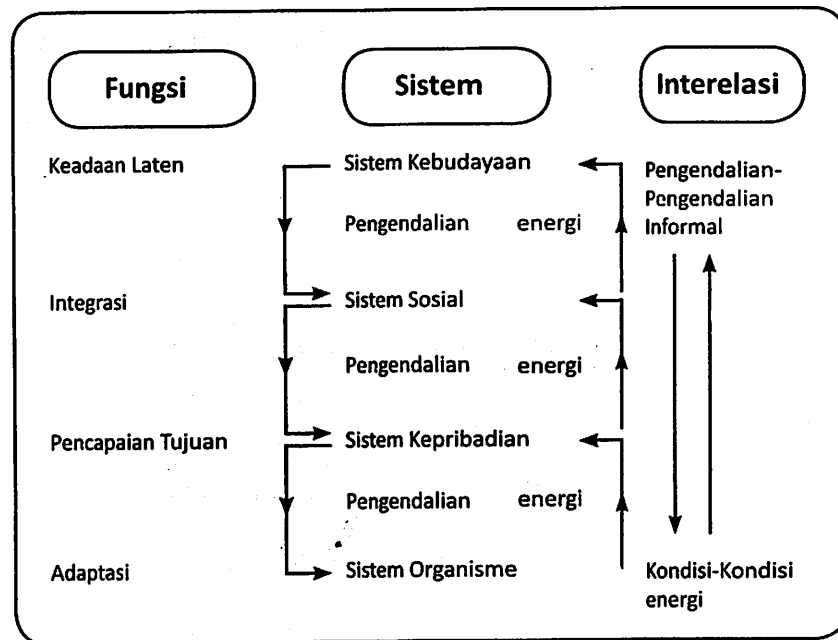
Gambar 3.1
Pertukaran subsistem fungsional

Keempat persyaratan fungsional ini dalam masyarakat mana pun akan pasti berhubungan secara hierarki dengan sistem tindakan sosial. Sistem tindakan sosial ini terdiri dari sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan organisme perilaku. Konsep hubungan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Sistem Tindakan	Persyaratan Fungsional
Sistem Budaya	Pemeliharaan pola-pola laten
Sistem Sosial	Integrasi
Sistem Kepribadian	Pencapaian Tujuan
Organisme perilaku	Adaptasi

Sistem budaya atau kultur merupakan pola-pola yang ada dalam sistem. Sistem sosial adalah sumber integrasi, sistem kepribadian memenuhi tujuan dan sistem organisme perilaku memenuhi kebutuhan yang bersifat penyesuaian (Paloma, 1984: 184). Parsons menyimpulkan bahwa hubungan seluruh komponen atau unsur-unsur tersebut bersifat informasional (Soekanto, 1986: 49). Perubahan-perubahan dalam masyarakat sangat tergantung kepada informasional sistem dan bagaimana cara masyarakat merespons informasi tersebut.

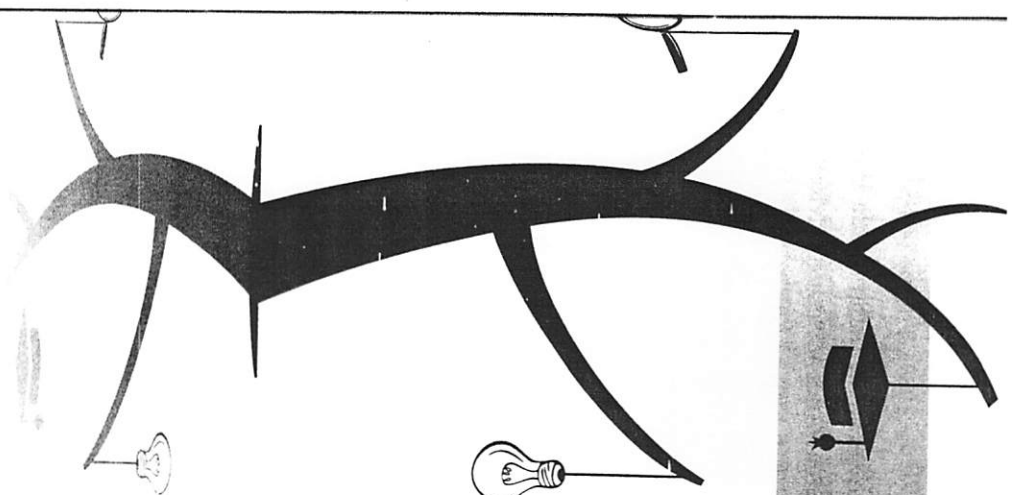
Keterkaitan persyaratan fungsional dengan sistem tindakan ini mempunyai hubungan hierarkis yang dinamakan dengan *cybernetic hierarchy* yang secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut.



Sementara teori-teori kritis lebih banyak berbicara masalah-masalah kritis, seperti masalah gender, kebijakan negara, kebijakan sosial, psikologi sosial, gerakan sosial, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pada tataran sosiologi pendidikan, sosiologi kritis lebih banyak melakukan kritik terhadap ideologi pendidikan, institusi sekolah, wacana pendidikan, dan seterusnya.



BAB IV



LEMBAGA PENDIDIKAN & PERANAN HUMANISASI

A. Rendahnya Kualitas Pendidikan

Permasalahan kualitas pendidikan di negara ini masih berada dalam potret yang buram dan tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survei tahun 2007 dari *World Competitiveness Year Book* memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 53.

Di samping itu, kualitas pendidikan tinggi Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jika dilihat dari survei *Times Higher Education Supplement* (THES) 2006, perguruan tinggi Indonesia baru bisa menjebol deretan 250 yang diwakili oleh Universitas Indonesia, kualitas ini berada di bawah prestasi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menempati urutan 185. Kemudian pada 2007, menurut survei THES dari 3000 universitas di dunia, ITB baru berhasil pada urutan 927 dan sekaligus menjadi perguruan tinggi top di Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi di Indonesia masih belum dapat menyaingi perguruan tinggi seperti di Singapura, Thailand, dan seterusnya.

Implikasi kualitas pendidikan rendah terhadap sumber daya manusia sangat jelas. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset Ciputra yang menyatakan bahwa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk, sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Saat sekarang Singapura sudah mempunyai 7% pengusaha dan Amerika Serikat sebanyak 5% dari jumlah penduduk.

Dampak yang lain dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) Indonesia. Menurut laporan *United Nation Development Programme/UNDP*, HDI pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI, Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sementara Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia.

Akar permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tidak lagi berada pada satu faktor, tetapi digerogoti oleh berbagai faktor yang sudah komplikasi. Oleh sebab itu, membenahi dunia pendidikan di Indonesia perlu keseriusan yang tinggi dan strategi yang genius. Kalau perlu mengikuti tawaran Ivan Illich dengan melakukan *institutional revolution*. Dalam konteks ini, untuk memperbaiki dunia pendidikan minimal ada tiga modal yang harus menyentuh dunia pendidikan, yaitu modal sosial, kapital, dan fisik. Terpuruknya kualitas pendidikan di Indonesia tidak dapat disangkal sebagai akibat dari minimnya ketiga modal tersebut.

Pada Era Reformasi, anggaran pendidikan telah ditetapkan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini pun masih rendah jika dibandingkan dengan negara jiran Malaysia yang telah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 25% dari APBN negaranya. Wajar, percepatan peningkatan kualitas pendidikan di negara tetangga ini lebih cepat jika dibandingkan dengan Indonesia. Padahal, pada sekitar tahun 1970, negara tetangga ini banyak mengimpor guru dari Indonesia.

Dampak yang signifikan dari rendahnya anggaran pendidikan ini adalah minimnya sarana yang mendukung kualitas pendidikan. Maka, dengan penyusutan anggaran ini percepatan peningkatan kualitas pendidikan akan ikut terhalang. Sarana-sarana penunjang pendidikan akan dapat diprediksikan berjalan di tempat. Salah satunya akan terlihat dari pengelolaan perpustakaan sekolah yang semakin memprihatinkan. Di Indonesia, pernah dilaporkan dari 200 ribu unit Sekolah Dasar di Indonesia hanya 20 ribu yang memiliki perpustakaan standar. Demikian pula dengan SLTP. Dari sekitar 70 ribu unit SLTP, hanya 36% yang memenuhi standar. Untuk SMU, hanya 54% yang mempunyai perpustakaan berkualitas standar. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi, dari sekitar 4 ribu perguruan tinggi di Indonesia, hanya 60 % yang memenuhi standar.

Kondisi perpustakaan yang demikian, tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan melek membaca siswa. Sementara di negara-negara maju dan beberapa negara tetangga sudah beralih pada melek informasi dan teknologi. Rendahnya melek membaca tersebut sebagai salah satu hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil temuan riset *International Association for Evaluation of Educational Achievement* (IAEEA) dalam tahun 1998–2001, ternyata dari 35 negara yang disurvei, melek baca siswa Indonesia berada pada urutan yang terakhir. Pada 28 November 2007, IAEEA kembali mempublikasi hasil risetnya tentang minat baca anak di 41 negara, termasuk Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia masuk ke dalam kelompok negara belahan bumi bagian Selatan bersama Selandia Baru dan Afrika Selatan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, semenjak tahun 1998 kebiasaan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat paling rendah (skor 51,7). Skor ini di bawah Filipina

(52,6), Thailand (65,1), dan Singapura (74,0). Sementara BPS tahun 2006 mempublikasikan, membaca bagi masyarakat Indonesia belum dijadikan sebagai kegiatan sumber utama untuk mendapatkan informasi. Masyarakat lebih memilih menonton televisi (85,9%), mendengarkan radio (40,3%), dan membaca koran (23,5%). Rendahnya minat baca di kalangan siswa, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena membaca secara signifikan dapat melahirkan kecakapan, cenderung memiliki inteligensi, penguasaan bahasa, dan keterampilan berkomunikasi (Cullinan & Bagert, 1996). Oleh sebab itu, di negara-negara maju pengembangan minat baca masyarakat sangat diperhatikan dan difasilitasi.

Di samping rendahnya anggaran pendidikan, ternyata profesionalitas guru di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Profesionalitas guru yang rendah ini menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Pendidikan Negara E-9 yang berlangsung di Bali pada 12 Maret 2008. KTT ini telah meyakinkan kepada negara-negara yang berpenduduk terbesar di dunia untuk mempercepat meningkat profesionalitas guru dengan meningkatkan pendidikan guru. Sebab, bagaimanapun juga pendidikan guru sangat menentukan mutu pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Hattie (2000), bahwa 63% mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh pendidikan guru dan selebihnya baru oleh variabel-variabel lainnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas pendidikan guru harus diperhatikan. Inilah di antara permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini bagaimanapun juga mesti cepat diatasi sehingga kualitas pendidikan yang tengah mati suri ini dapat bangkit dengan cepat.

Di balik potret kualitas pendidikan yang masih rendah, ternyata Pemerintah juga belum mampu menciptakan pendidikan untuk semua.

Biaya pendidikan yang semakin mahal ternyata telah memperpanjang deretan anak-anak tidak sekolah. Menurut hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO), jumlah anak putus sekolah di Indonesia mencapai 4,18 juta. Kemudian, 8000 anak di bawah umur yang bekerja ternyata mengalami putus sekolah. Hal ini berarti pendidikan masih belum menyentuh ranah masyarakat miskin. Sekolah-sekolah tanpa biaya yang dilansir baru menjadi komoditas politik ketika kampanye menjelang pemilu.

Sebuah risiko yang sangat fenomenologis, jika pendidikan di Indonesia tidak dapat menyentuh semua kalangan. Untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia Pemerintah harus menyediakan pendidikan yang mampu diakses oleh semua kalangan sehingga anak-anak bangsa ini tidak mengalami putus sekolah.

B. Sekolah dan Motivasi *Achievement*

Sekolah adalah lembaga pemotivasi dan peningkatan prestasi atau *achievement*. Oleh sebab itu, sekolah harus diperhatikan mulai dari pendidikan usia dini. Ternyata pendidikan usia dini belum sepenuhnya dapat ditangani oleh Pemerintah sehingga masih banyak anak prasekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diamanahkan oleh pasal 28 Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dari 8.259.200 orang anak prasekolah usia 5–6 tahun, hanya sebanyak 22,33% atau 1.845.983 orang yang baru mendapatkan akses pendidikan. Rasio layanan lembaga pendidikan terhadap anak usia dini tergolong rendah, yaitu 1:86. Pada 2006, dari 28 juta anak usia 0–6 tahun, sebanyak 73% atau sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan pendidikan usia dini. Sementara sisanya 27% atau sekitar 7,5 juta anak, mendapatkan pendidikan seperti membaca dan berhitung di bawah lembaga-lembaga nonformal seperti kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan usia dini belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah dan sangat memerlukan perhatian serius guna menyelamatkan masa depan bangsa ini. Tidak dapat dimungkiri, lambatnya penanganan pendidikan usia dini akan memperpanjang catatan buruk kualitas pendidikan dan menghambat percepatan peningkatan daya saing kualitas manusia Indonesia. Pada saat sekarang, kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, menurut laporan *World Competitiveness Year Book* 2007, daya saing pendidikan Indonesia berada pada urutan ke 53 dari 55 negara yang disurvei. Sementara daya saing sumber daya manusia jauh tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari rating *Human Development Index* (HDI) Indonesia di peringkat dunia berada pada urutan 107 dari 177 negara. Di ASEAN Indonesia di urutan ke-7 dari sembilan negara-negara ASEAN. Di samping itu, indeks kinerja *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia berada di urutan 138 dari 140 negara. Oleh sebab itu, wajar di Indonesia baru ada 0,18% pengusaha, sedangkan syarat sebuah negara maju kata Ciputra, seperti yang telah diungkapkan di atas, minimal terdapat 2% pengusaha dari jumlah penduduk. Singapura saat sekarang sudah mempunyai 5% dari jumlah penduduknya.

Keterlambatan penanganan pendidikan usia dini bersignifikasi pula terhadap lambatnya pemberantasan buta aksara sehingga persentase melek huruf dan membaca di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menurut laporan *World Bank*, melek membaca anak Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara menurut versi *International Association for Evaluation of Educational Achievement* (IAEEA), minat membaca anak-anak Indonesia setaraf dengan Selandia Baru dan Afrika Selatan.

Untuk keluar dari permasalahan ini, pendidikan harus dibenahi mulai dari usia dini. Pendidikan usia dini tidak dapat diabaikan. Pengabaian terhadap hal ini hanya akan memperparah keterpurukan bangsa ini. Sehubungan dengan itu, Giddens dalam *The Third Way* merekomendasikan, pendidikan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemajuan di era global sekarang ini. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah mewujudkan mesin-mesin cerdas pencetak pendidikan yang berkualitas.

Salah satu mesin cerdas itu diaahkan untuk membangun kualitas pendidikan usia dini. Satu hal yang paling mendesak dilakukan untuk memperbaiki pendidikan anak usia dini adalah melakukan pemerataan terhadap institusi sekolah. Masalahnya, keterbatasan institusi sekolah tersebut telah menjadi salah satu faktor tidak tertanganinya pendidikan anak usia dini. Menurut data Balitbang, Pendidikan Nasional 2007, sebanyak 77,66% atau 641.3217 dari 8.259.200 anak usia dini belum tersentuh oleh pendidikan karena keterbatasan institusi sekolah.

Di Indonesia baru pada 2004, pendidikan anak usia dini mulai mendapat pelayanan yang luas, seperti melalui bina keluarga balita (9,6%), taman kanak-kanak (6,5%), raudhatul athfal (1,4%), kelompok bermain (0,13%), dan taman penitipan anak (0,05%), serta lainnya (9,9%). Pada 2007, pelayanan tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, ditemukan banyak di antara mereka belajar di ruangan kelas yang tidak layak untuk pendidikan, misalnya dari 93.629 buah TK di Indonesia hanya 77.339 buah yang layak menjadi tempat belajar. Walaupun demikian, pelayanan tersebut masih tergolong lambat dan masih belum mampu menanggulangi pendidikan usia dini secara merata. Masih banyak anak-anak usia dini yang tersia-siakan.

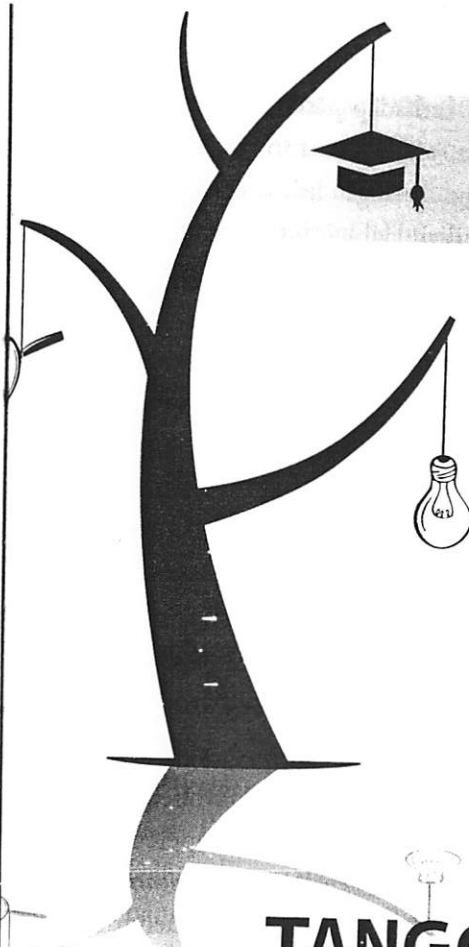
Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembinaan dan penanganan pendidikan usia dini dari tahun ke tahun dirasakan masih kecil dan masih belum mampu mempercepat lahirnya pendidikan usia dini yang menyentuh semua kalangan. Pada 2006, pemerintah baru mampu menganggarkan sebesar Rp.17,1 miliar untuk dikelola pusat dan Rp.92,6 miliar untuk dikelola daerah. Jumlah dana ini masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah anak-anak usia dini yang ada di Indonesia.

Pada 2007, terjadi penggenjotan dana untuk mendorong mutu pendidikan usia dini. Pemerintah telah mengucurkan dana sekitar US\$127,8 juta. Dana ini hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dan Pemerintah Belanda. Namun, melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan usia dini termasuk sarana dan prasarana maka jumlah anggaran keuangan yang dikucurkan tersebut belum sepenuhnya mampu mencerahkan pendidikan usia dini di negara yang berjumlah 224 juta jiwa ini.

Untuk menanggulangi masalah ini, perlu digagaskan penyelamatan bersama dan tidak bertumpu pada anggaran yang diberikan Pemerintah saja. Pemerintah harus mempunyai sistem yang cerdas dalam menggagas pendidikan yang berbasis partisipasi. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah mempunyai peluang yang luas dalam mengembangkan daerah bersama masyarakat. Peluang yang luas ini pula yang akan menyelamatkan pendidikan usia dini. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Menurut Osborne dan Geabler, salah satu tugas dari Pemerintah adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut dan tidak selalu menempatkan masyarakat di ranah objek.

Dalam konteks kondisi Indonesia seperti sekarang ini, jumlah orang miskin meningkat akibat kenaikan harga dan pemutusan hubungan kerja yang cukup tajam maka yang terpenting dilakukan dalam menyelamatkan anak-anak mereka adalah membangun sekolah untuk semua. Termasuk membangun sekolah usia dini yang ramah biaya yang dapat dijangkau oleh semua orang. Oleh sebab itu, filantropi-filantropi pendidikan harus berkembang dan sekolah-sekolah kapitalis yang berorientasi bisnis belaka sudah saatnya berhati nurani untuk menampung anak bangsa yang membutuhkan pendidikan.

BAB V



TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT, PEMERINTAH, & KELUARGA TERHADAP PENDIDIKAN

Tanggung jawab semua pihak terhadap pendidikan adalah suatu keharusan. Masalahnya, rendahnya tanggung jawab terhadap pendidikan dari semua kalangan ini, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kasus rendahnya minat baca anak Indonesia.

Rendahnya minat baca anak Indonesia diakibatkan oleh minimnya perhatian terhadap minat baca oleh semua pihak sehingga yang terjadi adalah minat baca anak Indonesia jauh merosot. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Dalam konteks minat baca ini, tanggung jawab semua pihak itu dapat dilihat dari sini. Bagaimana mestinya tanggung jawab Pemerintah, masyarakat, dan keluarga dapat dilihat dari fenomena minat baca tersebut.

A. Wujud Tanggung Jawab Nyata dalam Membangun Minat Baca

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan minat baca masyarakatnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Di antaranya survei *International Associations for Evaluation of Educational Achievement* (IAEEA) pada 1992 menyebutkan kemampuan membaca murid-murid sekolah dasar kelas IV Indonesia berada pada urutan ke-29 dari 30 negara di dunia. Indonesia berada satu tingkat di atas Venezuela. Riset *International Association for Evaluation of Educational Achievement* (IAEEA) tahun 1996, menginformasikan bahwa melek baca siswa usia 9–14 tahun Indonesia berada pada urutan ke-41 dari 49 negara yang disurvei. Data Bank Dunia tahun 1998 menginformasikan pula kebiasaan membaca anak-anak Indonesia berada pada level paling rendah (skor 51,7). Skor ini di bawah Filipina (52,6), Thailand (65,1), dan Singapura (74,0) (Laporan World Bank Tahun 1998).

Dalam rentang tahun 1998–2001 hasil survei IAEEA dari 35 negara, menginformasikan melek baca siswa Indonesia berada pada urutan yang terakhir. Publikasi IAEEA tanggal 28 November 2007 tentang minat baca dari 41 negara menginformasikan melek membaca siswa Indonesia selvel dengan negara belahan bagian Selatan bersama Selandia Baru dan Afrika Selatan.

Sementara BPS tahun 2006 mempublikasikan bahwa aktivitas membaca bagi masyarakat Indonesia belum dijadikan sebagai sumber kegiatan untuk mendapatkan informasi. Masyarakat lebih memilih menonton televisi (85,9%) dan mendengarkan radio (40,3%) ketimbang membaca (23,5%) (*wuu.bps.go.id*). Artinya, membaca untuk mendapatkan informasi, baru dilakukan oleh 23,5% dari total penduduk Indonesia. Masyarakat lebih suka mendapatkan informasi dari televisi dan radio. Dengan data ini terbukti bahwa membaca belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Bahkan, kalau dilihat dari data pengguna buku koleksi sumbangan dari PBB dan Bank Dunia sebagaimana dikelola oleh perpustakaan nasional, semakin terlihat ketidakbergairahan membaca di negara ini. Dilaporkan dalam rentang tahun 1995 sampai tahun 1999, buku sumbangan tersebut hanya dibaca oleh 536 orang, dengan rincian per tahun sebagai berikut. Pada 1995, tercatat 161 pembaca, tahun 1996 tinggal 134 pembaca. Tahun berikutnya 1997, turun lagi menjadi hanya 76 pembaca. Meski tahun 1998 sempat naik menjadi 84 pembaca, tahun 1999 kembali turun menjadi 81 pembaca (Laporan Kepala Sub-Bidang Kerja sama Perpustakaan Nasional RI, Sauliah, yang dimuat dalam *Kompas* 1 Februari 2000).

Salah satu hasil survey mikro yang dilakukan oleh Sumatera Barat Intellectual Society (S.I.S) tentang minat baca siswa SLTP di Kota Padang, menunjukkan bahwa dari 100 orang siswa 70% di

antaranya hanya membaca kurang dari 1 jam dalam sehari. Hal ini semakin memperjelas minat baca di kalangan siswa dan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Membaca belum menjadi prioritas untuk mendapatkan ilmu dan informasi yang baru. Membaca masih menjadi kebutuhan pelengkap dan tidak dijadikan sebagai sebuah tradisi dalam kehidupan.

B. Dampak Minat Baca yang Rendah

Rendahnya minat baca di kalangan siswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya berpengaruh buruk terhadap kualitas pendidikan. Wajar, sudah lebih setengah abad lebih bangsa Indonesia merdeka, permasalahan kualitas pendidikan masih berada dalam potret yang buram. Kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil tes yang dilakukan *Trends in Science Study* (TIMSS) 2003 terhadap para siswa kelas II SLTP 50 negara di dunia, menunjukkan prestasi siswa-siswa Indonesia berada di peringkat ke-36 dengan nilai rata-rata internasional 474. Hasil survei *World Competitiveness Year Book* dari tahun 1997 sampai tahun 2007 melaporkan pendidikan Indonesia berada dalam urutan yang rendah, yaitu pada 1997 dari 49 negara yang diteliti, Indonesia berada di urutan 39. Pada 1999, dari 47 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 46. Tahun 2002 dari 49 negara, Indonesia berada pada urutan 47 dan pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia baru menempati urutan yang ke-53 (*World Competitiveness Yearbook*, 2007).

Kualitas pendidikan yang rendah berimplikasi pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola masa depan dan

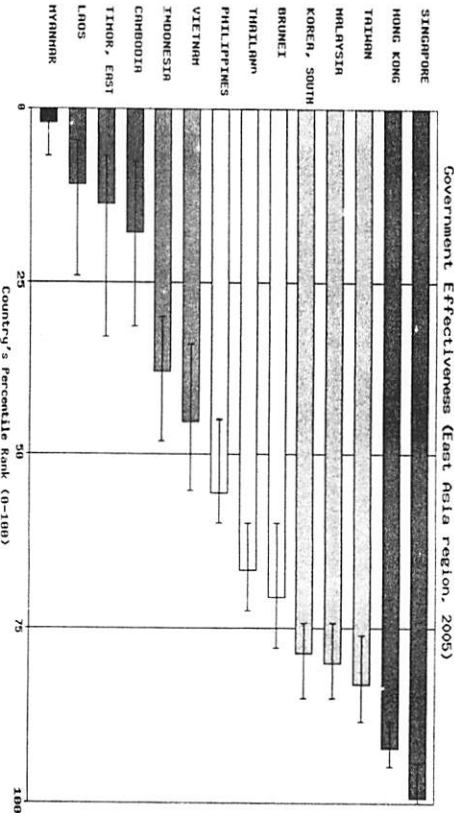
lambatnya kemiskinan teratasi. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat dari minimnya bangsa Indonesia melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang berdaya saing. Implikasi yang lain dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang rendah. Data dari laporan *United Nation Development Programme* (UNDP) HDI pada 2007 menunjukkan HDI Indonesia yang masih rendah. Hasil terperinci dari survei ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia secara langsung atau tidak langsung ikut memperpanjang angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2007 sampai 2007 kemiskinan di Indonesia berjumlah 37,17 juta orang atau 16,58%. Namun, mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia maka jumlah orang miskin di Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk. Tidak kalah pentingnya, rendahnya sumber daya manusia terlihat dari angka pengangguran yang dikandung oleh negara ini. BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 5.1
Penangguran di Indonesia dari Tahun 2003-Februari 2008

Tahun		Tidak pernah sekolah	Belum/ tidak tamat sekolah	SD	SLTP	SLTA	SLTA Kejuruan	Diploma I,II,III/ Akademi	Univ	Jumlah
2003		352,5	719,4	2.495,9	2.458,9	2.435,8	1.037,1	202,8	245,9	9.939,3
2004		336,0	668,3	2.275,3	2.690,9	2.441,2	1.254,3	237,3	348,1	10.251,4
2005	Feb	342,7	670,1	2.541,0	2.680,8	2.680,8	1230,8	322,8	385,4	10.854,3
	Nov	264,5	673,5	2.729,9	3.151,2	3.069,3	2.037,6	308,5	395,5	11.899,3
2006	Feb	234,5	615,0	2.675,2	2.860,0	2.842,9	1.204,1	297,7	375,6	11.104,7
	Agus	170,7	611,3	2.589,7	2.730,0	2.851,5	1.305,2	278,1	395,6	10.932,0
2007	Feb	145,8	520,3	2.753,5	2.643,1	2.630,4	1.114,7	330,3	409,9	10.547,9
	Agus	94,3	438,58	2.179,8	2.264,2	2.532,2	1.538,3	397,2	566,6	10.011,1
2008 Feb		79,8	448,4	2.216,7	2.66,6	2.204,4	1.165,6	519,9	626,6	9.427,6

Jumlah dalam ribuan
Sumber: BPS 2008-11-22



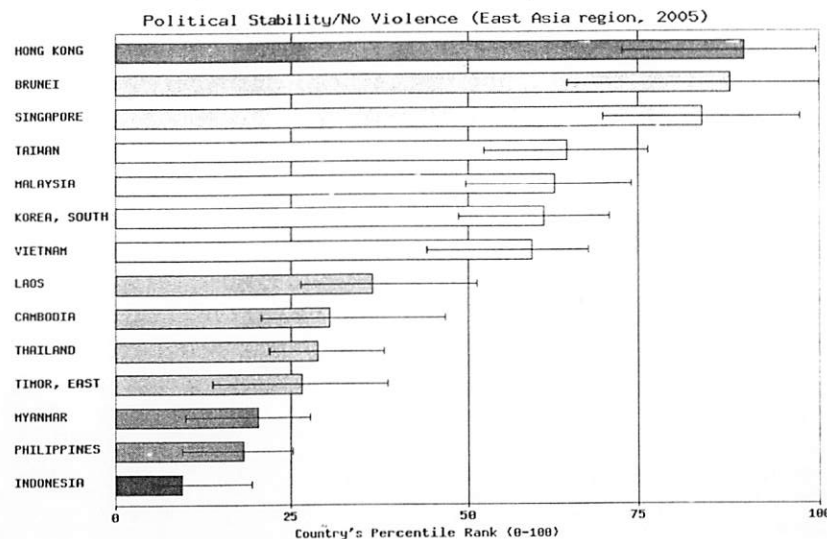
Tidak dapat dinafikan pula rendahnya kualitas sumber daya manusia ini akan berpengaruh negatif terhadap keefektifan Pemerintahan sebagai pengelola negara. Bank Dunia melaporkan keefektifan Pemerintahan Indonesia dalam mengelola negara berada di bawah Vietnam, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Tidak dapat dimungkiri pula bahwa rendahnya minat baca di negara ini ikut memicu kekerasan dan anarkisme yang mementingkan kinerja otot daripada kinerja pikiran atau otak. Sebab, otak yang tidak terasah cenderung melahirkan tindakan kurang pertimbangan dan dangkal analisis (Cullinan & Bagert, 1996). Oleh sebab itu, meningkatnya kinerja penyelesaian masalah melalui kekerasan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh ketidakterasan otak melalui aktivitas membaca tersebut. Jepang sebagai negara maju menyadari betul hal ini sehingga negara yang pernah hancur lebur dibom oleh Amerika dan sekutunya ini melakukan gerakan *20 Minutes Reading*

of *Mother and Child*, dimana seorang ibu harus mengajak anaknya membaca, minimal dua puluh menit sebelum si anak tidur. Kelly-Vance & Schreck menemukan bahwa minat baca anak akan meningkat jika diadakan kolaborasi pembinaan antara sekolah dan keluarga (Kelly-Vance & Schreck, 2002).

Penyelesaian masalah melalui kekuatan otot sedang terjadi di alam sosial, ekonomi, politik, dan budaya di negara ini. Terutama dalam dunia politik, kekerasan sering mewarnai dalam penyelesaian masalah. Data Bank Dunia tahun 2005 mencatat bahwa stabilitas politik Indonesia tanpa kekerasan berada di bawah Filipina seperti terlihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 5.3
Stabilitas Politik Indonesia Tanpa Kekerasan



Sumber: Laporan Bank Dunia Tahun 2005

Berdasarkan fakta dan data tersebut maka sarana-sarana yang dapat meningkatkan minat baca perlu mendapat perhatian serius. Rendahnya minat baca telah terbukti berpengaruh terhadap analisis masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih cenderung menyelesaikan masalah melalui kekuatan otot jika dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang didahului oleh analisis. Kekuatan analisis ini lebih banyak dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang dibaca.

Dalam konteks ini, perpustakaan sekolah harus mendapat perhatian dan pengelolaan yang profesional untuk membangun minat baca anak didik sehingga melahirkan pendidikan yang berkualitas dan anak didik yang mampu beranalisis. Kemampuan analisis sangat dipengaruhi oleh membaca karena membaca dapat mengasah inteligensi, kecakapan berbahasa, berkomunikasi, dan menulis (Cullinan & Bagert, 1996).

C. Membedah Akar Permasalahan

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh minimnya fasilitas-fasilitas pendukung, seperti jumlah perpustakaan yang tidak sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Sementara kehadiran televisi dan audiovisual lainnya begitu cepat dan inovatif sehingga keadaan ini semakin meminggirkan tradisi baca di kalangan masyarakat Indonesia dan tidak heran pula saat ini di dalam masyarakat Indonesia sedang terjadi lompatan budaya dari budaya *praliterer* ke masa *pascaliterer* tanpa melalui masa literer, artinya melompat menjadi masyarakat yang senang menonton televisi tanpa melalui budaya gemar membaca. Lompatan budaya ini berlaku di kalangan anak didik di Indonesia.

Dilihat dari segi jumlah perpustakaan umum sebagai salah satu tempat mendapatkan bahan bacaan masyarakat sampai saat sekarang jumlahnya hanya 2.585 perpustakaan. Jika dirasionalkan dengan jumlah penduduk Indonesia maka satu perpustakaan umum harus sanggup melayani 85 ribu penduduk (Taryadi, 2003). Dari 64.000 desa di Indonesia, ternyata yang mempunyai perpustakaan hanya 22%. Sementara jumlah unit perpustakaan di berbagai departemen dan perusahaan, baru sekitar 31% yang mempunyai perpustakaan.

Keminiman bahan bacaan juga menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat Indonesia menumbuhkan minat baca. Selanjutnya, negara yang berjumlah 240 juta jiwa ini hanya mampu menerbitkan buku sebagai gudang ilmu per tahunnya sebanyak 10.000 judul per tahun. Jumlah ini tentu jauh tertinggal jika dibandingkan dengan China dengan penduduk 1,3 miliar jiwa yang menerbitkan 140.000 judul buku baru setiap tahun. Vietnam dengan 80 juta jiwa menerbitkan 15.000 judul buku, Malaysia dengan 26 juta jiwa menerbitkan 10.000 judul per tahunnya. Sementara jumlah surat kabar pun mempunyai jumlah yang terbatas dengan rasio satu surat kabar dibaca oleh 45 orang. Rasio ini masih di bawah Filipina 1: 30 dan Srilanka 1:38 (*Media Indonesia* "Minat Baca Mengkhawatirkan", 27 Agustus 2007).

Rendahnya minat baca di kalangan siswa tidak dapat dimungkiri pula akibat dari perpustakaan sekolah yang tidak mencukupi dan memadai. Hal ini terlihat dari 110 ribu sekolah yang ada di Indonesia, teridentifikasi hanya 18% yang mempunyai perpustakaan (*Media Indonesia*, 8 September 2000). Dari 200 ribu unit sekolah dasar di Indonesia, hanya 20 ribu yang memiliki perpustakaan standar. Demikian pula dengan SLTP, dari 70 ribu unit SLTP, hanya 36% yang memenuhi standar. Untuk SMU, hanya 54% yang mempunyai

perpustakaan berkualitas standar. Kemudian untuk perguruan tinggi, dari 4 ribu perguruan tinggi di Indonesia, hanya 60% yang memenuhi standar. Sementara dari sekitar 1.000 instansi, diperkirakan baru 80% sampai 90% yang memiliki perpustakaan dengan kualitas standar (*Republika*, 20 Mei 2000). Sementara Deputy Pengembangan Perpustakaan Nasional menyebutkan dari 3000 jumlah SD dan SLTP di Indonesia baru 5% yang memiliki perpustakaan (*Media Indonesia*, 27 Agustus 2006).

Dari data tersebut, sekolah di Indonesia sangat sedikit memfasilitasi perpustakaan sebagai sarana yang meyakinkan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Perpustakaan belum dijadikan sebagai gudang ilmu yang sangat menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan sehingga perpustakaan sekolah belum diperhatikan dan ditilik secara serius. Pengembangan perpustakaan masih berada dalam konstelasi biaya yang rendah. Bahkan, pihak sekolah tidak memaknai perpustakaan sebagai sarana yang penting untuk dikembangkan ke arah yang lebih maju dan profesional.

Perpustakaan sekolah yang tidak terkelola dengan profesional telah memperpanjang keburaman dunia pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, potret buram dunia pendidikan di Indonesia tidak lagi dipengaruhi oleh rendahnya anggaran pendidikan di samping kurang dan tidak meratanya guru di Indonesia, tetapi dipengaruhi pula oleh terbatasnya jumlah sarana yang dapat membangun minat baca anak didik. Bahkan, dari data di atas terlihat adanya peminggiran atau pemarginalan eksistensi perpustakaan sekolah dalam ruang lingkup institusi pendidikan. Perpustakaan sekolah masih dianggap sebagai komponen yang kurang bermakna dalam dunia pendidikan sehingga tidak menjadi bagian yang terpenting untuk dikembangkan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

D. Membangun Perpustakaan Sekolah Berbasis Masyarakat

Giddens dalam *The Third Way* merekomendasikan, pendidikan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemajuan di era global (Giddens, 2000). Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, diperlukan perangkat dan pendukung pendidikan yang lengkap dan maju. Lebih jauh lagi kalau perlu dilakukan *institutional revolution* seperti yang disarankan oleh Illich (Freire dkk., 2009). Illich meyakini bahwa untuk memajukan sumber daya manusia, institusi pendidikan harus membangun profesionalitas. Pencapaian profesionalitas itu diperlukan peran serta banyak komponen dan kecerdasan orang yang mengelola institusi tersebut.

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu peranti yang ikut mencerdaskan anak didik tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sudah saatnya perpustakaan sekolah dibangun dengan pengelolaan yang profesional dan tidak lagi dijadikan sebagai tumpukan buku paket, tetapi dijadikan sebagai institusi modern yang disenangi untuk dikunjungi oleh anak didik. Pihak sekolah harus melihat perpustakaan dengan visi yang profesional dan modern.

Pihak sekolah sudah saatnya mempunyai strategi dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Pengembangan perpustakaan sekolah tidak hanya terfokus pada anggaran yang dialokasikan Pemerintah, tetapi dapat dilakukan dengan program berbasis masyarakat. Jika pihak sekolah masih terfokus pada anggaran biaya yang dialokasikan Pemerintah dalam pengembangan perpustakaan sekolah maka sekolah yang akan mempunyai perpustakaan yang representatif di masa akan datang dapat dihitung dengan jari. Sebab masalahnya, jika dilihat dari anggaran untuk pendidikan, negara ini mempunyai anggaran pendidikan yang rendah. Walaupun sudah dirancang 20%

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetap saja rendah jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Di Malaysia, anggaran pendidikan 25% dari APBN negara, Thailand 30 persen, dan Myanmar 18 persen (Laporan UNDP tahun 2004).

Bahkan, kebijakan anggaran pendidikan yang disepakati 20% ini belum pula terlaksana sepenuhnya. Malahan dalam anggaran tahun 2008, terjadi pengurangan anggaran pendidikan yang mengejutkan. Semula menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, pos untuk pendidikan sebesar Rp.49,7 triliun. Namun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1/Mk.02/2008 pada 2 Januari 2008, terjadi penyusutan anggaran 15 persen. Dengan demikian, anggaran pendidikan pada APBN 2008 jika dikurangi hingga 15 persen hanya tinggal Rp.42,3 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2007 yang berjumlah Rp.44,1 triliun (*Kompas*, 27 Februari 2008).

Pada anggaran tahun 2008 ini pula penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca juga mengalami pengurangan yang signifikan, semula dianggarkan sekitar Rp.41 miliar kemudian dipotong separo. Pada mulanya dana itu akan digunakan untuk bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat di 33 provinsi dengan target sekitar 2.250 lembaga. Akibat penyusutan anggaran ini maka pengadaan untuk 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat *mobile* atau bergerak tidak akan dapat dilaksanakan. Pembangunan perpustakaan dan sumber belajar untuk pendidikan dasar juga mengalami pemotongan Rp.30 miliar. Padahal, berdasarkan data Depdiknas sampai akhir tahun 2007, jumlah perpustakaan sekolah masih sangat minim. Di Indonesia, hanya 27,6 persen sekolah dasar yang memiliki perpustakaan (*Kompas*, 21 April 2008).

Pengurangan anggaran ini secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Jika pengembangan perpustakaan sekolah bertahan dengan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah, jelas nasib perpustakaan sekolah tidak akan berubah dan keberadaannya tidak akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa yang tengah terpuruk di era global ini. Dalam konteks ini sudah seharusnya pihak sekolah melakukan usaha alternatif untuk mengembangkan perpustakaan sekolah sehingga sekolah mempunyai perpustakaan yang berkembang secara terus-menerus.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengelola sekolah yang cerdas dan mampu meng-*update* institusi pendidikan dalam kondisi bagaimanapun, sekalipun anggaran biaya perpustakaan masih kecil dialokasikan oleh Pemerintah. Osborne dan Geabler memaparkan kecehdasan pengelola institusi tersebut sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam era sekarang. Institusi yang dikelola oleh orang-orang cerdas akan terus berkembang dan bisa menghadapi rintangan¹. Pada era otonomi daerah, saran Osborne dan Geabler tersebut bergema di negara ini, kemudian diikuti dengan penggiatan gerakan berbasis masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan belaka, tetapi lebih penting dari itu masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat harus dibangun untuk pengembangan sumber daya manusia.

Perpustakaan sekolah dapat dikembangkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Pihak sekolah perlu mengaggas dengan cerdas strategi tersebut. Pengembangan perpustakaan berbasis masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagi cara, tidak mesti bentuk

1. Penelitian Osborne dan Geabler dalam mencerdaskan sebuah institusi. Pengelola institusi harus mempunyai visi dan misi yang dapat *survive* dalam kondisi bagaimanapun.

dan programnya sama pada setiap sekolah. Pengembangan perpustakaan sekolah berbasis masyarakat minimal akan dapat menyelesaikan permasalahan koleksi buku yang terbatas dan fasilitas perpustakaan sekolah yang sangat minim. Kedua hal ini menjadi persoalan yang paling mendasar dihadapi oleh perpustakaan sekolah dan sekaligus persoalan yang paling dominan di seluruh perpustakaan sekolah.

1. Pengembangan Sarana Koleksi Buku

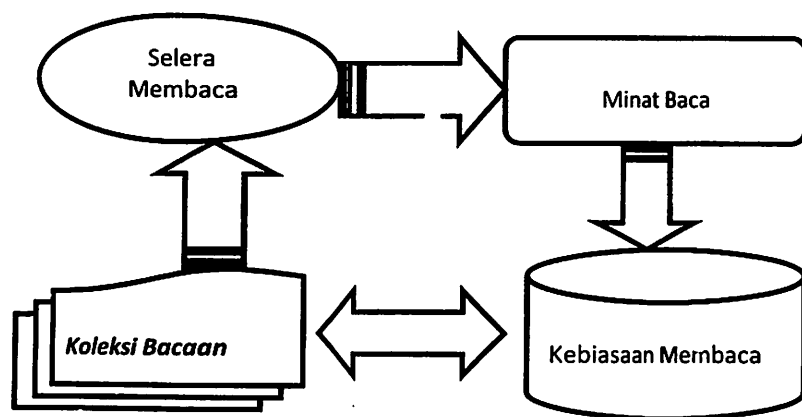
Sesungguhnya yang terjadi sekarang ini di perpustakaan sekolah adalah koleksi buku yang tidak mencukupi. Perpustakaan sekolah hanya diisi oleh buku-buku paket sehingga perpustakaan sekolah hanya sebagai gudang atau tempat penyimpanan buku paket tersebut. Akibatnya, perpustakaan sekolah tidak akrab dengan anak didik. Kondisi ini pula yang menyebabkan perpustakaan sekolah tidak mempunyai hubungan yang signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan.²

Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pihak sekolah tidak mempunyai inovasi dan strategisasi dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Pihak sekolah telah terbiasa dengan kondisi perpustakaan sekolah sebagai gudang buku paket sehingga membaca tidak menjadi tradisi di kalangan anak didik. Akhirnya, yang berlangsung secara terus-menerus adalah sistem pembelajaran "CBSA" (*catat buku siswa aman*), sekalipun sistem pembelajaran telah diubah berkali-kali. Hal ini berarti pihak sekolah belum mampu membangkitkan minat baca anak didik. Kecidakmampuan pihak sekolah dalam membangun minat baca ini berarti pihak sekolah membiarkan otak anak didik *kelaparan*. Di

2. Hasil survei yang dilakukan di beberapa sekolah di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa sangat kondisi perpustakaan sekolah pada umumnya minim dengan koleksi buku. Bahkan koleksi buku perpustakaan didominasi oleh buku-buku paket.

samping itu, ikut memperpanjang catatan buram pendidikan sehingga bangsa ini sulit untuk bangkit menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Untuk membangun perpustakaan sekolah yang dapat memicu minat baca anak didik, koleksi buku perpustakaan harus di-*update* dan ditambah secara terus-menerus. Perpustakaan sekolah tidak hanya diisi dengan buku paket, tetapi juga diisi dengan bahan bacaan lain, baik fiksi maupun nonfiksi.

Bahan bacaan yang tersedia sangat memengaruhi keberhasilan sebuah perpustakaan mewujudkan minat baca. Keragaman dan kelengkapan koleksi bahan bacaan merupakan salah satu hal yang sangat memengaruhi keberhasilan eksistensi perpustakaan sekolah sebagai pemacu minat baca. Sebab, koleksi bacaan adalah daya tarik yang sangat potensial bagi sebuah perpustakaan untuk menarik kunjungan, bahkan dapat membangun tradisi membaca. Pengaruh koleksi bacaan terhadap tradisi membaca dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 5.1
Pengaruh Koleksi Perpustakaan Terhadap Kebiasaan Membaca
Sumber: Perpustakaan Nasional 2002

2. Pengembangan Fasilitas Perpustakaan

Permasalahan lain yang dihadapi perpustakaan sekolah sekarang ini adalah masalah fasilitas perpustakaan yang belum lengkap atau yang belum sesuai dengan standar sebuah perpustakaan. Fasilitas perpustakaan pada dasarnya dapat mengubah *image* perpustakaan yang selama ini dipandang sebagai gudang buku yang tidak menyenangkan.

Negara-negara yang konsisten dalam peningkatan kualitas pendidikan, perpustakaannya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga perpustakaan tidak lagi sebagai gudang buku. Akan tetapi, sudah menjadi sebuah institusi yang mempunyai multifungsi sehingga tidak mengherankan perpustakaan sudah menjadi tempat bermain dan tempat rekreasi³. Sehubungan dengan itu, mengapa di negara kita perpustakaan tidak banyak dikunjungi oleh masyarakat, salah satu penyebabnya adalah fasilitas perpustakaan masih didominasi oleh koleksi buku. Bahkan, fasilitas ruang baca perpustakaan masih sumpek dan belum memberikan kenyamanan.

Belum tercapainya tujuan perpustakaan sekolah membangun minat baca anak didik di antaranya diakibatkan oleh faktor fasilitas ini pula. Perpustakaan sekolah masih beroperasi dengan fasilitas yang minim, bahkan hanya berisi buku-buku paket saja sehingga persepsi tentang perpustakaan belum berubah di kalangan anak didik, bahkan

3. Hasil survei yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Singapura dalam tahun 2007 dan 2008, bahwa perpustakaan tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan akademik untuk mendapatkan bahan-bahan keakademikan, tetapi perpustakaan dimanfaatkan oleh semua kalangan. Bahkan, perpustakaan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan manula untuk mengisi waktu luangnya. Perpustakaan nasional Singapura merupakan salah satu perpustakaan terbaik dan terlengkap di rantau ini. Perpustakaan negara ini juga menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat setempat sehingga tidak mengherankan setiap hari-hari libur perpustakaan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kondisi ini berlaku disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang sangat lengkap, maju, dan modern.

di kalangan masyarakat Indonesia perpustakaan masih dipandang sebagai gedung buku yang membosankan.

Belum banyak pihak yang mempunyai kepedulian yang signifikan untuk membangun fasilitas perpustakaan yang memadai tersebut. Bahkan, Perpustakaan Nasional sekalipun masih mengandalkan buku sebagai alat meningkatkan minat baca⁴. Kondisi ini jelas ketinggalan zaman dan tidak relevan dalam konteks sekarang. Perpustakaan sudah saatnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk fasilitas ruangan baca yang terkesan *rileks* dan tidak menegangkan. Fasilitas perpustakaan juga sudah berbasis teknologi. Koleksi ilmu pengetahuan tidak lagi dalam bentuk buku dan kertas, tetapi telah tersedia dalam berbagai sarana teknologi seperti CD dan data online yang sangat mudah diakses.

Fasilitas perpustakaan sekolah yang terbatas pada kenyataannya telah mengakibatkan lambatnya tercapai fungsi perpustakaan sebagai pembangun minat baca anak didik. Keterbatasan fasilitas ini pada umumnya dialami oleh setiap perpustakaan sekolah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kendala dan keterbatasan sarana dan fasilitas ini sudah saatnya dirancang perpustakaan sekolah yang berbasis masyarakat oleh pihak sekolah.

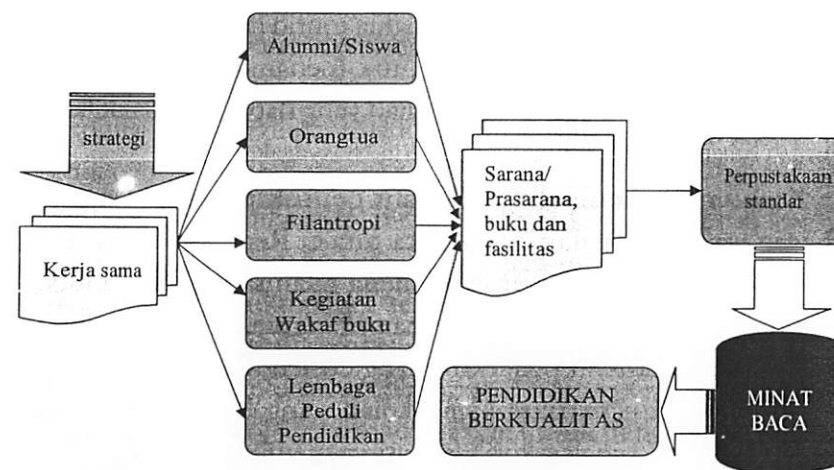
E. Membangun Peran Serta Masyarakat

Pengembangan perpustakaan sekolah tidak dapat menunggu kucuran dana dari Pemerintah saja. Pengembangan perpustakaan sekolah sudah

4. Perpustakaan Nasional pada 2002 mengeluarkan buku *Pedoman Pembinaan Minat Baca*. Dalam buku ini, diungkapkan bahan bacaan saja yang menjadi pemicu minat baca. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konteks sekarang ini dan hal ini pun dianggap ketinggalan zaman, karena minat baca sangat bergantung pada banyak faktor yang memengaruhinya selain daripada buku. Termasuk juga lingkungan sebagaimana disebutkan oleh Susan Burns (1998) dalam *Starting Out Right*, minat membaca merupakan suatu yang kompleks yang melibatkan keterampilan membaca sekaligus lingkungan yang melingkupinya.

saatnya dilakukan dengan konsep kerja sama yang terpadu antara masyarakat dan pihak sekolah sehingga perpustakaan sekolah tumbuh dan berkembang secara ideal dan memenuhi standar. Masalahnya, keterlambatan pengembangan perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang menghambat terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Pengembangan perpustakaan sekolah dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat luas. Paling sedikit dapat dilakukan dengan penjangkaran kerja sama melalui ikatan orangtua siswa, filantropi, menjaring aktivitas wakaf buku, alumni, siswa, dan lain sebagainya. Pengembangan perpustakaan sekolah berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama pihak sekolah dengan masyarakat luas, setidaknya melakukan kerja sama seperti dalam gambar berikut ini.



Gambar 5.2
Strategi Pengembangan Perpustakaan Sekolah Berbasis Masyarakat

Gambar di atas merekomendasikan bahwa dalam pengembangan perpustakaan sekolah minimal ada jalinan kerja sama dengan masyarakat. Jalinan kerja sama ini, diarahkan untuk memperoleh peningkatan sumber daya perpustakaan berupa buku sebagai koleksi perpustakaan dan fasilitas yang berpotensi untuk mewujudkan sebuah perpustakaan sekolah yang ideal atau memenuhi standar. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan dapat diandalkan untuk meningkatkan minat baca.

1. Peranan Ikatan Orangtua Murid

Dalam pengembangan perpustakaan sekolah, pihak sekolah dapat melakukan kerja sama dengan orangtua murid, minimal, kerja sama dalam pengayaan koleksi buku perpustakaan. Orangtua murid dapat dijadikan basis penggiat untuk menambah koleksi buku dengan dua kemungkinan. Pertama, orangtua murid menjadi penyumbang buku melalui kesediaannya sendiri, artinya orangtua murid harus mengeluarkan biaya sesuai dengan kemampuannya untuk menambah koleksi buku. Kedua, orangtua murid melakukan kegiatan yang dapat mengumpulkan sejumlah bahan bacaan melalui peran serta masyarakat luas.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peranan orangtua terhadap pendidikan dan minat baca anak. Rendahnya kualitas pendidikan dan minat baca anak Indonesia salah satu faktornya juga sangat dipengaruhi oleh kecilnya peranan orangtua. Sementara pihak sekolah tidak melakukan pendekatan yang efisien terhadap orangtua. Untuk membangun perpustakaan sekolah yang berorientasi masa depan dan modern, pihak sekolah seharusnya membangun pendekatan dan kerja sama yang intensif dengan orangtua murid. Ikatan orangtua murid merupakan aset yang potensial jika pihak sekolah mampu melakukan pendekatan.

2. Mengalang Kerja Sama dengan Filantropi

Pengembangan perpustakaan sekolah juga dapat dilakukan melalui pendekatan filantropis. Pihak sekolah dapat menjalin kerja sama dengan donatur atau filantropi untuk mengembangkan perpustakaan. Filantropi dapat orang per orang, perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya. Selama ini, pihak sekolah terkesan belum banyak melakukan pendekatan kepada filantropi, karena arah pengembangan pendidikan masih dominan ditumpukan kepada anggaran yang diberikan Pemerintah. Perspektif serba-anggaran ini yang harus diubah oleh pihak sekolah dalam pengembangan sebuah institusi.

Di negara-negara maju, majunya sebuah institusi pendidikan tidak terlepas dari peranan dari filantropi ini. Misalnya, Oxford University berkembang dan maju menjadi universitas nomor satu dunia sangat dipengaruhi oleh besarnya peran serta filantropi. Oleh sebab itu, sekolah harus dipimpin dan dikelola orang-orang yang mempunyai visi yang maju dan mampu membangun strategi yang luas dalam mengembangkan sekolah yang berkualitas dan mempunyai perpustakaan yang dapat dijadikan basis peningkatan minat baca anak didik.

Dari peranan filantropi ini, perpustakaan sekolah dapat melengkapi sarana-prasarana perpustakaan sehingga perpustakaan sekolah tidak lagi menjadi gudang buku paket, tetapi menjadi taman belajar dan gedung tempat membaca yang menyenangkan bagi anak didik. Filantropi harus dijadikan *agent* penyumbang peningkatan sarana perpustakaan sekolah. Sumbangan filantropi ini dapat diarahkan untuk pengembangan koleksi buku dan sarana yang membangun perpustakaan berbasis teknologi sehingga di perpustakaan sekolah mempunyai sarana komputer, wifi, dan saran informasi teknologi komunikasi.

3. Menjaring Aktivitas Wakaf Buku

Untuk pengembangan koleksi buku perpustakaan sekolah, sudah saatnya pihak sekolah menjaring aktivitas wakaf buku. Di Indonesia, banyak penerbit yang melakukan kegiatan wakaf buku. Bahkan, para penulis dan akademisi yang menulis buku melakukan kegiatan wakaf buku. Oleh sebab itu, kegiatan wakaf buku ini harus dijangkau oleh pihak sekolah untuk menambah koleksi buku-buku perpustakaan sekolah.

Di samping itu, gerakan wakaf buku di negeri ini sudah seharusnya pula menyulurkan buku-buku wakaf tersebut untuk kepentingan perpustakaan sekolah. Sebab, perpustakaan sekolah pada umumnya di Indonesia mengalami keterbatasan koleksi buku sebagai bahan bacaan. Hal ini dapat dilihat dari koleksi buku perpustakaan yang sangat didominasi oleh buku-buku paket. Bahkan, buku paket tersebut sudah keinggalan dari edisi-edisi buku paket yang terus bergulir berubah sesuai dengan rancangan kurikulum. Oleh sebab itu, pihak sekolah harus menjaring kegiatan wakaf buku ini untuk pengembangan koleksi buku perpustakaan.

4. Peran Serta Alumni

Alumni mempunyai peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Alumni dapat dijadikan sebagai wadah yang berpotensi untuk mewujudkan perpustakaan sekolah yang maju. Pada umumnya sekolah mempunyai ikatan alumni, organisasi ini adalah aset bagi sekolah untuk mengembangkan sarana pendidikan dan perpustakaan sekolah.

Pengembangan perpustakaan sekolah sudah semestinya menjadi salah satu pusat perhatian bagi alumni. Namun, perhatian itu belum banyak menjadi fokus dari program alumni karena perpustakaan masih dianggap menjadi pelengkap dan belum dianggap sebagai sebuah institusi penting dalam pendidikan. Dalam konteks pengembangan

perpustakaan sekolah berbasis masyarakat ini, pihak sekolah sudah seharusnya merancang kerja sama dengan alumni sehingga keberadaan perpustakaan sekolah dapat diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan.

5. Peran Serta Anak Didik

Peran serta anak didik dalam pengembangan perpustakaan sekolah sangat penting. Anak didik dapat menjadi jembatan penghubung sekolah pada masyarakat untuk mendapatkan peranan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Dalam dunia pendidikan, anak didik tidak lagi dianggap sebagai objek pendidikan belaka, tetapi juga sebagai subjek dari pendidikan. Oleh sebab itu, perannya dalam pengembangan pendidikan memainkan peranan sangat penting terutama dalam pengembangan perpustakaan sekolah.

Organisasi siswa dapat menjadi penggerak pengembangan perpustakaan sekolah. Untuk itu, organisasi siswa dapat diarahkan dan bekerja sama dengan pihak pengelola sekolah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah ke arah yang lebih maju dan modern. Permasalahannya, pihak sekolah dan anak didik belum melakukan komitmen untuk mengembangkan perpustakaan sekolah karena stigma perpustakaan perpustakaan sekolah masih dianggap sebagai pelengkap saja.

F. Harapan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tidak dapat dinafikan bahwa untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sekaligus untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar, keberadaan perpustakaan yang modern dan profesional sangat memainkan peranan penting. Sebab, perpustakaan sekolah adalah *agent* pembangun minat baca sekaligus pembangun aktivitas kreatif

dari anak didik. Bahkan, menurut McClelland perpustakaan sekolah yang modern dan mempunyai fasilitas yang lengkap merupakan *virus* atau stimulus kemajuan bagi anak didik. Perpustakaan menjadi pendorong anak didik untuk maju dan mempunyai sumber daya yang berkualitas⁵.

Perpustakaan sekolah juga sebagai alternatif bagi siswa untuk mengisi waktu luang selama di sekolah. Diprediksikan perpustakaan sekolah yang profesional akan dapat mengatasi kekerasan di kalangan anak didik. Terjadinya kekerasan di kalangan siswa akhir-akhir ini salah satunya diakibatkan oleh sekolah tidak mempunyai sarana yang dapat membangun kreativitas anak didik pada waktu-waktu luang. Oleh sebab itu, perpustakaan sekolah adalah salah satu alternatif untuk membangun kreativitas anak didik ke arah yang lebih positif. Dengan adanya perpustakaan sekolah yang memadai, pihak sekolah juga dapat membuat gerakan gemar membaca, misalnya gerakan membaca 10 menit selama berada di lingkungan sekolah sehingga dengan gerakan ini anak didik secara tidak langsung akan menjadikan perpustakaan sebagai tempat kegiatan tersebut⁶.

Dengan demikian, keberadaan perpustakaan sekolah yang modern dan profesional sudah menjadi kebutuhan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Peran serta masyarakat luas

5. McClelland, menyebutkan untuk membangun masyarakat yang terbelakang perlu dilakukan penyebaran virus-virus kemajuan yang dapat membangun *need of achievement*. Pendapat McClelland ini dapat diadopsi dalam pengembangan perpustakaan ini, perpustakaan merupakan virus yang membangun kemajuan terhadap anak didik. Keberadaan perpustakaan yang lengkap merupakan stimulus atau rangsangan bagi anak didik untuk membaca dan mengembangkan dirinya agar bersumber daya yang berkualitas.
6. Jepang sebagai negara maju melakukan gerakan gemar membaca. Pemerintah Jepang melancarkan gerakan membaca 20 menit setiap hari. Jadi, minimal masyarakat Jepang menyediakan waktunya membaca selama 20 menit. Hal semakin meyakinkan kita bahwa membaca merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia.

sangat diperlukan untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Sebab dalam konteks modern, perpustakaan sekolah tidak hanya sebagai institusi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai institusi yang dapat membangun kreativitas anak didik ke arah yang lebih berguna dan bermanfaat.

1. Mengubah Stigma Gudang Buku Menjadi Menyenangkan

Keterlambatan pengelolaan perpustakaan sekolah di negara ini berdampak sangat buruk terhadap perspektif perpustakaan. Perpustakaan masih dominan dipandang sebagai gedung buku yang membosankan. *Image* ini dapat diubah dengan mengoptimalkan pengembangan perpustakaan yang berbasis masyarakat karena melalui peran serta masyarakat, perpustakaan sekolah dapat membangun koleksi buku, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang mendukung.

Pengoptimalan perpustakaan berbasis masyarakat jelas diiringi dengan pengelolaan perpustakaan sekolah yang profesional dan modern oleh pihak sekolah. Tidak optimalnya peranan perpustakaan sekolah sangat ditentukan pula oleh pengelolaan perpustakaan sekolah yang belum profesional sehingga perpustakaan sekolah tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengelolaan perpustakaan sekolah yang profesional akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat atau anak didik terhadap perpustakaan.

Perubahan stigma perpustakaan yang dipandang sebagai gudang buku yang tidak menyenangkan minimal ada dua usaha yang dilakukan oleh pihak perpustakaan sekolah. Pertama, perpustakaan dikelola secara profesional. Kedua, perpustakaan dikembangkan dengan fasilitas yang memadai. Kedua hal ini sangat diperlukan untuk pengembangan perpustakaan sekolah pada era sekarang ini karena pada umumnya

perpustakaan sekolah banyak yang tidak diurus oleh pustakawan yang profesional dan tidak mempunyai fasilitas yang lengkap.

Dalam konteks pengembangan perpustakaan sekolah berbasis masyarakat, kedua hal tersebut akan dapat mengubah stigma perpustakaan sekolah yang sudah terlanjur dipandang sebagai gudang buku oleh anak didik atau oleh pihak sekolah itu sendiri. Perpustakaan sekolah sudah harus menjadi tempat bermain dan belajar yang menyenangkan bagi anak didik sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas anak didik. Di samping itu, juga menjadi alternatif tempat mengisi kegiatan di waktu luang bagi anak didik.

2. Mengubah Sistem Tradisional ke Modernis

Salah satu faktor yang memengaruhi terlambatnya perkembangan perpustakaan, baik umum maupun sekolah di Indonesia adalah sistem pengelolaan perpustakaan yang belum berubah. Perpustakaan masih dikelola dengan serbamanual dan belum disentuh oleh teknologi. Salah satu contoh yang sangat sederhana dapat dilihat dari pangkalan data yang belum terkelola dengan baik melalui teknologi sehingga perpustakaan kesulitan memberikan informasi koleksi. Hal ini berdampak terhadap ketidaknyamanan bagi pengguna perpustakaan dan sekaligus sangat berpotensi terhadap kehilangan koleksi perpustakaan.

Di samping itu, ruang perpustakaan belum tertata dengan menyenangkan dan masih dominan sebagai susunan buku. Ruang baca perpustakaan belum mempunyai fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Tata ruang bacaan masih belum menjadi fokus perhatian untuk dibenahi oleh pengelola perpustakaan. Padahal, suasana ruang bacaan sangat memengaruhi terhadap kenyamanan bagi pihak pengguna perpustakaan. Ruang baca perpustakaan yang nyaman menjadi stimulus atau rangsangan bagi

pengunjung perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pengisi waktu luang. Selain dari itu, koleksi perpustakaan sekolah belum dilakukan pemodernisasian dan penteknologian. Koleksi perpustakaan masih berupa buku-buku dan belum banyak ditambah dengan bahan-bahan elektronik. Koleksi buku-buku tersebut juga masih didominasi oleh buku-buku ilmu ilmiah. Padahal, dalam sebuah perpustakaan seluruh bahan bacaan adalah koleksi dari perpustakaan tersebut, tidak hanya berupa buku-buku ilmiah.

Salah satu tujuan membangun perpustakaan sekolah berbasis masyarakat adalah untuk memperbaiki pengelolaan dan sarana perpustakaan tersebut. Masalahnya, jika pengelolaan perpustakaan sekolah ditumpukan pada anggaran keuangan pemerintah, untuk 20 tahun ke depan kondisi perpustakaan sekolah belum akan mengalami perubahan yang berarti. Oleh sebab itu, pengembangan perpustakaan sekolah sudah seharusnya dilakukan dengan rancangan berbasis masyarakat karena bagaimanapun juga pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Begitu pula dengan perpustakaan sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat baca yang akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.

Keterlambatan pengembangan pendidikan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh kecilnya peran serta masyarakat dalam menunjang pendidikan di samping tidak memadainya dana pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah. Dampak yang signifikan dari rendahnya anggaran pendidikan ini adalah minimnya sarana yang mendukung kualitas pendidikan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan perpustakaan di setiap institusi pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan yang berkualitas standar. Kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia yang morat-marit

masih sulit diharapkan sebagai sarana meningkatkan melek membaca siswa. Sementara di negara-negara maju dan beberapa negara tetangga sudah beralih pada melek informasi dan teknologi. Rendahnya melek membaca tersebut sebagai hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Rendahnya anggaran biaya pendidikan juga berdampak tidak baik terhadap peningkatan kualitas dan keprofesionalan guru. Anggaran pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terhambatnya kreativitas guru sehingga kecakapan dan keterampilan guru yang diharapkan sebagai peningkat kualitas pendidikan tidak dapat diandalkan. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru Indonesia yang layak mengajar untuk tingkat SD, baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91%, swasta 58,26%. Rendahnya kualitas guru ini salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan guru yang belum diperhatikan oleh Pemerintah. Pendidikan guru di Indonesia masih rendah, dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya sepertiganya atau 35% saja yang berpendidikan S1 (*www.Republika.co.id*). Sementara di Sekolah Dasar, guru berpendidikan S1 baru sekitar 10%, sedangkan menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 guru Sekolah Dasar harus S1 (*www.Kompas.com*). Oleh sebab itu, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas pendidikan guru harus menjadi salah satu komponen yang mesti diperhatikan. Untuk mencapai guru yang profesional, sangat tergantung pada kemampuan perpustakaan sekolah memfasilitasi bahan-bahan ajar yang dibutuhkan oleh guru dalam mengembangkan sumber dayanya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di era global sekarang profesionalitas dan pendidikan guru tidak dapat diabaikan karena pendidikan harus diolah dan disajikan dengan profesional sehingga

dapat menjawab tantangan zaman. Pendidikan tidak dapat disajikan dengan instanisasi atau dengan apa adanya, pendidikan harus disajikan dengan profesionalitas. Oleh sebab itu, perangkat dan atribut-atribut sarana pendidikan harus mendukung peningkatan kualitas tersebut. Tidak dapat dinafikan, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia diakibatkan oleh fasilitas pendidikan yang tidak lengkap untuk mendukung kinerja guru dalam mengembangkan bahan ajar terhadap anak didik. Satu hal lagi yang masih minim sebagai sarana penunjang kualitas pendidikan di Indonesia adalah masalah ketersediaan sarana informasi komunikasi dan teknologi (ICT) yang sangat terbatas. Sarana ICT masih dilihat sebagai sarana yang mewah dan belum dijadikan sebagai sarana penunjang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan ICT di sekolah berpengaruh sangat signifikan terhadap inovasi dan kreativitas siswa dan sekaligus dapat mengurangi angka putus sekolah. Sekolah yang mempunyai ITC di Canada mampu menekan angka putus sekolah sebanyak 4% (<http://www.e-dukasi.net/artikel.php?id=30>). Perpustakaan sekolah yang lengkap akan dapat mengatasi permasalahan ITC di dunia pendidikan.

Keberadaan perpustakaan sekolah yang profesional dan maju dengan basis masyarakat salah satunya bertujuan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh dunia pendidikan tersebut. Kualitas guru yang rendah jika ditunjang dengan perpustakaan yang memadai jelas akan mengurangi keterpurukan kualitas pendidikan. Begitu pula dengan keterbatasan ITC, jika perpustakaan sekolah mempunyai fasilitas ini, kegagalan teknologi di kalangan anak didik juga akan dapat ditanggulangi.

Perpustakaan sekolah yang lengkap juga dapat menekan mahalny biaya sekolah. Sebab, kelengkapan perpustakaan sekolah dapat menjembatani mahalny buku-buku yang diperlukan anak

didik untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini jelas mengurangi beban orangtua dalam biaya pendidikan anak-anaknya karena salah satu faktor mahal nya biaya pendidikan diakibatkan oleh biaya pembelian buku-buku tersebut sehingga biaya pendidikan yang tinggi ini yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah.

Pada 2008, dengan meningkatnya biaya hidup, sedangkan pendapatan masyarakat masih tetap, diprediksikan jumlah anak putus sekolah akan mengalami peningkatan dan mereka tidak bisa menyelesaikan kegiatan pendidikan sembilan tahun. Jika hal ini dibiarkan maka di masa yang akan datang akan muncul generasi-generasi yang mempunyai sumber daya manusia yang rendah. Di Indonesia, banyak anak yang putus sekolah akibat beban biaya pendidikan ini. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat jumlah anak putus sekolah di Indonesia mencapai 4,18 juta. Dampak yang paling signifikan dari anak-anak putus sekolah adalah rawannya mereka dieksplotasi dan diperdagangkan. Keadaan ini bisa dilihat dari jumlah pekerja anak yang selalu meningkat di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian ILO bahwa sebanyak 19% anak di bawah usia 15 tahun yang tidak bersekolah telah memasuki berbagai dunia kerja. Di samping itu, tidak dapat dinafikan pula, mereka terjebak dalam praktik-praktik perdagangan manusia untuk berbagai kepentingan. Menurut Aris Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komnas Anak, sekitar 200 sampai 300 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia yang putus sekolah telah diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan industri seks. Berdasarkan kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian RI, tercatat angka perdagangan anak di Indonesia antara tahun 1999 sampai 2000 sebagai berikut.

Tabel 5.4
Perdagangan Anak Perempuan dari Beberapa Kota

Kota	Tahun	
	1999	2000
Jakarta	130	126
Medan	286	282
Bandung	161	157
Padang	151	147
Surabaya	313	309
Bali	133	129
Ujung Pandang	155	151
Manado	179	175
Jumlah	1.712	1.683

Sumber Menag PP, Juni 2002 dan Wini Tamitri (2004)

Sebuah risiko yang sangat fenomenologis, jika dunia pendidikan tidak diberi keringanan dengan melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah. Peranan perpustakaan sekolah yang berbasis masyarakat salah satunya untuk meredam tingginya angka putus sekolah ini. Anak didik yang tidak dapat membeli buku dapat mengaksesnya di perpustakaan sekolah sehingga beban keuangan untuk membeli buku dapat dihindari.

Keberadaan perpustakaan sekolah yang memadai, juga dapat membantu terhadap terlaksananya pencapaian dari kurikulum pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan tidak dapat dipandang remeh temeh dalam mentransformasi manusia Indonesia. Kurikulum merupakan kompas yang membimbing ke arah mana pendidikan ini dibawa. Kurikulum pula yang mengeset sejauhmana sumber daya manusia berubah dari ketidakberdayaan menjadi berdaya,

dari tidak berkualitas menjadi berkualitas, dari terbelakang menjadi maju, dari bermental keropos menjadi bermental kuat, dari dehumanis menjadi humanis, dari ranah miskin menjadi ranah berkesejahteraan dan seterusnya. Pendidikan merupakan *alat* yang membebaskan keterbelakangan dan ketidakberdayaan dalam peradaban.

Dengan demikian, tidak dapat dinafikan, bahwa pendidikan sebagai *soko guru* dalam mewujudkan peradaban manusia. Bahkan, menjadi faktor penting dalam membangun *civil society* yang tengah direkonstruksi masyarakat dunia sekarang. Hal ini pun telah diyakinkan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqadimmah* yang monumental. Pendidikan adalah sarana yang membebaskan keterbelengguan peradaban dari keterbelakangan dan ketidakadilan. Pendidikan mempunyai dominasi yang mencerahkan. Tujuan kurikulum yang demikian itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ditopang atau didukung oleh kelengkapan sarana bacaan yang ada di sekolah.

Untuk menyelamatkan pendidikan anak bangsa dan dalam kerangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mempunyai daya saing maka perlu digagas pendidikan berbasis partisipasi. Salah satu yang perlu digagas dengan program pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan perpustakaan sekolah. Masalahnya, keterbatasan anggaran pendidikan dan semakin melebarnya angka kemiskinan mengharuskan pengelolaan dunia pendidikan harus dilakukan dengan terobosan dan strategisasi yang cerdas sehingga pendidikan anak bangsa tetap berjalan dengan maksimal.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga dapat menumbuhkembangkan sarana-sarana yang dapat menunjang

pendidikan. Dalam konteks sekarang ini, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangat luas karena dunia pendidikan di Indonesia sedang menjadi pesakitan. Minimal masyarakat dapat membantu meningkatkan minat baca siswa melalui pengembangan perpustakaan sekolah. Sebab, minat baca siswa di Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara tetangga. Rendahnya minat baca ternyata berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

Minat baca yang rendah sebagai akibat dari perpustakaan sebagai sarana utama yang mendukung anak didik untuk membaca jumlahnya ternyata sangat memprihatinkan dan ada sekolah belum mempunyai perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekolah masih banyak menjadi gudang penyimpanan buku paket dan sangat sedikit perpustakaan sekolah yang memenuhi kriteria standar. Hal ini terlihat dari koleksi buku, fasilitas, dan pengelolaan perpustakaan sekolah yang masih terbatas dan belum profesional. Perpustakaan sekolah yang belum profesional ini, secara langsung ikut memperlambat peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan sekolah ini, pihak sekolah dapat membuat strategi dan program yang cerdas sehingga pengembangan perpustakaan tidak hanya ditumpukan pada anggaran biaya yang dialokasikan oleh Pemerintah. Salah satu program yang dapat dirancang adalah mengembangkan perpustakaan sekolah berbasis masyarakat.

Pengembangan perpustakaan sekolah berbasis masyarakat bertujuan menjaring kerja sama dengan masyarakat luas untuk membangun perpustakaan sekolah yang dapat dijadikan sebagai sarana yang memainkan peranan penting dalam peningkatan minat baca. Keberhasilan perpustakaan sekolah meningkatkan minat baca secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Oleh sebab

itu, keberadaan perpustakaan sekolah yang memenuhi standar dan yang berorientasi modern dalam era globalisasi sekarang ini sudah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, peran masyarakat luas perlu dijangkau untuk mewujudkan perpustakaan sekolah yang modern dan memenuhi standarisasi tersebut.

Perpustakaan sekolah yang memenuhi standarisasi dan mempunyai fasilitas yang lengkap, selain dapat meningkatkan minat baca juga dapat dijadikan sebagai penopang terhadap keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Bahkan, dapat mengatasi angka anak putus sekolah. Oleh sebab itu, perpustakaan yang dibenahi secara maksimal tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya minat baca, tetapi juga berpengaruh terhadap maksimalisasi proses belajar mengajar.

BAB VI

OTONOMI DAERAH & PENDIDIKAN



A. Kebijakan Pendidikan di Otonomi Daerah

Suatu hal yang paling terasa diperlukan dalam otonomi daerah sekarang ini adalah kebutuhan terhadap pendidikan karakter untuk membangun manusia sebagai makhluk yang manusiawi dan berkeadaban. Melihat realitas karakteristik kebangsaan akhir-akhir ini, mengisyaratkan luka dalam terhadap kegagalan dunia pendidikan dalam membangun keadaban anak bangsa. Beberapa indikator yang kuat menunjukkan kegagalan itu, dapat diungkap dengan gamblang di antaranya sebagai berikut. Pertama, terjadinya kemerosotan moralitas dalam berbagai lini dalam tubuh pelaksana pemerintahan sehingga mengendemi dan mewabah krisis moralitas yang merugikan terhadap kemajuan bangsa. Kedua, kemerosotan rasa kebangsaan dan nasionalisme sehingga semangat patriotik dalam membangun bangsa sudah terbelah bahkan negara menjadi proyek bagi-bagi kekuasaan. Ketiga, melunturnya rasa kemanusiaan, hingga anarkisme, pembunuhan, dan petkelahian antar-eris serta kelompok menjadi hal yang sering terjadi. Keempat, mengesilnya semangat solidaritas sehingga rasa saling membantu dan saling menolong tidak lagi menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kelima, tercerabutnya rasa tanggung jawab dan percaya diri sehingga orang-orang Indonesia tidak lagi sebagai manusia yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan, cenderung massif, dan naif menghadapi realitas.

Sesungguhnya, realitas terjadi tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan yang dilaksanakan di negeri ini. Semenjak sistem pendidikan berada dalam dua kepentingan, kepentingan logis dan ilmiah (positivis) yang mengejar kecerdasan dan kecerdasan itu sebagai hal yang mutlak dalam membangun kebangsaan maka pendidikan yang berfiliasi pada kecerdasan emosional dan membangun akhlak manusia terabaikan. Bahkan, kurang dianggap penting sehingga pendidikan

pembentuk karakteristik dan watak manusia tertinggal. Akhirnya, di negara ini tidak tercerus kurikulum pendidikan moral yang kuat dan tidak jelas landasannya.

Dengan kondisi kebangsaan yang mencoreng nilai keadaban sekarang ini, kita yakin bahwa realitas yang tidak menguntungkan tersebut sebagai salah satu akibat dari tercerabutnya pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan Indonesia. Akhirnya, karakteristik kebangsaan negeri ini tercabik-cabik oleh kelolaan-kelolaan yang sangat bertawanan dengan tujuan pendidikan tersebut. Dalam konteks inilah, harus diyakini bahwa pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tersebut.

Sudah saatnya diagendakan kembali pendidikan akhlak dengan kurikulum yang jelas. Salah satunya disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Sebab dalam catatan sejarah, kearifan lokal tersebut telah berhasil membangun moralitas anak bangsa dan karakteristik kebangsaan, seperti halnya dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filsafat pendidikan *tut wuri handayani*. Bab ini berupaya menjelaskan perlunya kembali membangun pendidikan akhlak di negeri ini dengan menyusun kurikulum-kurikulum yang berbasis pada kearifan lokal.

Pada 29–30 Maret 2010 di Yogyakarta berlangsung *annual meeting* Penyelenggaraan Pendidikan Kegamaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Agama dan Kegamaan Departemen Kementerian Agama, diikuti oleh seluruh penyelenggara pendidikan dari masing-masing agama yang ada Indonesia. Terungkap dari seluruh pimpinan pendidikan dari berbagai agama itu bahwa kondisi kebangsaan seperti sekarang ini diakibatkan oleh terabaikannya pendidikan akhlak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kelompok ini masih sangat

yakin bahwa pendidikan akhlak adalah satu pendidikan yang harus dilaksanakan dan tidak dapat dipisahkan dari anak didik.

Alasan ini cukup kuat jika dilihat dari alur sejarah moralitas filsafat Yunani yang menekankan sesungguhnya pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya sehingga tidak bisa mendidik manusia dengan parsial, tetapi harus dengan holistik (Hanani, 2004). Pendidikan moral tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Keterpisahan pendidikan moral yang kita sebut sebagai pendidikan "akhlakul karimah" menjadikan anak didik sebagai manusia yang terasing dari dunia sosialnya. Oleh sebab itu, Aristoteles, Freud, sampai pada Khaldun meletakkan *akhlakul kharimah* sebagai fondasi pembangun manusia untuk berelasi sosial yang baik dengan manusia, negara, pemerintah, dan sesamanya sehingga untuk menjaga kesetuhan manusia pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai objek dan subjek pendidikan (Calne, 2005).

Dalam hal yang sama, Ivan Illich (1969) juga menyatakan bahwa yang dikatakan pendidikan tidak hanya bergerak dan memberikan akses pada kecerdasan yang memicu lahirnya *skill*, tetapi lebih penting dari itu adalah tugas dunia pendidikan memberikan pencerah untuk mewujudkan keseimbangan-keseimbangan eksistensi manusia. Sebab, manusia tanpa bimbingan moralitas tidak akan ada makna kehidupan yang bertanggung jawab, keberanian, kejujuran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Illich menegaskan perlu dibangun pendidikan kemanusiaan yang melahirkan manusia dalam keberadaban.

Sementara Mohandes K. Gandhi meletakkan pendidikan moral menjadi bagian terpenting dalam rancang bangunan pendidikan multikultural (Wasim dkk, 2004). Jika pendidikan moral atau akhlak, telah teraktualisasi dan telah terinternalisasi maka multikultural tidak akan menjadi bumerang dalam masyarakat dunia. Perbedaan

akan menjadi bermanfaat, jika pendidikan moral atau akhlak telah menuangkan kesejatan prinsip toleransi. Manusia, etnis, dan bangsa tidak akan berani melakukan pembunuhan, anarkis, penipuan, korupsi, dan pemusnahan terhadap yang di luarnya.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah pendidikan *akhlakul kharimah* yang mengajarkan moralitas pada manusia harus dibangun dengan pendekatan-pendekatan yang humanis serta bagaimana pelaksanaannya. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan akhlak harus dilaksanakan di sekolah, seperti mata pelajaran yang lain ia juga harus memiliki kurikulum dan memiliki cara pengajaran yang dibangun dengan strategi-strategi dan tidak hanya dengan formalistik saja. Masalahnya, pendidikan akhlak, tujuannya adalah melakukan transformasi dan perubahan perilaku serta membangun karakteristik individual yang sesuai dengan norma-norma. Artinya, membangun kehidupan manusia bernormatif. Dalam Islam, misi dari Nabi dan Rasul terkait dengan pembangunan manusia bernormatif ini. Begitu juga dalam agama-agama lain, hadirnya pimpinan-pimpinan agama untuk membangun manusia bernormatif tersebut.

Ketika norma terpinggirkan dan terjauhkan atau tidak lagi ditransmisikan, manusia berpotensi untuk keluar dari norma itu. Sama halnya, ketika pendidikan tidak lagi menganggap pendidikan akhlak sebagai bagian dari pendidikan yang terjadi adalah kebangkrutan etika dan moral dalam ranah pembangunan bangsa. Akhirnya, karakteristik *building* Indonesia menuai masa suram. Indonesia di-*list* sebagai salah satu negara terkorup. Jika dilihat dari ikatan keberagamaan negara yang menekankan umatnya beragama, namun nilai-nilai normatif yang ada dalam agama itu tidak ditransmisikan dan diajarkan. Dengan demikian, terjadilah apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam *The End of Ideology* tercabik-

cabiknya peradaban ke dalam tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Hanani, 2009).

Sumber dari pendidikan *akhlakul kharimah* tidak saja berasal dari nilai-nilai luhur agama, tetapi juga dibangun melalui kearifan-kearifan lokal. Jika ditinjau dari falsafah pendidikan Indonesia yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara, *tut wuri handayani* merupakan falsafah bijak dari pendidikan yang dielaborasi dari kearifan lokal, jiwa, dan semangat bangsa Indonesia. Kearifan-kearifan lokal ini tidak sekadar simbol yang meneguhkan identitas satu komunitas, etnis, atau kelompok suku bangsa saja, tetapi menjadi *world view* yang meletakkan nilai-nilai dasar dalam satu komunitas atau masyarakat. Catatan sejarah perjuangan Gandhi misalnya di India, ia dibangun dari nilai luhur yang ada dalam masyarakat lokal India. Dielaborasi dari nilai-nilai lokal yang kemudian menjadi titik sentral yang menyemangati moralitas masyarakat India. Begitu juga dengan Pancasila di Indonesia, ia hasil dari kompleksitas atau holistik jiwa lokal Indonesia yang mampu memberikan semangat terhadap bangsa Indonesia.

Saat sekarang bagi kaum postmodernisme, makna kearifan lokal ini menjadi salah satu sudut perhatian untuk dirujuk kembali karena ketidakberhasilan kaum modernisme membangun peradaban manusia ternyata diakibatkan oleh antinya kaum modernis terhadap kearifan lokal. Oleh sebab itu, kaum postmodernis meyakini pada masyarakat dunia untuk kembali memerhatikan kearifan lokal dalam membangun dimensi kehidupan manusia.

Berdasarkan itu pula maka pendidikan akhlak perlu dilakukan dengan pemerhatian, pendekatan, paradigma berdasarkan kearifan lokal tersebut, seperti halnya Ki Hajar Dewantara membangun filsafat pendidikan di Indonesia berlandaskan pada kearifan lokal. Pendidikan akhlak sangat perlu diajarkan dan harus dijabarkan berlandaskan

dengan landasan yang jelas, tidak hanya diajarkan dalam hafalan-hafalan, tetapi mampu memberikan *building* karakteristik manusia. Salah satu yang harus dirancang adalah bangun kurikulum akhlak tersebut dengan pendekatan-pendekatan normatif yang telah menjadi *world view*, di antaranya melalui penyusunan kurikulum akhlak berbasis kearifan lokal.

Salah satu faktor gagalnya proyek modernisasi dalam membangun peradaban manusia adalah karena terpinggirkannya pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk yang humanis dan berjiwa sehingga pembangunan terhadap manusia lebih banyak dilokasikan pada aspek-aspek di luar itu. Ketika pembangun tidak memerhatikan dimensi manusia seperti itu, modernisasi lebih bersifat anti terhadap kearifan lokal dan mengabaikannya sebagai sesuatu yang dapat membangun kemanusiaan. Oleh sebab itu, penyusunan pendidikan akhlak berbasis kearifan lokal adalah hal yang perlu apalagi di Indonesia yang memiliki beribu-ribu etnis dan budaya.

1. Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Pada saat sekarang, negara-negara di belahan dunia meyakini kembali bahwa pendidikan akhlak-moral sangat penting dalam membangun keselamatan anak manusia, bangsa, negara, dan dunia. Di Swedia misalnya, sebagai negara yang dinobatkan memiliki kualitas terbaik di dunia, menghadirkan pendidikan moral dalam sistem pendidikannya karena meyakini bahwa pembentukan manusia harus seimbang antara lahir dan batinnya.

Di Indonesia, sebagai negara multikultural, pendidikan akhlak juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak didik. Tidak dapat dimungkiri terjadinya perilaku kebangsaan yang berbanding terbalik

dengan tujuan pendidikan seperti sekarang ini adalah akibat dari keteledoran dan ketidaktepatan pengajaran yang bersifat transmisi nilai dan moral serta pengajaran akhlak yang tidak diajarkan. Jika ada, diajarkan dengan hafalan-hafalan dan tidak dengan adanya suatu kejelasan yang kuat. Padahal, pendidikan akhlak itu harus jelas sekali bersentuhan untuk membentuk perilaku manusia, membentuk karakteristik manusia.

Berhasil atau tidaknya pendidikan akhlak membangun perilaku atau unsur-unsur "dalam" dari manusia, sangat tergantung pada pendekatan dari pendidikan akhlak itu sendiri. Pendekatan ini berkaitan dengan penyusunan kurikulum dan strategi pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Pengajaran akhlak tidak cukup dilakukan dengan menghafal tanpa interpretasi, tanpa memberikan kekayaan batin pada anak diri, tanpa memberikan perubahan perilaku, tanpa memberikan motivasi dan dorongan berkepribadian yang kuat. Pendidikan akhlak tidak hanya menyentuh pada ranah logika saja, tetapi lebih dominan menyentuh ranah kemanusiaan, batin, kalbu, jiwa, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak dalam konteks ini adalah pendidikan yang bersifat filosofis dan transformatif terhadap diri anak didik. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membangun karakteristik manusia Indonesia.

Pentingnya pendidikan akhlak berkaitan dengan pembangunan manusia seutuhnya harus secara holistik sehingga dapat mencapai keseimbangan seluruh dimensi kehidupannya. Keseimbangan ini kata Parsons (1969) adalah yang melahirkan pada keteraturan sosial, politik, demokrasi, ekonomi, dan hubungannya dengan supranatural (Tuhan). Sementara Koentjaraningrat (2000), melihat pentingnya keseimbangan itu karena secara manusiawi, manusia tidak bisa lepas dari tiga dimensi yang saling berkaitan. Jika salah satu dimensinya tidak seimbang itu disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang ada dalam

pembangunan diri manusia. Ketidakseimbangan dalam satu dimensi akan menyebabkan, adanya fakta dan fenomena yang *disorder* karena muncul dari sikap yang bertentangan.

Mencermati kasus-kasus di Indonesia yang menyebabkan tatanan sosial masyarakat mengalami *disorder*, tidak dapat dinafikan bahwa akibat dari hilangnya peran keseimbangan dari manusia. Hal ini dapat dilihat satu per satu dengan berbagai indikator sebagai berikut.

a. Kerapuhan mentalitas

Kerapuhan mentalitas dapat dilihat dari berbagai indikator. Pertama, dari kasus korupsi, bunuh diri, penyelesaian masalah dengan kekerasan, dan sebagainya. Padahal, negara ini selalu mendengungkan mentalitas yang bersih, kuat, dan bertanggung jawab. Tapi kenyataannya, adalah negara yang tidak membolehkan orang yang tidak beragama hidup di ranah ini diliputi oleh perilaku yang terbalik dengan ajaran agama ini. Kerapuhan mentalitas tidak hanya terjadi dari kalangan tertentu, tetapi merenggut semua kalangan. Korupsi misalnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang diadakan setiap tahun oleh *Transparency International* pada 2009 dengan skor 2,8 merupakan negara yang tingkat korupsinya sangat parah untuk kawasan ASEAN. Kemudian, hasil survei yang dilakukan oleh *Political dan Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) pada tahun yang sama untuk 16 negara yang disurvei, skor Indonesia 9,27, lebih buruk dari Kamboja (9,10), Vietnam (8,07), Filipina (8,06), Thailand (7,60), Malaysia (6,47), dan Singapura (1,42).

Kasus bunuh diri misalnya, pada 2009 terdapat kasus-kasus bunuh diri dengan tren di mal. Pada 2009, menurut laporan hasil survei beberapa stasiun televisi, angka bunuh diri di mal menjadi satu tren dan jumlahnya meningkat dengan signifikan. Angka bunuh diri ini salah satunya diakibatkan oleh frustrasi sosial, dimana orang tidak

mempunyai manajemen yang tangguh dalam menghadapi realitas kehidupan sehingga dengan mudah memilih mengakhiri hidup dengan tidak wajar. Tren selanjutnya adalah penyelesaian masalah sering diambil dengan cara kekerasan, cara tidak wajar, dan tidak manusiawi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi antara kelompok, antar-etnik dan antara kampung, dimana masyarakat mudah membunuh, melukai, dan mencederai sesamanya. Mungkin masih segar dalam ingaran kita sebuah tragedi Tanjung Priok, betapa naifnya mentalitas masyarakat dalam menyelesaikan persoalan.

b. Rendahnya tingkat tanggung jawab

Kesadaran-kesadaran manusia semakin terlihat terkontaminasi oleh berbagai *hedonisme*. Ketika kontaminasi menyelundup pada kesadaran manusia, manusia Indonesia sedang menghadapi kerapuhan mentalitas. Dampaknya adalah semakin jauhnya rasa tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Rendahnya tanggung jawab ini, telah meluluhlantakkan sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan pemerintahan Indonesia. Di samping itu, semakin cenderungnya manusia melakukan sistem transaksional dalam berbagai jabatan dan kedudukan strategis. Transaksional ternyata lebih mementingkan kelompok daripada tanggung jawab peran dan fungsi sehingga yang terjadi adalah rendahnya rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut.

Perebutan kekuasaan bergelinding dengan berbagai cara dan berbagai kemungkinan. Tetapi, setelah pemenang menjurainya yang terjadi adalah kelemahan tanggung jawab akibat transaksional yang dilakukan dalam mendapatkan jabatan strategis tersebut. Kerdahan tanggung jawab menggelinding dalam berbagai lini sehingga tidak ayal, hal ini juga disebut-sebut sebagai sarana yang memperbesar jalannya korupsi di Indonesia.

c. Hilangnya semangat kebersamaan

Bangsa ini sedang kehilangan semangat ketangguhan yang ditandai oleh terciptak-cabiknya semangat kesatuan. Semangat kesatuan yang hilang ini tidak saja berada pada level individual, masyarakat, bahkan juga dalam level daerah. Egosentrisme telah membuat ketangguhan itu terbelah sehingga arah tujuan mengalami *split personality*. Misalnya, dalam tingkat daerah terjadi kecenderungan pemisahan-pemisahan, sekalipun pemisahan itu tendensinya ekonomi dan politik. Pada level individual dan masyarakat terlihat dari cara mempresentasikan berbagai hal dalam semangat komunitas dan memperlihatkan egosentral “kami” dan *the other*.

Negara sedang mengalami penipisan pengamalan norma lokal *bhinneka tunggal ika* sehingga representasi-representasi egosentral mengupung ke permukaan dengan beragam implikasinya, adakalanya juga melalui kekerasan dan anarkisme. Budaya massif menjadi tidak terelakkan dan bahkan menjadi bagian yang senang dilakukan oleh sekelompok orang.

d. Kecenderungan perilaku kriminal

Satu hal lagi yang sangat rentan dalam ranah sosial Indonesia adalah kecenderungan terjadi perilaku kriminal. Orang mudah membunuh saudaranya, anaknya, ibunya, atau bapaknya secara sadis. Bahkan dengan memutilasi, kemudian membuangnya dengan begitu saja. Di samping mudahnya melakukan perampokan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya.

Dalam kasus-kasus ini secara nyata dapat ditangkap, betapa melemahnya peranan norma, peranan ajaran agama, dan ajaran-ajaran yang mengajarkan keseimbangan lainnya dalam ranah kehidupan manusia. Di negara ini sangat lekat dengan ajaran-ajaran itu, tetapi mengapa ajaran tersebut tidak melekat pada ruang kehidupan manusia

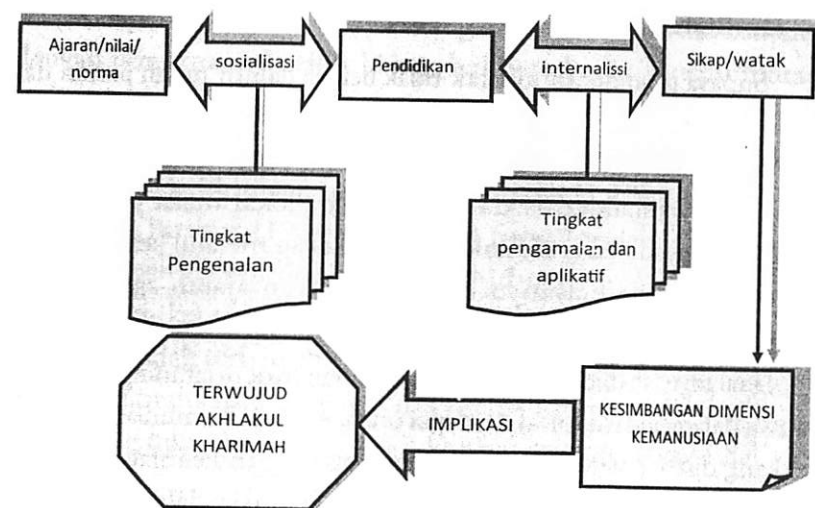
sehingga paradoks-paradoks dari kehidupan itu dengan mudah dilakukan oleh manusia.

e. Berkembangnya semangat fatalis

Seiring dengan begitu kompleksnya persoalan luntturnya dimensi ajaran dan moral dalam pengamalan hidup manusia, ternyata satu hal lagi yang sangat menyudutkan pentas kehidupan di negara ini adalah berjangkitnya sikap fatalis. Hal ini dapat dilihat dengan ruang gerak teroris di Indonesia. Semangat rela mati dengan iming-iming mendapatkan surga setelah membunuh dengan megebom sasaran kehidupan manusia. Doktrinasi fatalis ini menjadikan mereka rela mati dan membunuh serta memperkuat jaringan-jaringan yang mencari sasaran-sasaran pembunuhan.

Kesuksesan dalam sasaran pembunuhan menjadi bagian yang tak terkira bagi mereka yang fatalis ini. Misinya adalah mati dalam jihad yang dipresepkan menurut kelompoknya. Semangat fatalis mereka berkembang, hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya jumlah pengikutnya, sekalipun diburu oleh kekuatan negara.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari apa yang dikemukakan ini adalah apakah semuanya terjadi akibat dari ketiadaan ajaran moral di Indonesia? Jawabannya tidak. Ajaran moral begitu banyak bahkan selalu disosialisasikan, tetapi tidak terinternalisasi dalam diri manusia. Untuk internalisasi tersebut diperlukan pendidikan akhlak, pendidikan yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan ajaran normatif ke dalam dimensi kehidupan anak didik. Internalisasi tersebut yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap, watak, tanggung jawab, dan mentalitas manusia. Peranan pendidikan akhlak dalam proses itu semua dapat dilihat dari bagan di bawah ini.



Gambar 6.1
Alur Pendidikan Akhlak dan Implikasinya

Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak tidak memiliki tingkat pengajaran yang sama dengan bidang studi yang lain. Sebab, pendidikan akhlak lebih menyentuh pada aspek psikologis sehingga ia tidak dapat diajarkan dengan memperkenalkan, tetapi harus mementingkan tingkat pemahaman yang berkaitan dengan sikap, bukan berada dalam tahap kecerdasan inteligensia, melainkan lebih dominan pada kecerdasan "batin" yang akan melahirkan sikap-sikap sesuai dengan tuntunan sumber dari akhlak tersebut. Berdasarkan ini pula, dapat dikatakan bahwa pendidikan akhlak penting diajarkan. Namun, untuk lebih mencapai sasaran maka pendidikan akhlak harus diajarkan dengan pendekatan-pendekatan berbagai sumber ajaran serta diajarkan dengan penyusunan strategi dan profesionalisasi sehingga pendidikan akhlak tidak berada dalam kancah tahap sosialisasi ajaran, tetapi harus berada dan mampu pada tahap internalisasi.

2. Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Supaya pendidikan akhlak tidak berada dalam ranah profan dan dapat mencapai sasaran tujuannya maka sangat diperlukan penyusunan kurikulum dari pendidikan akhlak itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara multietnis dan multibudaya lokal maka penyusunan kurikulum pendidikan akhlak dapat dilakukan melalui kearifan lokal. Kearifan lokal ini biasanya bersinergi dengan ajaran-ajaran agama masyarakat setempat.

Hal ini telah dijelaskan oleh Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2000), bahwa dalam budaya lokal terdapat orientasi nilai. Kemudian, orientasi ini yang disebut oleh kaum postmodernis dengan kearifan lokal. Ada lima masalah dasar yang dihadapi oleh manusia dalam hidup ini, masalah itu ada pembahasan tawaran dalam orientasi nilai budaya. Selanjutnya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6.1
Masalah Dasar Hidup Manusia dan Orientasi Nilai Budaya

Masalah Dasar Dalam Hidup Manusia	Orientasi Nilai-Budaya		
Hakikat Hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk menjadi wajib berikhtiar supaya hidup menjadi baik
Hakikat Karya	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu	Orientasi ke masa depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam	Manusia tunduk kepada alam dahsyat	Manusia berusaha menjaga kelestarian hubungannya dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan pada sesamanya	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan pada tokoh-tokoh atas	Individualisme nilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

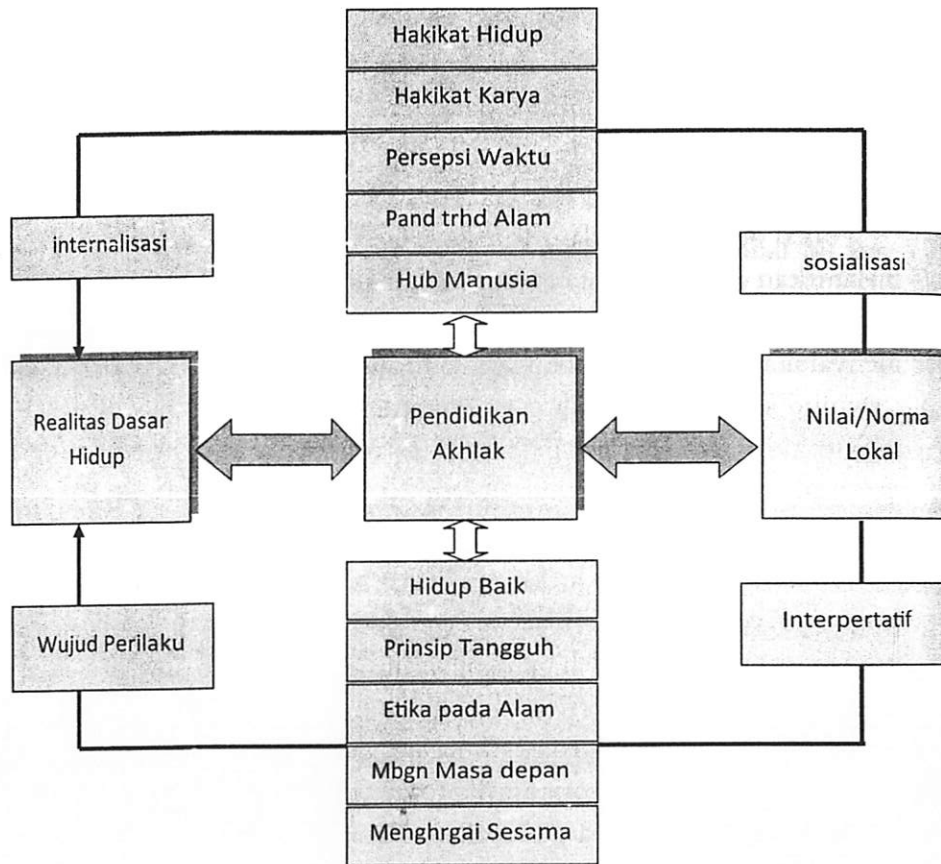
Akhlak sebenarnya berkaitan dengan lima hal dasar itu, berkaitan dengan pemaknaan hakikat hidup, hakikat karya, persepsi tentang waktu, terhadap alam, dan hubungan manusia dengan sesama. Kelima hal dasar itu akan dibangun dan dibentuk sesuai dengan tujuan dasar kehidupan, tujuan dasar manusia dalam membangun peradaban. Parsons (1968) dalam teori fungsionalnya menyebutkan keseimbangan dalam lima masalah kehidupan manusia yang dapat membangun keteraturan sosial. Sementara budaya sebagai produk lokal yang sudah terbangun dan eksis dalam satu komunitas atau etnis, selalu mengarahkan, menuntun, dan membimbing pada pemiliknya. Inilah yang dikatakan *value* (nilai) konsep tentang sesuatu hal yang diinginkan.

Nilai adalah ajaran dan norma yang harus ditafsirkan sehingga melahirkan satu perilaku atau tindakan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai. Parsons seorang perekonstruksi teori struktural fungsional menyatakan bahwa keseimbangan, keteraturan, atau kestabilan akan terwujud apabila ada penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu tidak terkesampingkan karena nilai tersebut menjadi *world view* dan telah disepakati sejak lama. Nilai-nilai tidak pernah memberikan pertentangan, tetapi lebih dominan membangun keadaban.

Matrik budaya dari Kluckhohn di atas, secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, berkaitan erat dengan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan moral seperti sekarang ini. Dari kelima masalah itu, semuanya mengalami degradasi di negara kita, karena nilai-nilai yang membangunnya tidak tersosialisasikan dan terinternalisasikan. Di sini pula ada keyakinan bahwa pendidikan akhlak harus dilakukan salah satunya melalui pendekatan kerarifan lokal, seperti dalam rekonstruksi Kluckhohn di atas. Koentjaraningrat (2000) menjadikan hal ini sebagai

dasar dan landasan mentalitas pembangunan di Indonesia pada masa lalu. Namun, hal itu terputus oleh rebutan sejarah pembangunan Indonesia yang lebih mendewakan pembangunan modernisasi sehingga kearifan lokal terbiarkan dalam ketidakbermaknaan.

Esensi kearifan lokal dalam membentuk akhlak, berdasarkan matrik Kluckhohn dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 6.2
Pendidikan Akhlak dan Pendekatan Nilai Lokal

Untuk menjaga keseimbangan hidup manusia, pada dasarnya kelima hal tersebut harus terinternalisasi dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.

a. Hakikat hidup

Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang membangun misi manusia terhadap hakikat hidup. Hakikat hidup meliputi ajaran moral yang dibangun dari norma, baik-buruk, wajar-tidak wajar, dan sebagainya. Hakikat hidup merupakan pengenalan individu atau seseorang terhadap dimensi kehidupan, perilaku, dan kedirian sehingga dengan pengenalan dimensi-dimensi tersebut seseorang dapat membangun perilaku sesuai dengan norma dan tuntutan-tuntutan rasa kemanusiaan yang dibangun.

Teratur atau tidaknya suatu masyarakat atau komunitas sangat tergantung pada kemampuan komunitas tersebut menginternalisasikan hakikat hidup dalam komunitas. Penginternalisasian hakikat hidup, satu-satunya cara adalah dilakukan melalui pendidikan. Hakikat hidup meliputi dasar kemanusiaan. Di dalamnya, tersimpul makna-makna yang sangat terkait dengan penekanan harmonisasi hidup.

Mengapa orang berani melakukan di luar kaidah norma, melanggar hukum, melanggar tata krama, membunuh, korupsi dan sebagainya, karena lemahnya pemancangan atau penginternalisasian hakikat hidup. Hidup dipandang dengan satu sisi, sisi hedonisme sedangkan sisi normatif yang lebih esensial, dimana manusia harus menghargai hak orang lain, menghargai kehidupan bersama dan sebagainya tercampak sehingga manusia lebih mudah melakukan di luar kenormatifan itu. Sesungguhnya, pendidikan akhlak itu penting dan sangat penting, semaju dan semodern apa pun negara dan dunia pendidikan, pendidikan akhlak harus selalu ada dalam setiap jangkauan generasi. Keterputusan pendidikan akhlak dan keterpisahan pendidikan

akhlak dalam generasi maka yang terjadi adalah pemunduran keadaban sebuah bangsa. Bayangkan, Indonesia yang sudah berumur lebih dari 60 tahun dan berpenduduk 240 juta jiwa dengan sumber daya alam yang melimpah ruah dan memiliki berbagai budaya serta beragam aturan dan norma yang baik, tetapi mengapa sampai hari ini bangsa ini tercabik dalam krisis yang multidimensi. Tercabik ketika dunia pendidikan memasuki sistem dan era modernisasi. Jawaban singkatnya adalah sebagai salah satu akibat keterpisahan internalisasi hakikat hidup dalam diri manusia Indonesia.

Dalam setiap budaya lokal mana pun di Indonesia, pasti memiliki ajaran tentang hakikat diri. Cerita-cerita rakyat, seni-seni rakyat, legenda-legenda lokal, misalnya sebagai bukti dari produk lokal yang memberikan pelajaran terhadap hakikat hidup. Akan tetapi, dalam lintasan perjalanan waktu dan zaman produk lokal yang memiliki kearifan itu tidak dikomunikasikan dan disosialisasikan sehingga makna dan kearifan-kearifan yang melekat pada kultur lokal tersebut tidak terinternalisasi pada generasi selanjutnya sehingga *world view* budaya tersebut hanya tinggal dalam kenangan.

Misalnya saja Pancasila sebagai produk lokal Indonesia. Paling esensial dari Pancasila adalah membangun rasa kemanusiaan dalam lintas individu, masyarakat, bangsa, dan bernegara yang tidak dapat ditolak dan dimungkiri oleh manusia Indonesia. Pancasila memiliki dimensi moral yang sangat kompleks, tetapi dalam lintas waktu ia sempat diperkenalkan hanya pada tahap sosialisasi dan tidak sampai pada tahap internalisasi sehingga ajaran-ajaran moral tidak menjadi satu kesatuan dalam diri individu bangsa Indonesia.

Jadi, melihat realitas sosial Indonesia yang mengambang saat ini dan berada dalam krisis multidimensi adalah salah satunya diakibatkan oleh rendahnya persepsi manusia terhadap hakikat hidup itu sendiri.

Rendahnya internalisasi makna hidup menjadikan dimensi kehidupan lebih dominan terjaring dalam kancah hedonisme, yang sangat mementingkan kepentingan individu, kelompok, dan sangat tidak menghargai makna dimensi kehidupan orang lain.

Pembelajaran hakikat hidup dan ajaran yang disusun untuk menjelaskan dan menginternalisasikan hakikat hidup tidak perlu meminjam konsep modern dari luar, cukup diambil dari produk lokal dan sistem pengajaran lokal. Hal ini terkait dengan pembentukan moral sangat tergantung dengan nilai-nilai yang dekat dengan seseorang. Oleh sebab itu, kearifan lokal sebagai salah satu yang harus dicerna dalam pengajaran akhlak di sekolah-sekolah. Pengajaran akhlak harus mengusung nilai-nilai lokal bukan secara tekstual, melainkan pula dengan kontekstual.

b. Hakikat karya

Selain rendahnya internalisasi pendidikan terhadap hakikat hidup, kenyataannya juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kekurangan pengajaran yang kuat tentang hakikat karya. Persepsi yang dikembangkan juga sangat dangkal, misalnya saja dalam masyarakat berkembang bahwa sekolah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga ketika tamat sekolah dan perguruan tinggi tidak tertampung menjadi PNS yang terjadi adalah pembeludakan pengangguran. Oleh sebab itu, setiap tahunnya tidak kurang pengangguran di Indonesia berkisar antara 9–10 juta.

Di samping itu, di Indonesia juga tidak berkembang jiwa-jiwa entrepreneur sehingga pertumbuhan pengusaha sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting dalam kesejahteraan negara sangat lamban. Kecilnya pertumbuhan pengusaha atau pelaku ekonomi ini adalah salah satu bentuk terlambatnya pendidikan membangun nilai-nilai moral kekaryaan. Hal ini disadari saat sekarang sehingga

baru dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan kewirausahaan dalam institusi pendidikan. Padahal, hakikat karya sangat penting dalam kehidupan manusia. Persepsi karya juga harus diubah dari lintas “pekerja” menjadi lintas menciptakan kerja atau karya. Dalam budaya lokal, ditemukan kearifan ini mendorong orang bekerja keras. Bekerja keras yang diiringi dengan kejujuran. Sehubungan dengan ini Dove (1985), menguraikan tentang peranan kebudayaan tradisional di Indonesia, sebagai salah satu “alat” kemajuan yang dapat dijadikan rumpan terhadap masa depan masyarakat lokal. Tidak saja berkaitan dengan budaya moral, tetapi juga berkaitan dengan cara-cara orang Indonesia mengolah kehidupan dengan karya-karya yang bersumber dari lingkungan sekitar.

Weber (1974) misalnya, telah menjelaskan hakikat karya juga terdapat dalam ajaran-ajaran agama, misalnya dalam ajaran Protestan telah terinternalisasi rumusan-rumusan kerja keras sebagai satu langkah jalan untuk menemui kebahagiaan di akhirat nanti. Internalisasi ajaran-ajaran karya itu yang mengubah semangat manusia dari berpangku tangan, menyerah pada nasib, mengambil jalan pintas, seperti merampok, menodong, korupsi menjadi satu tanggung jawab yang tinggi terhadap kehidupan.

Dalam budaya lokal mana pun di Indonesia, pastilah mempunyai falsafah karya, mengajarkan hidup sejahtera dengan bekerja keras, dan harus berguna bagi sesama. Hakikat karya ini mendorong bagaimana dapat melahirkan karya-karya yang dapat membangun kehidupan yang lebih baik. McClelland (1961) memutuskan bahwa hakikat karya ini sangat tergantung pada pemberian motivasi, sama halnya dengan Maslow (1970) mengharuskan adanya motivasi diinternalisasikan dalam hidup seseorang. Pada hakikatnya, kearifan budaya lokal kaya dengan motivasi-motivasi karya. Hal ini dapat

dilihat dari cerita-cerita rakyat, ajaran-ajaran lokal yang membangun motivasi.

Pertanyaannya sekarang adalah secering mana motivasi tersebut dilaksanakan terhadap seseorang atau kepada kelompok orang. Menurut pendapat Maslow (1970), semakin sering motivasi itu diberikan atau diinternalisasikan, semakin tinggi terjadi karya atau produksi. Begitu juga dengan pendapat McClelland (1961), sebenarnya untuk membangun karya yang tinggi sangat tergantung pada internalisasi dan pengaruh motivasi terhadap seseorang. Dalam konteks ini, diyakini bahwa pendidikan akhlak sebagai pendidikan internalisasi harus dibangun dengan pendekatan seperti itu. Pendidikan akhlak harus membangun motivasi karya. Mengubah perilaku manusia atau kelompok orang dari tidak memiliki mentalitas karya menjadi bermentalitas karya.

c. Persepsi waktu

Di samping memuat hakikat hidup dan karya, kearifan lokal juga memuat persepsi tentang waktu. Dalam Islam, dikenal pepatah “waktu itu laksana pedang”, sedangkan dalam ungkapan orang-orang Eropa terdengar, “Time is money”. Hal ini menunjukkan dalam hidup ini perlu adanya persepsi tentang waktu sehingga dengan persepsi itu nilai-nilai perjalanan waktu dapat dimaknai dan tidak akan terjadi sebuah kefatalan dalam menjalani kehidupan.

Persepsi waktu memberikan bentangan atau satu ukuran pertimbangan moralitas yang terjadi sepanjang waktu yang telah dilewati dan memberikan prediksi ke depan yang harus dilakukan. Dunia pendidikan kita lupa dengan penyisipan moral yang berkaitan dengan persepsi anak didik dengan waktu ini, yang ditekankan hanya *long life education*. Sebuah ajaran moral yang berkaitan dengan waktu yang bertujuan memberikan satu pandangan yang positif dalam

menghargai waktu dan pemanfaatannya guna kelangsungan kehidupan dan masa depan.

Dalam sejarah nenek moyang kita, persepsi terhadap waktu ini telah berhasil dalam menata tanda-tanda alam sehingga mampu membuat navigasi dan hari-hari baik untuk melaut, bercocok tanam, dan sebagainya. Penghitungan terhadap waktu sangat penting karena menentukan tindakan dan prediksi atau perhitungan untuk masa depan. Moralitas ini berkaitan dengan pembangunan rencana kehidupan dalam menghadapi masa depan karena masa depan terkait dengan perancangan dan kondisi kekinian.

Semakin jelas bahwa ruang lingkup pendidikan akhlak atau pembentukan akhlak tersebut memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya dipandang sebagai bentuk perilaku. Padahal perilaku sangat terkait dengan dimensi waktu, dimensi hakikat hidup, dan dimensi kekarayaan sehingga dalam konteks ini semakin jelas bahwa pendidikan akhlak yang dapat melahirkan perubahan adalah pendidikan akhlak yang dapat memberikan dimensi-dimensi tersebut dengan cermat. Dalam konteks ini pula semakin diyakini bahwa pendidikan akhlak bukanlah pendidikan yang dapat diajarkan sambil lalu dengan pendekatan tekstualitas belaka.

d. Pandangan terhadap alam

Hidup bagi manusia bukan hanya merupakan hubungan sesama manusia saja, melainkan juga terkait dengan membangun hubungan dengan lingkungan atau alam. Persepsi manusia terhadap alam tidak dapat dibangun secara satu arah atau berdasarkan kepentingan manusia saja. Tetapi, harus dimaknai oleh manusia dalam dua arah, saling ketergantungan, dan bernilai keseimbangan. Perlakuan manusia terhadap alam merupakan satu ajaran moral yang harus direkonstruksi menjadi pendidikan akhlak.

Pandangan manusia terhadap alam yang satu arah selama ini menyebabkan moralitas manusia terhadap alam tidak jelas bahkan sangat cenderung eksploitatif dan pemusnahan. Eksploitasi ini yang melahirkan satu dimensi ketidakseimbangan terhadap alam sehingga menimbulkan berbagai kemusnahan alam yang menelan korban, baik jiwa maupun material yang sangat menopang kepentingan hidup manusia.

Hilangnya etika terhadap alam inilah yang sedang dituai oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Belakangan ini bangsa yang terdiri dari berbagai wilayah 33 provinsi hampir semuanya menghadapi bencana alam. Ini sebuah kenyataan bahwa bangsa kita tengah kehilangan satu etika pada alam sehingga perlakuan-perlakuan manusia kepada alam tidak memberikan keseimbangan, malah melahirkan kepunahan dengan peng eksploitasi yang sangat berlebih-lebihan, seperti terlihat dari pertambangan yang tidak memerhatikan ekologi atau pengundulan hutan yang sangat tidak wajar. Akibatnya adalah kemusnahan terhadap alam.

Perlakuan terhadap alam dalam tradisi lokal dapat dilihat dari berbagai tradisi yang dibangun oleh masyarakat lokal dalam memperlakukan alam. Misalnya, ada berbagai cara ritual-ritual dan hukuman-hukuman lokal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap alam yang dilakukan oleh manusia. Ritual-ritual seperti ini dalam konteks pengamal modernis tidak memberikan nilai, tetapi dalam pengamal postmodernis, nilai itu yang membangun keseimbangan-keseimbangan karena membangun sikap manusia terhadap alam secara wajar dan alamiah, tidak berani melakukan eksploitasi.

Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, ada satu etika dalam memandang alam, yakni *alam takambang jadi guru*, sebuah pandangan yang membangun keharmonisan alam dengan manusia. Alam adalah

guru yang mampu memberikan pembelajaran pada manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan manusia terhadap alam akan memberikan respons pembelajaran juga. Artinya, respons-respons alam adalah bentuk pembelajaran yang harus ditafsirkan oleh manusia (Hanani, 2000).

Tradisi-tradisi penghargaan alam dalam masyarakat lokal sangat banyak karena keterkaitan hidup manusia terhadap alam sangat kuat. Oleh sebab itu, dalam tradisi itu sangat memelihara hubungan yang baik dengan alam, baik secara ritual maupun dari segi tindakan. Setiap tindakan yang diberikan manusia pada alam pastilah memberikan reaksi sebagai bentuk dari akibat dari tindakan manusia itu. Pemaknaan seperti ini yang harus dikembangkan dalam pendidikan akhlak. Kesatuan manusia terhadap alam, akan bereaksi santun pula dari alam, akan memberikan reaksi baik pula kepada manusia. Nilai-nilai inilah yang kandas dalam ruang kehidupan pendidikan kita sehingga pandangan terhadap alam sering tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dan bermakna.

e. Hubungan sesama manusia

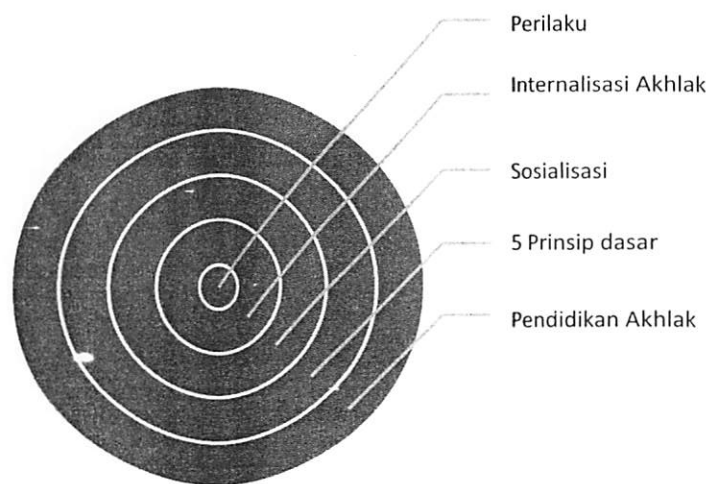
Dalam realitas, penekanan pendidikan moral yang paling dominan selama ini terjadi dalam ranah dunia pendidikan kita adalah satu sisi ini, sisi hubungan manusia dengan sesama. Namun, sisi ini pun mengalami satu dimensi kepuaran ditandai dengan hilangnya berbagai prinsip-prinsip hubungan manusia yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari realitas, yakni terjadinya kecenderungan mudahnya orang melakukan pembunuhan, perkelahian, perang etnis, dan anarkisme lainnya. Di samping itu, juga dapat dilihat dari perilaku-perilaku yang tidak dapat membangun keharmonisan hidup antara satu sama lainnya. Saling menolong, saling menghargai, dan solidaritas tidak lagi menjadi tradisi kuat di negeri ini. Hubungan manusia satu sama lain telah terjalin

dalam bentuk hubungan transaksional, hubungan yang hanya saling menguntungkan.

Sekalipun etika jalinan hubungan manusia ini lebih banyak dimaknai dalam pendidikan moral di negeri ini. Namun, pada kenyataannya tidak menunjukkan suatu keberhasilan sehingga fondasi hubungan manusia tergoyahkan juga. Budaya-budaya individualisme sudah cukup kuat terbangun dalam ranah masyarakat kita sehingga hubungan manusia berada dalam kekuatan dimensi yang menjauh dari rasa solidaritas, harmonisasi, dan distorsi sosial lainnya.

Hubungan-hubungan sosial yang mendistorsi menjadi salah satu indikator dari tidak terjalinnya hubungan yang harmonis dalam dunia sosial masyarakat. Hal ini dalam masyarakat lokal menjadi titik perhatian yang utama dalam ajaran moral. Hubungan manusia selalu dibangun dengan hubungan horizontal yang sangat mementingkan kedinamisan dan keteraturan dalam masyarakat tersebut. Namun, ketika hubungan itu tidak lagi diletakkan dalam tataran yang horizontal, di sinilah terjadi hubungan disharmonis atau konflik yang menimbulkan hilangnya rasa kemanusiaan, humanisme, dan rasa kesatuan.

Terinternalisasinya rasa kemanusiaan secara langsung akan membangun humanisme, yang mana manusia satu sama lain tidak berani menghisap, tidak berani memakan hak orang lain, tidak berani membunuh orang lain, dan sebagainya. Dalam realitas masyarakat Indonesia sekarang, penekanan pendidikan akhlak yang berkaitan dengan menjelaskan dan menginternalisasikan hubungan manusia yang harmonis sudah sangat mendesak dilakukan. Pendidikan akhlak secara keseluruhan dapat berjalan seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 6.3
Lingkaran Pendidikan Akhlak dan Pencapaian Tujuan

Pendidikan akhlak pada dasarnya adalah untuk mengukuhkan kembali nilai-nilai dasar kemanusiaan rakyat Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal sebagai pembangun jati diri anak bangsa, yang selama ini terabaikan sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat dalam mendidik anak bangsa karena pendidikan terlalu bersikukuh dengan modernisasi sehingga nilai-nilai lokal dianggap tidak bermanfaat. Namun, ketika semuanya sudah tercampakkan dan tertinggal yang terjadi adalah bangsa terbawa dalam perubahan yang sangat mengecewakan, bangsa yang telah berumur lebih enam puluh tahun ini terhimpit oleh berbagai problem akibat krisis moralitas.

3. Strategi Pengajaran

Pendidikan akhlak dalam kondisi bangsa yang sedang amburadul bagaimanapun juga harus dilakukan. Pendidikan akhlak tidak dapat

dinafikan atau ditiadakan, ia harus diajarkan tersendiri tidak sambil lalu. Pendidikan akhlak berkaitan langsung dengan *humanisme*, mendewasakan rasa kemanusiaan manusia. Pengabaian terhadap pendidikan ini sama halnya pengabaian terhadap pendidikan kemanusiaan yang bersentuhan langsung dengan jiwa dan karsa manusia.

Kemanusiaan manusia tidak dapat dibangun dengan satu arah dan dimensi saja, tetapi harus dibangun melalui pendekatan kemanusiaan itu sendiri. Pendekatan yang dapat membangun perubahan mentalitas dan cara-cara mengekspresikan kemanusiaan yang *humanis*. Mengapa orang berani korupsi, membunuh, berkelahi, anarkis, dan perbuatan yang tidak membangun lainnya? Ini adalah salah satu faktor terpinggirkannya humanisme dalam hidup manusia akibat pendidikan akhlak tidak dibangun dalam membangun manusia.

Dalam konteks ini, pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan Indonesia harus dilaksanakan. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan pembangunan strategi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak untuk mencapai tujuannya sangat diperlukan strategi supaya tidak hanya menjadi *lips services*. Tetapi, harus menjadi bagian penting yang dapat memberikan kontribusi maksimal dalam membentuk perilaku, moral, dan tindakan manusia yang humanis dan bertanggung jawab.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran akhlak, di antaranya *pendidik, materi, dan konteks lokal*. Ketiga hal ini merupakan faktor terpenting dalam mencapai tujuan dari pendidikan akhlak.

a. Pendidik

Sesungguhnya, pendidikan adalah proses yang mendewasakan dan mencerdaskan manusia secara paripurna. Sementara tercapainya tujuan pendidikan, sangat tergantung pada peranan pendidik sebagai

lokomotif dari pendidikan tersebut. Pendidik adalah manusia yang mentransformasikan ilmu, perilaku, moral, dan sebagainya pada anak didik. Oleh sebab itu, hampir sebagian dari proses pendidikan sangat tergantung pada peranan pendidik. Tidak berlebihan jika pendidik adalah *agent* dari transformasi sekaligus pembangun watak serta karakteristik dari anak didik. Dalam pendidikan akhlak, peranan pendidik sangat berpengaruh dalam mengubah cakrawala perilaku, tindakan, dan peradaban anak didik. Pendidikan akhlak sebenarnya merupakan pendidikan yang mampu memberikan sumber teladan dan sumber tindakan yang normatif terhadap anak didik. Sebab, pendidikan akhlak tidak bergantung pada pencerdasan nalar atau daya pikir saja, tetapi lebih dominan menyentuh humanisme.

Dalam konteks ini, pendidik dalam pendidikan akhlak seperti disarankan Weber (1974) harus dilakukan atau diperankan oleh orang-orang yang memiliki karisma, memiliki komitmen hidup yang teruji, komitmen tindakan, dan humanis. Masalahnya, karisma sangat terikat pada hubungan emosional dan keteladanan. Karisma ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan agama, budaya, dan orang-orang terdidik. Pada hakikatnya, pendidikan akhlak adalah kemampuan pendidik dalam membangun manusia atau anak didik dengan nilai-nilai yang ada padanya melalui teoretik dan perilaku yang teruji normatifnya.

Pendidikan akhlak sangat memungkinkan dilakukan oleh orang-orang karismatik ini ketimbang orang-orang yang terdidik secara akademik yang hanya mengandalkan teori dan tidak mampu mentransformasi nilai-nilai melalui perilaku, teladan, dan sebagainya. Jika boleh mengasumsikan seperti sekarang ini, semestinya dengan begitu majunya sistem pendidikan yang dirancang, mengapa tidak terbangun sikap normatif pada anak didik sehingga kaum-kaum

terpelajar pelaku politik, pelaku ekonomi, pelaku kebijakan, dan sebagainya cenderung membangun perilaku yang terbalik dengan kemanusiaan. Padahal, pendidikan sudah dibangun dengan sistem yang begitu ketat. Asumsi ini meyakinkan bahwa khusus pendidikan akhlak itu tidak dilakukan dengan proses transformasi oleh orang-orang atau pendidik yang karismatik, pendidik yang memiliki kredibilitas dalam masalah pembentukan akhlak.

Sekolah-sekolah dapat mengambil para pendidik akhlak dari pemuka agama yang teruji akhlaknya, pemuka adat yang sangat disegani, dan orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun moral, tidak mesti harus melalui rekrutmen pendidikan akademik. Namun, yang penting adalah ia menjadi anutan dalam satu komunitas. McClelland (1961) melihat dalam proses perubahan tindakan manusia sangat diperlukan agen aktor sebagai pemberi motivasi, anutan, perubahan terhadap sasaraannya. Di sini yang terpenting adalah kemampuan seorang pendidik secara nyata memberikan anutan, contoh teladan, dan motivasi. Kesemuanya itu harus melekat pada pendidik sebagai aktor tersebut. Ia tidak hanya berbicara dalam ranah teori, tetapi dalam ranah kenyataan dan teori itu sendiri.

Minimal ada tiga komponen yang melekat pada seorang pendidik akhlak. Tiga hal ini sebagai komponen yang paling berpengaruh dalam membentuk akhlak anak didik. Pertama, komponen moralitas; kedua, keluasan cakrawala berpikir; ketiga, teladan dan anutan. Subungan dengan itu, pendidikan akhlak dapat dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis ini dapat diadopsi dari terori sistem yang dikemukakan oleh Parsons (Paloma, 1984). Parsons menjelaskan, untuk melaksanakan satu kerangka kerja sebuah masalah diperlukan empat persyaratan. Empat persyaratan disingkat oleh Parsons dengan A-G-I-L.

- A = *Adaptation*
 G = *Goal Attainment*
 I = *Integration*
 L = *Latent pattern maintenance*

Keempat persyaratan ini dapat digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan dari fokus pendidikan akhlak. Hal ini dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

Tabel 6.2
Kerangka yang Harus Dibangun oleh Pendidik Akhlak
Berdasarkan Dimensi Teori Struktural Fungsional Parsons

No	Dimensi sistem	Deskripsi pelaksanaan pendidikan akhlak oleh seorang pendidik
1	Adaptation	Membangun pendidikan dengan kurikulum dan cara-cara yang dapat dimaknai dan dipahami oleh anak didik. Pendidikan akhlak memperkenalkan sikap baik dan buruk, humanis yang semuanya digali dari budaya, agama, dan proses pendidikan.
2	Goal Attainment	Melakukan pendidikan akhlak dengan tujuan untuk membangun sikap dan paradigma anak didik yang tidak skeptis, eksklusivisme, prejudis, egois, individualis tetapi membangun ke arah yang bertanggung jawab, sikap yang tidak humanis, manusiawi, jujur, dan dapat memberikan anutan. Di samping itu, anak didik harus mampu menghargai di luar yang dimilikinya bukan sebagai musuh. Harus mampu memaknainya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dijaga.
3	Integration	Pengajaran pendidikan akhlak harus diajarkan secara bersama, tidak memisah-misahkan satu sama lain. Anak didik harus belajar budaya lain dan diberi pengetahuan budaya, agama, nilai-nilai lokal, dan ajaran-ajaran yang kental dalam lokal di mana anak didik itu berada.
4	Latent pattern maintenance	Pendidikan akhlak harus dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya, dan harus mampu membangun bangsa yang bermoral dan berbudaya yang tidak berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak harus banyak bersumber atau banyak diajarkan oleh orang-orang yang memiliki karisma yang teruji dalam lingkungan sosial budaya tempat mereka berada. Materi pendidikan akhlak tidak hanya diadopsi belaka dari negara-negara maju, tetapi dikembangkan dari budaya lokal yang ada karena budaya lokal telah menjadi <i>world view</i> masyarakat setempat.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik atau pengajar pendidikan akhlak, minimal mampu membangun diri dan strategi sesuai dengan format tujuan hasil yang hendak dicapai dari pendidikan akhlak tersebut. Tujuan pendidikan akhlak secara umum adalah membangun manusia pada konteks kemanusiaan yang manusiawi.

b. Materi

Pendidikan akhlak lebih banyak terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, nilai-nilai berperikemanusiaan dan tidak berperikemanusiaan dan sebagainya. Oleh sebab itu, materi pendidikan akhlak harus berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu sudah terkandung dalam ajaran moral lokal, agama, dan negara. Namun, sebagai basis pembentukan moralitas budaya lokal telah meletakkan pendidikan akhlak tersebut melalui kearifan-kearifan yang ada dalam budaya tersebut, seperti yang tercantum dalam matrik Kluckhohn (Tabel 6.1).

Dalam konteks ini, penegasan dan bentuk pengajarannya perlu dikembangkan lagi sehingga nilai-nilai itu melekat, tertransformasi sehingga mampu mewarnai perilaku, tindakan, dan perbuatan anak didik. Kejujuran misalnya, merupakan nilai utama dalam semua budaya lokal di Indonesia, karena budaya lokal selalu menganut orientasi nilai hakikat hidup harus dibangun dengan nilai-nilai yang jujur, nilai-nilai yang tidak mengorbankan hak orang lain, dan sebagainya. Kejujuran bersifat universal dalam semua budaya di dunia ini karena kejujuran membangun rasa kemanusiaan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Materi pendidikan akhlak harus bertitik tolak dari nilai dasar dan universal itu.

c. Konteks lokal

Pengajaran pendidikan akhlak juga mesti memperhatikan konteks lokal. Artinya, di mana pendidikan akhlak itu diajarkan harus memperhatikan budaya lokal setempat karena konteks lokal sangat tergantung pada budaya lokal. Budaya lokal adalah salah satu pembentuk identitas dan karakteristik masyarakat pemiliknya. Oleh sebab itu, ia menjadi *world view* masyarakat setempat. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus dikembangkan dan dijadikan pijakan untuk membangun karakteristik moralitas masyarakat lokal.

Masyarakat lokal harus dibangun dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada lokal karena budaya lokal bagian yang termudah memformulasi sikap, tindakan, dan nilai dasar kemanusiaan. Dalam budaya lokal tersebut, semua pembentukan perilaku manusia sudah teradat, terakumulasi, dan menjadi pandangan. Namun, karena tidak disosialisasikan dan diinternalisasikan maka tindak masyarakat tidak diformat dengan budaya lokal yang mengajarkan nilai-nilai tersebut.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai budaya lokal, mencermati konteks lokal ini sebagai salah satu pembentuk manusia yang berkeadaban, pembentuk manusia yang memiliki moralitas yang berperikemanusiaan. Masyarakat atau manusia yang dapat bertindak, bertanggung jawab, dan berbuat tidak menganggangi rasa kemanusiaan.

4. Sasaran Pendidikan Akhlak

Sasaran paling utama dari pendidikan akhlak adalah membangun manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Dalam rasa kemanusiaan melekat nilai-nilai dasar yang universal, jujur, bertanggung jawab serta memiliki orientasi masa depan yang berperadaban dan berkeajahteraan. Implikasi dari ini semua adalah terwujudnya sebuah bangsa yang berperadaban.

Setting utama dalam pendidikan akhlak adalah membangun individu atau masyarakat berpolo dan berperilaku dalam nilai-nilai yang ditira oleh budaya yang melekat pada masyarakat itu. Inti pendidikan akhlak dalam konteks ini adalah menginternalisasikan nilai tersebut menjadi bagian dalam hidup, tindakan, dan lain sebagainya.

Internalisasi nilai akan berperan dalam membentuk satu bangsa yang berperadaban. Analisis dalam konteks sekarang adalah mengapa kondisi kebangsaan berada dalam ambang keadaban yang berbanding terbalik dengan yang diharapkan karena internalisasi nilai itu yang tidak berjalan dalam pembangunan manusia Indonesia. Internalisasi nilai tidak menjadi pertimbangan yang profesional dalam sistem pendidikan. Sebagai contohnya saja mengapa kita sering mengalami konflik akibat keberagaman budaya? Hal ini karena pendidikan kita tidak merekonstruksi pendidikan multikultural. Hal ini baru disadari belakangan ini sehingga pendidikan multikultural disipikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1. Pendidikan multikultural hadir setelah melihat gejala konflik budaya, etnis, dan masyarakat lokal di Indonesia. Padahal, lebih jauh pendidikan multikultural harus dibangun oleh Indonesia untuk mengharmonisasikan kondisi sosial budaya yang beragam tersebut.

Begitu juga dengan pendidikan akhlak yang pernah terpinggirkan dan tidak dianggap menjadi bagian penting, pada akhirnya yang terjadi adalah dugaan-dugaan yang sangat kontroversial dengan kemajuan. Keterbalikan-keterbalikan harapan mencuat menjadi polemik yang sangat merugikan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sasaran pendidikan akhlak harus dibangun secara jelas.

a. Individu

Apa yang diharapkan dari pendidikan akhlak adalah membangun manusia sebagai individu yang bermoralitas dan bermartabat.

Pembangunan individu ini berkaitan dengan membangun karakteristik manusia yang diformulasi dengan internalisasi nilai-nilai dalam dirinya sehingga ia bertindak dan berbuat sesuai dengan aturan nilai yang mengikatnya. Transformasi yang diharapkan adalah lahirnya individu atau anak didik yang berkarakteristik manusiawi, humanis, dan beradab. Karakteristik individu ini sebagai dasar dalam kehidupan manusia.

Keterabaian, pembentukan kepribadian manusia ini terbukti telah memberikan distorsi humanisme dalam peradaban manusia, distorsi kemanusiaan dalam dinamika kehidupan manusia bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kekuatan moralitas individu adalah tiang sekaligus fondasi bagi kukuhnya peradaban yang bermartabat.

b. Masyarakat

Sasaran pendidikan akhlak adalah membangun masyarakat yang berketeraturan, berperikemanusiaan, dan berkeadilan. Pendidikan akhlak walaupun diajarkan di sekolah pada anak didik, dampaknya adalah sebagai wadah membangun moralitas masyarakat secara keseluruhan. Membangun anak didik yang akan menjadi penentu masa depan masyarakat.

Kenapa anak didik berani melakukan tawuran? Ini merupakan salah satu renggangnya ikatan nilai dalam peserta didik. Kerenggangan ikatan nilai tersebut jika dibiarkan akan merembet menjadi suatu kebiasaan sehingga tidak ayal, anarkisme dan kegiatan-kegiatan kriminal menjadi satu kegiatan yang tidak tercegahkan, ia selalu menyeruak. Oleh sebab itu, pendidikan moral harus mampu menguatkan manusia dengan ikatan nilai-nilai normatif tersebut sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat dapat membangun masyarakat berdinamika berketeraturan.

c. Negara dan bangsa

Apa yang terjadi di ranah bangsa saat sekarang ini adalah kehilangan perilaku kemanusiaan yang manusiawi, kehilangan kejujuran, kehilangan manusia yang bertanggung jawab, kehilangan esensi yang ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu yang gagah satria. Pendidikan akhlak harus mampu membangun kembali sikap-sikap yang dipancarkan oleh pendahulu tersebut. Pendidikan akhlak harus hadir sebagai pencerah bangsa yang sedang dirundung oleh kegalauan akibat perilaku-perilaku manusia yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan.

Pendidikan akhlak bertujuan untuk membangun kembali manusia-manusia yang berkualitas, yang mampu diharapkan menjadi lokomotif penyelenggara bangsa yang dapat membangun bangsa berkeadaban, berkeajahteraan, berkeadilan, dan seperti yang dimaktubkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini pula diyakini bahwa bangsa tidak dapat dikelola tanpa manusia-manusia yang bermoral dan berakhlak. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak harus menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Terakhir untuk menyelamatkan masa depan bangsa, sangat diperlukan manusia-manusia bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan akhlak merupakan salah satu strategi untuk membangun manusia-manusia yang berakhlak dan bermoral. Sudah terbukti bahwa pendidikan akhlak tidak dapat dipinggirkan dan diabaikan dalam sistem pendidikan di negara ini. Pendidikan akhlak harus ada dan dibangun dalam kondisi bagaimanapun karena sangat bersentuhan dengan perilaku, tindakan, dan perbuatan manusia.

Untuk bangsa Indonesia, pendidikan akhlak harus digali dan dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai yang ada yang telah menjadi

world view, di antaranya melalui budaya lokal yang memiliki kearifan dan sudah terbukti dalam alur sejarah berhasil membangun karakteristik mentalitas bangsa yang terintegrasi jujur, berani, bertanggung jawab. Sumber pendidikan akhlak dari alur kearifan lokal ini telah dikompilasi juga oleh filsafat pendidikan *tut wuri handayani*.

Pendidikan akhlak, harus mampu menjadi lokomotif pembangun karakteristik masyarakat Indonesia yang bermoral, bermental kemanusiaan, dan humanis. Oleh sebab itu, arah pendidikan akhlak bersifat mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang terjalar dalam budaya lokal tersebut. Budaya lokal tidak dapat dikatakan sebagai penghambat pembangunan seperti dituding oleh penganut modernisme, tetapi memiliki kearifan yang sangat berpotensi dalam membangun mentalitas, perilaku, keberanian, kejujuran manusia. Sebab, dalam budaya lokal terdapat orientasi nilai yang sangat berpotensi bagi manusia dalam membangun kemanusiaannya.

Kini, saatnya direkonstruksi kembali pendidikan akhlak berbasis kearifan lokal, mengingat perilaku masyarakat Indonesia yang telah amburadul hingga bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Pendidikan akhlak harus diajarkan di sekolah-sekolah. Peserta didik harus mendapatkan kembali transfer akhlak, moral, mental, kejujuran, dan sebagainya sebagai pembangun manusia yang bermartabat dan berperikemanusiaan sehingga masa depan negara ini memiliki keadaban seperti yang dicita-citakan oleh pembukaan UUD 1945.

Strategi yang harus dibangun dalam pendidikan akhlak adalah mengingat pendidikan akhlak bertujuan mengubah perilaku dan menanamkan nilai-nilai maka pendidikan akhlak harus dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang teruji akhlak dan moralitas serta integritas kediriannya. Orang-orang seperti ini bisa diambil dari pemimpin agama

dan adat yang karismatik, tidak mesti dari kalangan intelektual yang selalu *bergaining* dengan teori. Pendidikan akhlak bukan pendidikan yang diajarkan secara hafalan, melainkan menyentuh dan mampu memberikan keteladanan. Materi pendidikan akhlak harus dibangun dari nilai-nilai moralitas yang tertanam dalam bangsa ini. Nilai-nilai lokal sudah cukup berpotensi sebagai pembangun materi pendidikan akhlak karena dalam budaya lokal ada kearifan-kearifan yang sangat berpotensi membangun moralitas. Pancasila pun lahir dari kearifan-kearifan lokal tersebut.

Pendidikan akhlak harus diajarkan di semua tingkatan sekolah dan universitas secara berkelanjutan. Ia bersifat mendidik mentalitas, moralitas, dan memberikan nilai-nilai sebagai pegangan hidup. Nilai itu harus terinternalisasi dalam kehidupan. Persoalan selama ini adalah bangsa Indonesia ini kaya dengan nilai-nilai pembangun kemanusiaan, tetapi nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi karena tidak adanya pendidikan yang spesifik menginternalisasikannya. Maka dari itu, persoalan moral di ranah bangsa yang beragama ini menjadi satu persoalan yang pelik sehingga dampaknya sangat merugikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam kondisi bangsa yang tengah menghadapi krisis moralitas ini sudah saatnya semua menyadari dan bekerja keras untuk membangun pendidikan karakteristik yang mana pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pendidikan nasional, maka pendidikan akhlak harus direkomendasikan dan dilaksanakan dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia secara profesional dengan berbagai pendekatan.

B. Institusi Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Upaya yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan pada masa otonomi daerah ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan

melakukan profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri. Masalahnya, sudah setengah abad lebih bangsa Indonesia merdeka, permasalahan kualitas pendidikan masih berada dalam potret yang buram.

Kualitas pendidikan yang rendah ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola masa depan dan lambatnya kemiskinan teratasi. Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia itu, dapat dilihat dari minimnya bangsa Indonesia melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang berdaya saing. Hasil penelitian Ciputra telah membuktikan hal ini seperti telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Implikasi lain dari rendahnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Menurut Giddens injeksi yang paling utama untuk bertransformasi adalah meningkatkan *human capital* dengan salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Penyelenggaraan pendidikan itu tertumpu pada guru termasuk juga dosen di Perguruan Tinggi.

C. Evaluasi Profesionalisme Tenaga Pendidik Sebagai Penyelenggara Pendidikan

Rendahnya anggaran biaya pendidikan juga berdampak tidak baik terhadap peningkatan kualitas dan keprofesionalan guru. Anggaran pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terhambatnya kreativitas guru. Sementara itu, di Indonesia sangat banyak ditemukan guru tidak layak untuk mengajar. Pendidikan guru di Indonesia masih rendah, dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya sepertiga atau 35% yang berpendidikan S1 (*Republika*, 2008). Sementara di Sekolah

Dasar guru berpendidikan S1 baru sekitar 10%, sedangkan menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 guru Sekolah Dasar Harus S1 (*Kompas*, 2006).

Menurut analisis *Chief Section for Teacher Education Division UNESCO*, Caroline Pontefract, pada 2015, tenaga guru yang akan dibutuhkan oleh negara-negara E-9 (China, India, Indonesia, Brasil, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Meksiko, dan Nigeria) mencapai 18 juta orang. Guru-guru ini harus mempunyai pendidikan formal minimal strata satu. Oleh sebab itu, fokus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) menteri pendidikan sembilan negara berpenduduk terbesar di dunia pada 10–12 Maret 2008 di Bali mempertegas masalah peningkatan kualitas pendidikan guru. Pendidikan guru sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan. Hasil penelitian Hattie (2000) menemukan bahwa mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh pendidikan guru, sebanyak 63% pendidikan guru menyumbangkan pada kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan variabel lainnya di sekolah (Mayo, 2005). Oleh sebab itu, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, pendidikan guru harus menjadi salah satu komponen yang mesti diperhatikan. Pendidikan yang dimiliki oleh guru juga tidak dapat dimungkiri sebagai pendorong profesionalitas guru.

Sampai pada 2009, permasalahan ketidaklayakan guru dalam mengajar belum juga teratasi, terutama guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar yang tidak layak mengajar sekarang mencapai 77,85 persen, hanya 22,15 persen saja murid sekolah dasar di Indonesia diajar oleh guru yang layak. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kualitas pendidikan di Indonesia di era global dan kompetitif saat sekarang ini, tertinggal dari negara-negara tetangga. Jika dilihat dari hasil tes umum yang dilakukan untuk guru SD/TK rata-rata yang mereka capai 36, 12 persen (*Kompas*, 27 Oktober 2009). Hal ini

tentu sangat perlu diperbaiki dalam upaya mendorong kualitas pendidikan tersebut.

Selain pendidikan guru yang masih rendah dan mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu, kelambatan guru mempercepat peningkatan kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh terjemaknya guru dalam metode pembelajaran konvensional, yang mana guru belum dapat mempergunakan sarana teknologi dan informasi dalam mengajar. Padahal, teknologi informasi seperti internet dapat dijadikan sebagai media yang cukup membantu dalam pendidikan. Sekaligus sebagai sarana alternatif dalam meningkatkan keterbatasan bahan bacaan, rujukan, dan perpustakaan sekolah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan era global, profesionalitas dan pendidikan guru tidak dapat diabaikan karena pendidikan harus diolah dan disajikan dengan profesional sehingga dapat menjawab tantangan zaman. Pendidikan tidak dapat disajikan dengan insanisasi atau dengan apa adanya, pendidikan harus disajikan dengan profesionalitas.

D. Strategi Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik

Melihat dari realitas permasalahan yang dihadapi oleh guru, permasalahan itu merupakan salah satu faktor kuat yang memengaruhi lambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan strategi-strategi untuk mempercepat meningkatkan permasalahan tersebut. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan profesionalisme guru, karena dilihat dari data tahun 2009, yang mana 77,85 persen guru, khusus di sekolah dasar tidak layak. Permasalahan ini pada dasarnya berlaku dalam komunitas guru yang lebih luas. Artinya, permasalahan ketidaprofesionalan guru pada umumnya menjadi permasalahan di

setiap jenjang pendidikan di Indonesia saat ini. Hal ini agaknya menjadi dasar pijakan pentingnya memprofesionalisme guru dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru mempunyai tugas pokok: (a) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (b) membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat; (c) melaksanakan tugas profesional lain dan administrasi rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama di atas.

Profesionalisme guru sangat ditentukan oleh pendidikan. Oleh sebab itu, undang-undang pendidikan ini menegaskan bahwa pendidikan minimal untuk guru sekolah dasar adalah sarjana atau jenjang S1. Sebab, pendidikan secara langsung atau tidak langsung akan membawa pada kemampuan untuk tindakan cepat (produktif), tepat (efektif), efisien, dan inovatif. Implikasi dari semua ini adalah mempercepat terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan sebagaimana dikatakan juga oleh Ivan Illich, sebagai basis pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan itu harus dikelola secara profesional. Profesional yang berkaitan secara langsung dalamnya adalah tenaga pendidik atau guru. Profesionalisme guru minimal terangkum dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai pendidik, pengajar/pelatih, dan pembimbing.

Tugas pokok guru sebagai pendidik adalah mendewasakan peserta didik, yang mana guru mendorong peserta didik mencapai kedewasaan fisik (*physical maturity*), kedewasaan mental intelektual (*mental and intellectual maturity*), kedewasaan sosial pribadi (*social and personal maturity*), dan kedewasaan moral keagamaan (*moral and religious maturity*). Tugas guru sebagai pengajar/pelatih adalah melaksanakan pembelajaran. Selain itu, sebagai pembimbing adalah menyelenggarakan perkembangan peserta didik dan berupaya menjadikan peserta didik agar dapat memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*). Bahkan, seorang guru harus mampu mengajarkan kepada siswanya tentang cara belajar yang baik (*learning how to learn*). Sementara guru sebagai pembimbing berkaitan dengan kemampuan guru menyelenggarakan perkembangan fisik, kedewasaan mental intelektual, kedewasaan sosial pribadi, dan kedewasaan moral keagamaan peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guru harus memiliki kompetensi dasar yang mencakup: (1) kompetensi profesional (materi bidang studi), (2) kompetensi pedagogik (pemahaman karakteristik peserta didik dan melakukan pembelajaran yang mendidik), (3) kompetensi sosial (keterampilan berhubungan dengan orang lain), dan (4) kompetensi kepribadian (*akhlakul karimah* dan berjiwa guru).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk *menggask* profesionalisme guru secara langsung sekarang adalah melalui pensertifikasian. Kebijakan ini merupakan rangsangan atau alat motivasi bagi tenaga pendidikan untuk membangun kinerja dan loyalitas

kependidikannya supaya lebih berorientasi pada pengembangan mutu dan kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan saat sekarang harus ditingkatkan mengingat ketatnya persaingan global.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 telah mengatur tentang kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sebagai berikut (1) kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan tinggi sesuai dengan bidang pengajarannya; (3) sertifikat profesi guru. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh seorang guru.

Tumpuan mendasar dalam peningkatan kualitas pendidikan terletak pada profesionalisme tenaga pendidik. Profesionalisme tenaga pendidik sangat menentukan terhadap kemampuan tenaga pendidik tersebut dalam merekonstruksi pembelajaran yang urut, sekalipun di lembaga pendidikan tidak tersedia sarana dan prasarana yang cukup atau memadai.

E. Implikasi Profesionalisme Tenaga Pendidik dalam Pembelajaran Berbasis Materi

Sesungguhnya, sukses atau tidaknya, tercapai atau tidaknya sasaran dari pembelajaran atau pendidikan sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Namun, mengingat tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, dalam konteks inilah sangat diperlukan tenaga pendidik yang profesional. Tenaga pendidik yang profesional dapat mengatasi ketidaklengkapan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, melalui daya dan kreativitas yang dibangunnya melalui disiplin pendidikan yang dimilikinya. Pembelajaran akan

terlaksana dalam berbagai bentuk dan strategi yang diolah oleh tenaga pendidik itu sendiri.

Pendidikan yang memadai, minimal dapat melahirkan strategi pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan keterbatasan itu. Sebab, secara pragmatis pendidikan mendorong peningkatan kreativitas dan daya cipta sehingga keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar dapat diatasi melalui kreativitas atau daya cipta yang dilahirkan oleh guru. Pendidikan juga membebaskan pendidik dari jebakan konvensional karena pada dasarnya pendidikan juga menjadi agen pembaruan dan membebaskan keterbelakangan. Oleh sebab itu, pendidikan yang dimiliki oleh tenaga pengajar sangat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, pendidik dapat menggali sumber materi dari berbagai cara, tidak hanya melalui buku-buku di perpustakaan atau sumber bahan ajar, tetapi juga dapat mengaksessnya melalui sarana teknologi seperti internet. Pembelajaran melalui *e-learning* misalnya secara langsung atau tidak langsung dapat membangun proses pembelajaran yang lebih berkesan dan memudahkan.

Hal ini sejalan dengan analisis Sudarwan Danim (2006), implikasi yang jelas dari pendidikan adalah tercapainya kualifikasi guru yang memiliki kecakapan dan kualitas. Kualifikasi guru terangkum dalam empat hal pokok, yaitu fisik, pribadi, profesional, dan sosial. Pendidikan mempunyai andil besar dalam membangun empat kualifikasi tersebut. Kaitan langsung dengan proses belajar mengajar adalah lahirnya tenaga profesional di kalangan pendidik dalam membangun proses belajar mengajar yang dapat diandalkan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Profesionalitas tenaga pendidik tersebut mencakup, tugas teknik pengajaran dan penguasaan materi bahan ajar dengan segala

perangkat pendukungnya sehingga melahirkan proses belajar mengajar yang memuaskan anak didik.

Dalam konteks global, profesionalisme tenaga pendidik tidak dapat diabaikan. Profesionalisme guru ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam membangun kualitas pendidikan tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Deborah Court (1991), yang mana profesionalisme adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun anak didik dalam peredaran global yang semakin kompleks dan kompetitif. Tenaga pendidik yang profesional akan dapat membaca tekanan-tekanan global tersebut sehingga anak didik tidak menghadapi dunia yang *gelap* dan tidak menentu dalam peredaran global.

Jika dilihat realitas pengangguran di Indonesia sekaligus ketidakmandirian kelas terdidik di Indonesia, pada satu sisi kita dapat mengatakan bahwa hal itu terjadi akibat ketidakprofesionalan tenaga pendidik dalam mengelola pendidikan. Bayangkan, di negara kita pusaran angka pengangguran dari tahun ke tahun antara 9 dan 10 juta di antaranya separo didominasi oleh kelas terdidik. Pada 2009 misalnya, 9.427.600 orang dan 4.516.100 orang di antaranya merupakan kalangan terdidik. Pengangguran di kalangan terdidik lebih dominan dipicu oleh ketidakmandirian kalangan terdidik menciptakan dunia kerja. Hal ini diakui oleh Ciputra, kelemahan dunia pendidikan yang paling dominan adalah ketidakmampuan melahirkan anak didik yang mandiri sehingga hal ini menghambat kemajuan.

Tenaga pendidik yang profesional dalam era global tidak dapat diawar-awar lagi karena keprofesionalan sangat menentukan keberhasilan dalam membawa tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh sebab itu, tenaga pendidik yang profesional mempunyai implikasi langsung terhadap penyampaian materi dan

penguasaan bahan ajar. Pembelajaran berbasis materi sangat ditentukan oleh keprofesionalan tenaga pendidik.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah rendahnya atau tidak layaknya tenaga pendidik dalam mengajar. Ketidaklayakan ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang perlu diperhatikan adalah pendidikan guru sebagai tenaga pendidik. Pendidikan yang dimiliki oleh tenaga pengajar, minimal dapat melahirkan tenaga pengajar yang profesional dalam proses belajar mengajar. Profesionalitas tersebut berimplikasi terhadap proses mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, karena profesionalitas secara langsung atau tidak langsung melahirkan strategi-strategi yang signifikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, untuk menghindari minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, diperlukan profesionalisme tenaga pendidik dalam merancang materi pembelajaran. Pendidik yang profesional dapat menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengatasi keterbelakangan anak didik.

Dalam konteks ini pula diyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar melalui pembelajaran berbasis materi sangat tergantung pada pendidik yang profesional, pendidik yang mempunyai pendidikan yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Pendidikan tenaga pendidik yang sesuai dengan tuntutan profesionalnya merupakan barometer dalam membangun keberhasilan materi ajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.



BAB VII

SEKILAS TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DALAM REALITAS MASYARAKAT

Di Indonesia, sejarah pendidikan diawali dari sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam berkembang di berbagai lokal Nusantara, melalui institusi-institusi yang dikembangkan oleh ulama atau elite agama. Pendidikan Islam yang berkembang lebih awal ini secara langsung atau tidak langsung di Indonesia tidak terjadi kekosongan sistem pendidikan yang begitu lama (Hanani, 2006).

Kalangan yang terdidik di institusi pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam membangun nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di samping menjadi *agent* pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini perlu dimaknai dan dipahami, bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan awal dari bangsa Indonesia yang saat ini berpenduduk 240 juta jiwa. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan tidak dapat dimungkiri sebagai salah satu pendidikan yang membangun identitas atau karakteristik kebangsaan negara yang multikultural. Hal ini dapat dibuktikan dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai pembangunan *building* nasional Indonesia. Jika Pancasila dibangun bukan atas pengaruh pendidikan keagamaan yang telah mengakar di Indonesia, tidak akan lahir identitas negara yang berfalsafah seperti itu. Namun saja, perjalanan *building* identitas kebangsaan ini mengalami pemaknaan-pemaknaan yang pasang surut. Peraknaan yang melebar dari lingkaran-lingkaran yang falsafah tersebut.

Persoalan kebangsaan pada saat sekarang adalah bangsa ini tengah kehilangan karakteristiknya seperti yang dibangun dalam Pancasila. Kehilangan karakteristik ini ditandai oleh berbagai persoalan bangsa hingga terjadinya krisis multidimensi (Hanani, 2006). Apakah krisis ini sebagai salah satu kesalahan dari sistem pendidikan membangun bangsa ke arah yang lebih beradab? Padahal, semestinya dalam usia bangsa yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun, Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki karakteristik yang beradab, sejahtera dan berkeadilan. Oleh sebab itu, bangsa ini harus kembali menggendakan untuk membangun

karakteristik kebangsaan yang dicitra-citakan oleh pendiri bangsa kembali sehingga bangsa ini tidak terjerat ke dalam ketidakberadaban.

Dalam konteks ini, pendidikan keagamaan sebagai salah satu pendidikan yang sudah terbukti menjadi salah satu agen transformasi sosial yang telah berhasil melekatkan dasar kebangsaan harus mengambil peran lebih luas kembali. Bab ini lebih lanjut akan membicarakan perihal peran pendidikan keagamaan dan bagaimana implikasinya dalam membangun karakteristik kebangsaan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis dan sangat terlihat multikulturalis. Bahkan dengan begitu multikulturalis, para orientalis kesulitan memberikan nama terhadap Nusantara. George Earl menebitkan tulisan hasil pengembaraannya di Nusantara, pada 1837, memberikan nama untuk wilayah Nusantara beragam, antara nama untuk Indonesia adalah Kepulauan India, Kepulauan Timur India, Pulau India, India Belanda, dan sebagainya. Pula Philpott dalam *Rebiningking Indonesia: Poscolonial Theory, Authoritarianism an Identity*, menyebutkan pula Sir Joseph Bank memberikan nama yang beragam terhadap Indonesia, seperti Pulau Timur India, Pulau di Sebalah Timur, Hindia Timur, Hindi, Pulau Kecil di sebalah Timur dan India. Kemudian Willian Marsden, memanggil Indonesia dengan Kepulauan India, Hindia Timur, Kepulauan Malaya dan Polinesia. Sementara Stanford Raffles membuat nama dengan sebutan di antaranya Kecil Asia, Pulau di Sebalah Timur, dan lainnya. Akhirnya, nama yang banyak itu oleh James Logan disempurnakan dengan Indonesia seperti yang kita gunakan sekarang ini.

Dari perspektif penyebutan nama ini, dapat ditangkap bahwa Indonesia memang sebuah lokus budaya yang mempunyai dinamika sosial lokal yang beragam. Keberagaman ini terlihat dari elemen-elemen lokal yang penuh dengan pernak-pernik sosial budaya. Selanjutnya, setelah Indonesia berinteraksi dengan dunia luar, terutama interaksi

dengan perdagangan internasional yang lebih luas, terutama sekali dihubungkan dengan perdagangan Arab, Gujarat, dan Timur Tengah maka keunikan ini, mulai menampakkan penyatuan satu gambaran umum, terutama gambaran umum tentang agama masyarakat. Islam mulai diterima menjadi satu bagian dari sistem kehidupan menggantikan salah satu dinamika keagamaan lokal (Noer, 1980). Islam yang datang pada abad ke-7, telah membuat dimensi baru dalam tata kehidupan lokal. Pertama, Islam telah memformulasi masyarakat lokal tradisional-menuju modernitas. Kedua, Islam telah memperkenalkan sistem-sistem kehidupan yang baru, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya baru. Kedatangan Islam inilah yang membangun secara evolutif dan revolusi masyarakat lokal.

Tahap kedua kedatangan kolonial di Indonesia, merupakan *agent* pengubah lokal yang bertendensi kekuasaan. Ciri-ciri tendensi kekuasaan itu adalah pertama, memaksakan perubahan sesuai dengan tujuan kekuasaan. Kedua, melakukan perubahan budaya sesuai dengan budaya kekuasaan sehingga berkembang kajian orientalisme. Ketiga, lahirnya sistem sosial kelas semakin nyata dan terang.

Walaupun, penjajahan telah membuat formulasi sosial lokal dalam “kotak-kotak” tersebut, reputasi Islam yang telah melekat dalam masyarakat lokal tidak “punah” atau pudar, malahan menguat dengan pencitraan-pencitraan yang sangat reformis, konstruktif, dan normatif sehingga tidak ayal masyarakat Islam di Nusantara ini menjadi oposisi dari pihak Kolonial. Kemudian, lahirnya pergerakan-pergerakan anti-Kolonial lebih dominan dipengaruhi oleh semangat keislaman. Melalui gerakan-gerakan kaum Islam di berbagai daerah di Nusantara tidak dapat dibiarkan sebagai “mesin, lokomotif” dari tercapainya kemerdekaan di Indonesia. Esposito (1984) dan Geertz (1968) membenarkan kondisi ini bahwa Islam memainkan peranan

penting dalam perkembangan gerakan-gerakan nasional anti-Kolonial di negara-negara Asia Tenggara, Maroko, dan Afrika Utara.

Tidak dapat dimungkiri, bahwa Islam dalam masyarakat lokal telah memformulasi dan membangun identitas nasional. Islam telah memberikan “kontrak” identitas di Indonesia. Kontrak identitas melambangkan pencitraan-pencitraan Islam “ala” Indonesia, terutama berkaitan dengan budaya dan semangat keislaman. Akhirnya, tidak salah jika ada sebuah kesimpulan, penyatuan Nusantara yang terdiri dari pelbagai etnis tersebut lebih dominan disebabkan oleh keislaman. Agama Islam yang menyebar luas dalam masyarakat lokal di Indonesia sudah menjadi “mesin” integrasi.

Islam yang berkembang dalam masyarakat lokal telah membuat jaringan solidaritas antar-etnis, jaringan komunikasi, jaringan politik, jaringan ekonomi, dan sebagainya. Jaringan-jaringan tersebutlah yang memperkuat Nusantara sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonialisme. Identitas nasional dibangun atau direkonstruksi oleh kekuatan-kekuatan Islam sekalipun Islam tidak ditegaskan sebagai asas negara. Kehadiran Islam yang implisit lebih mempunyai pengaruh yang kuat dalam menata Indonesia yang berdaulat.

Perjalanan Islam yang begitu berpengaruh dalam membangun satu sisi dari wajah Indonesia, salah satunya disebabkan oleh kehadiran Islam yang dikembangkan melalui institusi-institusi pendidikan. Pada institusi pendidikan Islam itu, pendidikan keagamaan diajarkan.

A. Sekilas tentang Islam dan Identitas Indonesia

Membaca hasil dari berbagai kajian dan penelitian tentang Islam lokal, baik pada tahap kolonial (Orientalisme), maupun sampai pada tahap global sekarang ini (lebih banyak dipaparkan oleh pribumi), ada kesimpulan yang menarik yang perlu digarisbawahi. Pertama,

Islam di aras lokal masih belum berkesudahan kekafahannya. Masih terasa adanya “pergulatan” tradisi lokal dengan Islam. Namun, itu sebuah fenomena budaya saja, secara substansial Islam sudah diterima sebagai sebuah agama. Kedua, Islam telah merekonstruksi identitas lokal, misalnya ketika orang Dayak memeluk Islam maka identitas Dayaknya sudah berubah menjadi identitas Melayu (Yekti, 2004). Tetapi berbeda dalam konteks lokal lainnya, seperti di Minangkabau, Aceh, atau kawasan lainnya, Islam semakin memperkuat identitas keminangkabauan atau keacehan, tidak melahirkan konstruksi identitas yang lain. Ketiga, Islam dalam aras lokal masih berjalan dengan romantisme, ramah, dan tidak radikal. Masih bisa berkomunikasi dengan budaya lokal.

Kemampuan budaya lokal berdialog dengan Islam maka pemaknaan agama sebagai sistem sosial, sebagai rekonstruksi sosial, sebagai dilansir oleh Durkheim dan Geertz tidak dapat disangkal. Namun, ketika eksistensi agama sebagai sistem sosial tersebut dimasuki wilayah kekuasaan yang berseberangan dengan “naluri” agama, ketika itulah agama menjadi alat kekuasaan. Ketika agama menjadi alat kekuasaan, agama menjadi “monumen” yang baku dan tidak mempunyai daya transformasi. Citra-citra agama sebagai agen pembaruan, perekonstruksi dinamika sosial, dan sebagainya menghadapi arah yang berlawanan. Akhirnya, terjadi juga masyarakat Islam lokal mengalami “kalah saing” dan “kalah pamor”. Inilah awal dari mulainya keredupan “motivasi” berbasis Islam dalam masyarakat lokal (Hanani, 2007).

Dialektika-dialektika lokal dengan nasional tidak lagi membangun citra sebuah kekuatan-kekuatan yang representatif, tetapi lebih bersifat dialektika kekuasaan. Kekuasaan telah membawa “lokal” dalam lingkaran kekuasaan. Sistem sosial, institusi-institusi lokal termasuk agama mengalami penetrasi kekuasaan. Inilah fenomena awal

identitas nasional. Kinerja-kinerja para elite Islam lokal, mengalami “pengunduran” semangat dan berjuang ambigu walaupun di antaranya ada yang konsisten. Mencermati dinamika Islam di Indonesia, setidaknya ada tiga fokus kajian yang dapat ditangkap. Pertama, dialektika Islam lokal dengan nasional. Kedua, Islam, Kekuasaan, dan pemerintahan. Ketiga, Islam dan perubahan sosial di Indonesia. Namun, membicarakan tiga dimensi ini, tidak dapat diabaikan pendekatan-pendekatan lokal sebab konteks lokal memainkan peranan penting dalam membangun “wajah” nasionalis Indonesia.

Lebih menarik ketika membicarakan masyarakat lokal di Indonesia pada masa postkolonial, terutama era Indonesia memasuki sistem pemerintahan “pribumi”. Sistem pemerintahan pascakemerdekaan, terutama ketika era Orde Baru. Sentralisme kekuasaan secara sadar atau tidak sadar telah memaksa perubahan dalam berbagai ranah dinamika sosial masyarakat, terutama sekali ranah masyarakat lokal. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sebagai salah satu yang berkompeten mengubah masyarakat lokal, dari masyarakat lokal “asli” menjadi identitas semu yang diciptakan oleh Pemerintah. Pemerintahan desa yang masuk dalam setiap masyarakat lokal, pada hakikatnya telah menggerakkan perubahan-perubahan yang tidak lagi harmonis. Kemudian, “matinya” peranti-peranti sosial yang dapat membangun integritas dan solidaritas.

Ketika kekuasaan begitu kental memasuki-mencampuri masyarakat, saat itulah masyarakat menjadi sebuah alat kekuasaan. Masyarakat berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Konsep-konsep kemandirian yang ada dalam lokal menjadi kabur dan kehilangan peran. Kelemahan-kelemahan yang terpusat dalam masyarakat lokal, dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melakukan politisasi, termasuk politisasi agama masyarakat lokal. Malahan politisasi keislaman

dirasakan paling dominan. Lihat saja kasus, perebutan-perebutan kyai-ulama-kelompok-kelompok agama oleh kekuasaan. Kemudian, golongan-golongan yang keluar dan menolak masuk dalam satu sistem dengan kekuasaan selalu diberi label “pembangkang”.

Wilayah agama mulai didramatisasi. Masyarakat lokal yang semula terpolakan dengan sebuah kekuatan teologi, mulai terpecah. Ketimpangan-ketimpangan mulai tampak, antara kelompok pro dan kontra kekuasaan. Kelompok yang prokekuasaan sebagai penyambung politisasi agama, tampak sejahtera, sedangkan di luar itu sebaliknya. Akhirnya, kecemburuan-kecemburuan sosial akibat teologi dan kekuasaan meruncing menjadi konflik. Konflik yang terjadi tidak lagi konflik ortodoks dengan modern, tetapi konflik-konflik agama yang diciptakan oleh kekuasaan. Perpanjangan konflik dalam masyarakat lokal, pada intinya telah mendramatisasi teologi menjadi tidak berdaya sebagai *agent* transformasi. Agama tidak lagi menjadi “alat” motivasi. Fenomena inilah yang mempercepat, terjadi destruksi sosial dalam umat Islam, dimana kekuatan-kekuatan Islam yang berada di lokal termarginalkan.

1. Hilangnya Kristal Identitas Dominan

Secara evolutif bahkan revolusi destruktif dan kelemahan-kelemahan umat Islam yang dominan semakin tidak dapat di-silent-kan. Reputasi-reputasi umat Islam di Indonesia mengalami pendistorsian. Padahal, keberadaan umat Islam yang dominan mampu membuat dialektika sosial-Islam yang khas dan mungkin mampu membuat sebuah peradaban atau perubahan. Ketidakmampuan ini mengakibatkan Islam dalam tataran lokal, nasional, lebih terlihat sebagai tekstual. Padahal, Islam mempunyai sistem, *world view*, dan norma yang holistik. Tetapi, umat Islam tidak *confident* dengan keislamannya sehingga banyak sistem sosial diadopsi dari luar Islam.

Umat Islam malahan lebih suka “berkompetisi” dalam lingkaran-lingkaran naratif sehingga pembangunan masyarakat terlupakan. Tentu hal ini juga telah memperpanjang “subjek” destruktif tersebut.

Rasa ketidakyakinan ini sangat bertolak belakang dari hasil penemuan Weber tentang ajaran agama spirit ekonomi, budaya. Bellah juga mengemukakan agama sebagai kekuatan dalam mencapai keteraturan sosial. Ketidakyakinan umat Islam telah membatat “peta” sosial umat Islam yang mengambang, tidak fokus, dan tidak konstruktif. Identitas-identitas yang dibangun tidak jelas. Malahan dari fenomena yang ada, para orientalis sering pula membuat gambaran bahwa umat Indonesia sebagai kelompok Islam yang menakutkan dan tidak mempunyai ruang gerak yang dinamis.

Kehilangan identitas ini semakin dibuktikan dengan jatuhnya negara dalam krisis, krisis mentalitas, krisis budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kejatuhan ini tentu sebagai sebuah kesalahan yang “dibuat” oleh umat Islam yang dominan penghuni negara ini. Terjadinya reformasi di Indonesia, semakin menampakkan diri bahwa destruksi identitas itu semakin terbukti, terlihatnya massifisme yang tidak lagi menghiraukan semangat integritas, solidaritas, tetapi telah bertukar dengan anarkisme. Anarkisme yang sangat menyedihkan adalah ketika wilayah agama dijadikan “tumbal” peperangan, konflik, dan permusuhan.

2. Rekonstruksi Identitas dari Aras Lokal

Pascareformasi, muncul satu dialektika sejarah yang menimbulkan kesadaran-kesadaran terhadap nasionalisme. Kesadaran ini bermunculan secara “apik” dari arus bawah yang digerakkan secara global di pentas nasional. Otonomi daerah yang lahir pascareformasi, sebagai generator yang membuat percepatan perubahan di arus lokal sebagai arus bawah tersebut.

Kebangkitan-kebangkitan lokal menjelma dalam berbagai bentuk, di sinilah tesis global paradoksa dari Naisbitt mendapat pembenaran. Di samping itu, di sini pula sebuah teori struktural fungsional semakin terbukti bahwa masyarakat sosial tidak dapat dilepaskan dari peranan dan fungsi struktur dan fungsi, semuanya saling bergantung dan membangun. Jika pemerintah atau kekuasaan meruntuhkan sistem lokal, tanpa dirasakan atau secara langsung/tidak langsung tingkat selanjutnya juga mengalami imbas keruntuhan. Penguatan-penguatan identitas lokal dengan corak dan warna yang dinamik mulai mendramatisasi kehidupan sosial masyarakat. Semangat keislaman lokal juga bangkit melalui desain-desain yang beragam.

Kebangkitan itu begitu kencangnya, masing-masing daerah membangun identitas lokal dengan Islam sehingga secara “ramai-ramai” berwacana daerah sebagai basis pelaksanaan syariat Islam. Namun, sampai kini yang sudah jelas berlaku di NAD yang diatur melalui UU No. 18/2001, sebagai semangat Islam dengan melakukan dan menerapkan syariat Islam. Di Padang Pariaman adanya Perda No. 2/2004 tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat. Di Solok lahirnya Perda No. 10/2001 tentang wajib baca Al-Quran untuk siswa dan pengantin, Perda No. 6/2002 tentang wajib berbusana Muslim. Sumatera Barat berlakunya Perda No 11/2003 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat. Di Kota Padang, Instruksi walikota 7 Maret 2005 tentang pemakaian busana Muslim, Bengkulu Perda 24/2005 tentang pelarangan pelacuran. Kepulauan Riau Kota Batam mengeluarkan Perda No. 6/2002 tentang ketertiban sosial, isinya soal pemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga, dan pemberantasan kumpul kebo. Di Maros, Perda No 15/2995 tentang gerakan bebas buta aksara Al-Quran. Di Bulukumba, Perda No. 4/2003 tentang busana Muslim. Nusa Tenggara Barat DPRD provinsi tengah

merancang perda wajib berbusana Muslim. Di Indramayu Perda No. 7/1999 tentang prostitusi. Ada juga edaran bupati mengenai wajib busana Muslim dan Pandai baca Al-Quran untuk siswa di sekolah. Di Kota Cianjur, Walikota membuat edaran 29 Agustus 2003 tentang wajib berjilbab untuk siswa sekolah. Sementara Gowa mewajibkan pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambah jam pelajaran agama Islam. Di Sulawesi Selatan DPRD Provinsi mengesahkan perda tentang pendidikan Al-Quran (*Tempo Interaktif*).

Ini sebuah kenyataan bahwa bangsa ini ingin kembali merekonstruksi identitas atau karakteristiknya dengan pendidikan keagamaan yang sudah terpinggirkan dalam kancah perjalanan bangsa. Keterpinggiran pendidikan Islam dilihat dari perjalanan pasang surut keberadaan institusi pendidikan keagamaan yang selama ini mengajarkan pendidikan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan madrasah di Indonesia sebagai basis institusi yang dikategorikan pemegang otoritas pendidikan keagamaan.

3. Persoalan Madrasah Institusi Pendidikan Keagamaan

Di Indonesia, sebelum madrasah populer telah berkembang institusi pendidikan Islam lokal yang independen. Di Minangkabau misalnya, telah muncul institusi pendidikan Islam *surau*, di Pulau Jawa lebih populer pondok pesantren. Institusi pendidikan Islam lokal tersebut, telah berhasil membangun sumber daya umat Islam pada zamannya. Tetapi, ketika datangnya kolonialisme memperkenalkan sistem pendidikan modern, institusi lokal mulai buyar dan mulai dipandang sebagai institusi pendidikan kelas dua oleh masyarakat.

Setidaknya ada dua permasalahan yang membayarkan, pertama, pendidikan Islam lokal yang independen lebih bersifat tekstual, sementara alam kehidupan berkembang dengan begitu cepat.

Perkembangan itu selalu menuntut ke arah penguasaan materialisme. Konsep penguasaan “materialisme” inilah yang kurang dalam institusi pendidikan Islam ketika itu. Fenomena yang demikian oleh kolonialisme dijelaskan dengan Islam ortodoks, umat Islam yang tidak mau memberikan ruang hidupnya kepada dimensi kompetisi dunia. Di sinilah awal kekalahan teori pendidikan umat Islam dalam penguasaan dunia sehingga dalam rentang waktu yang begitu mensejarah di negara ini, tidak lahir teori-teori lokal yang berasaskan Islam tentang penguasaan material. Akhirnya, hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sekolah agama. Sekolah agama diorientasikan sekolah “akhirat”. *Image* semacam itu berkembang luas dalam masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan besar.

Kedua, pengelolaan madrasah yang *stagnan* dan tidak mampu meracik sistem *reinventing* sehingga madrasah lambat mengikuti perubahan masyarakat yang begitu cepat dan kompleks. Baru sekitar awal abad 19 setelah kembalinya para pelajar Indonesia menuntut ilmu di beberapa negara Timur Tengah termasuk di Mesir, institusi pendidikan Islam mulai diperbarui dengan cara mengadopsi sistem pendidikan Timur Tengah tersebut sehingga madrasah menjadi populer.

Namun setelah Indonesia merdeka, institusi-institusi pendidikan Islam memasuki dunia politik, pasang surut kualitas madrasah semakin tampak. Jati diri madrasah terombang-ambing ke dalam dua kepentingan yang tidak berkesudahan, antara kepentingan politik dan umat. Tarik-menarik dua kepentingan ini, tampaknya ikut memberikan peluang tidak bergemangnya madrasah sebagai *agent* transformasi sosial umat Islam di Indonesia. Sementara sekolah-sekolah umum yang modern semakin menampilkan jati dirinya seperti yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai penyelamat dunia material. *Image* terhadap madrasah mulai berkurang, masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum ketimbang ke madrasah.

Keadaan kualitas madrasah yang tidak stabil itu akhirnya masuk dalam cakrawala nasional sehingga madrasah menjadi objek dalam sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itulah, terjadi perubahan-perubahan kurikulum dalam madrasah. Madrasah mulai menghadapi kurikulum keberimbangan, antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Kemudian dipercepatlah menjadi 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan agama, dengan tujuan untuk memicu lari mutu madrasah sekaligus untuk menghilangkan *stigma* masyarakat yang memandang madrasah sebagai kelas pendidikan nomor dua. Di samping itu, juga telah lahir madrasah khusus, terutama pada tingkat aliyah yang fokus dengan pendidikan agama Islam.

Namun, perubahan demi perubahan itu belum melahirkan tradisi pendidikan keagamaan yang kuat dari madrasah. Perubahan yang terjadi di madrasah bukan perubahan penguatan pembelajaran pendidikan keagamaan dengan telaah yang luas, melainkan madrasah menjadi sekolah yang diorientasikan sebagai sekolah orientasi kerja seperti sekolah-sekolah umum lainnya, tetapi orientasi itu pun separo gagal juga, karena tamatan madrasah juga kalah bersaing dengan tamatan-tamatan sekolah umum. Padahal, semestinya madrasah harus menjadi salah satu basis penguatan pembelajaran keagamaan.

4. Memperkuat Pengajaran Pendidikan Islam

Melihat realitas kebangsaan yang tercabik-cabik dengan indikator sebagai berikut. Pertama, indikator politik, di negara ini belum terwujud perilaku politik berkeadaban, masih dominan berpolitik ala Machiavelli. Politik “serba-boleh” dengan mengedepankan kekuasaan sehingga tidak ayal “korupsi berjamaah” menjadi sebuah realitas di berbagai jabatan politis. Akibatnya, *rule of law* Indonesia rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia.

Kedua, indikator demokrasi. Di Indonesia, demokrasi masih terkonaminasi oleh kepentingan kelompok. Demokrasi masih berdekatan dengan kekerasan karena kelompok tidak siap menerima realitas. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus pilkada (pemilihan kepada daerah), yang mana banyak pilkada berakhir dengan kekerasan karena kelompok-kelompok yang kalah tidak siap menerima kekalahan. Di samping itu, banyak kasus diselesaikan dengan kekuatan otot.

Ke tiga, indikator harmonisasi keagamaan. Akhir-akhir ini, harmonisasi keagamaan di Indonesia tercabik-cabik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus, mulai dari perjalanan *jihad* para konservatif eksklusif sampai pada tindakan anarkis kelompok keagamaan radikal. Jihad konservatif eksklusif dapat dilihat dengan gerakan fundamentalisme yang memusnahkan kehidupan melalui peledakan bom. Sementara anarkis kelompok radikal, dapat dilihat dari berbagai peristiwa anarkis dan konflik yang terjadi di Indonesia. Wilayah agama telah diseret ke dalam gerakan yang kontroversial dengan ajaran agama itu sendiri.

Keempat, indikator mentalitas. Bangsa kita bangsa yang masih mudah didikre dan diintervensi asing. Mentalitas *inlander* masih kuat menjelajah bangsa sehingga bangsa ini tidak mudah menentukan masa depannya. Bayang-bayang asing sangat dominan, bahkan aset ekonomi bangsa dikuasai oleh asing sehingga bangsa ini kesulitan menentukan kesejahteraan bangsa.

Kelima, indikator kualitas kesejahteraan. Bangsa Indonesia masih diliputi oleh kemiskinan. Mengikuti data BPS, kemiskinan di Indonesia berjumlah 37, 17 juta jiwa atau 16, 56%. Namun, mengikuti indikator Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 46%. Bahkan, dengan kasar mata untuk melihat potret sosial kemiskinan ini dengan sangat mudah kita temukan ketika Lebaran, betapa tragisnya orang-orang antri menunggu jatah pembagian zakat

dan daging korban. Di samping dilihat dari kemiskinan, kualitas hidup masyarakat Indonesia jauh dari standar. *Human Development Index* (HDI) Indonesia rendah sebagaimana dilaporkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP).

Kenam, indikator kemampuan kerja dan usaha. Dilihat dari semangat wirausaha, bangsa Indonesia masih rendah sehingga di negara ini minim sekali jumlah pengusaha. Di samping itu, jumlah pengangguran terus meningkat, bahkan pada 2009, di Indonesia tercatat jumlah pengangguran sebanyak 9.427.600 dari total angka itu terdapat sebanyak 4.516.100 orang pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik ini di dominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Artinya, pendidikan di Indonesia masih mempunyai beban tugas untuk mengurangi angka pengangguran terdidik ini. Ketujuh, indikator kriminalitas akar rumput. Di akar rumput angka kriminalitas mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini dengan mudah dilihat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Laporan media massa sudah cukup membuktikan kepada publik tentang kejahatan-kejahatan yang ada di akar rumput. Mulai dari kejahatan pembunuhan, perkosaan, perampokan, bunuh diri, dan sebagainya sehingga hari-hari di Indonesia tidak luput dari kriminalitas.

Kedelapan, indikator *trafficking*. Semenjak pertengahan tahun 80-an, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar memperdagangkan manusia dirantau ASEAN. Korban *trafficking* terbesar adalah anak-anak dan perempuan. Mereka diperjualbelikan paling banyak untuk memenuhi industri seks komersial, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri (Komnas Perlindungan Anak, 2009). Di samping itu, anak-anak ini rawan dari penculikan. Bahkan, di negara kita saat ini sedang tren penculikan bayi. Selama tahun 2009, sudah ditemukan sebanyak 102 kasus penculikan bayi. Belakangan juga

terjadi kasus kejahatan terhadap anak melalui jejaring sosial sehingga wadah pengeksploitasian anak di negara ini semakin luas dan sangat mengganggu moralitas masa depan anak bangsa.

Kesembilan, di ranah bangsa kita juga terlihat terjadinya perubahan mentalitas yang drastis, mentalitas konsumerisme dan ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah atau masa depan sehingga penyelesaian masalah sering diambil dengan jalan pintas mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Hal ini dapat dilihat betapa dahsyatnya data tahun 2009 menunjukkan bahwa pada tahun itu terjadi kecenderungan bunuh diri di mal. Minimal ada delapan kasus ditemukan masyarakat Indonesia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di mal.

Untuk keluar dari gejala kebangsaan yang sangat menyudutkan itu harus dipulihkan dengan memperkuat pengajaran pendidikan Islam. Giddens (2000) menyebutkan, untuk membangun peradaban dalam sebuah bangsa penguatan pengajaran keilmuan dan kualitas pendidikan harus tidak termarginal dari sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, pendidikan keagamaan sebagai pendidikan yang membangun moralitas, membangun identitas, dan karakteristik kebangsaan harus menjadi salah satu agenda utama untuk dikuatkan dalam sistem pengajaran dan pendidikan di negara yang berpenduduk terbesar adalah umat Islam. Penguatan pengajaran pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Menggairahkan kembali institusi-institusi pendidikan Islam sebagai basis pendidikan keagamaan, terutama madrasah-madrasah dan pondok pesantren yang sudah hampir mati suri.
2. Membangun sekolah agama atau madrasah-madrasah dan termasuk perguruan tinggi agama Islam bersumber daya manusia yang berkualitas.

3. Membangun kurikulum pendidikan:

- a. Berbasis keagamaan;
- b. Mencerna permasalahan umat/masyarakat/bangsa;
- c. Membangun sains tauhidullah, sains yang dianalisis dan diberi ruh keislaman.

4. Membangun kebijakan yang berimbang terhadap sekolah-sekolah agama dengan sekolah-sekolah umum.

5. Membangun kualitas yang ketat.

Berkembangnya persoalan kebangsaan seperti sekarang ini dan melunturnya karakteristik kebangsaan salah satu yang memengaruhinya adalah melemahnya peran pendidikan dalam membangun moralitas dan mentalitas bangsa, termasuk melemahnya peran pendidikan keagamaan. Padahal, peran pendidikan keagamaan di lintas sejarah bangsa sudah terbukti sebagai pembangun karakteristik kebangsaan pada mulanya. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan tidak dapat diabaikan dalam membawa masa depan bangsa. Pendidikan keagamaan merupakan sarana pembangun mentalitas, sosial, dan jati diri anak bangsa di negara yang berpenduduk beragama ini. Keterabaian dalam membenah pendidikan keagamaan telah nyata melahirkan sebuah kebangsaan yang rapuh dan mengalami distorsi yang sangat merugikan masa depan bangsa.

B. Peranan Pendidikan dalam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan sampai hari ini dan masih menggelinding menebur pesakitan penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah pun terasa *trial and error* dalam menanggulanginya sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan di bumi yang pernah dijuluki *kolam susu* ini.

Nasib orang-orang miskin semakin tersurut dengan kenaikan harga yang tidak rasional, hiruk pikuk dengan rencana kenaikan BBM yang diikuti oleh kenaikan bahan-bahan pokok, sementara pendapatan masyarakat masih tetap. Sepanjang tahun 2007 misalnya, kenaikan harga barang-barang yang sangat diburuhkan oleh rakyat kecil hampir tidak logis sehingga pada tahun 2007 orang-orang kecil menjerit mengikuti gejolak-gejolak kenaikan harga tersebut.

Hal ini dipicu oleh pendapatan masyarakat yang tetap sementara lonjakan harga barang-barang cukup tinggi. Penghasilan orang miskin lebih terkuras untuk mengikuti irama kenaikan harga. Harga yang selalu naik itu adalah barang-barang yang “akrab” dengan rakyat kecil. Belajar dari realitas tahun 2005, bahwa kenaikan harga barang-barang telah menyumbangkan 70,54% terhadap total angka kemiskinan. Sementara pada 2006 kenaikan barang-barang menyumbangkan 74,99% terhadap angka kemiskinan. Artinya, kenaikan harga barang-barang selalu menyumbangkan angka kemiskinan.

Asumsi angka kemiskinan tahun 2008, tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemiskinan masih menganga di akhir pemerintahan SBY-Kalla. Target Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang menakar tahun 2009 menekan angka kemiskinan sampai pada level 8,2% sukar terwujud, hanya menjadi bayang semu (*eratzte*). Sekalipun Pemerintah, menyebarkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sepanjang perjalanan pergantian pemerintah, sejarah kemiskinan di Indonesia masih mewarnai kentanya potret buram masyarakat. Mulai dari pemerintahan Orde Baru dan sampai pada pascapemerintahan reformasi, kemiskinan di negeri ini dengan “elok” masih tersimpan dalam keranda “Bisu”. Orang-orang miskin tidak merasakan akses kebijakan pemerintah dalam menanggulangi nasibnya. Nasib mereka mengalir dalam perjuangan hidup mereka sendiri. Untung mereka masih menyisakan *etos* kerja untuk tetap bertahan hidup.

Apa sesungguhnya *etos* kerja orang miskin? Jawabannya bukan sepenuhnya seperti *etos* kerja yang dikemukakan oleh Weber, sebuah *etos* kerja yang “lurus”, tetapi bercampur dengan dengan *chauvinistic*, di mana, perampokan, pencurian, penjarahan, dan pembunuhan menjadi bagian dari *etos* mereka. *Eros* seperti ini, menurut Scott, sebagai bentuk perlawanan bagi orang miskin untuk memperjuangkan hidupnya. Dengan demikian, tidak heran di belahan negara-negara miskin, angka kejahatan, dan kriminalitas cukup tinggi. Bagi yang tidak menyalakan *etos* kerja sering menempuh jalan *fatalisme* sehingga tidak heran orang-orang miskin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebab, tidak sanggup menghadapi realitas yang tidak mampu dicerna oleh rasionalitas mereka.

Kemiskinan di Indonesia tidak jelas kapan *the end of history*-nya maka yang paling mendesak dilakukan adalah penekanan angka kemiskinan melalui perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dalam menangguhkannya. Kemudian *mendompleng* mentalitas para pejabat yang tidak rasional melihat realitas. Dalam konteks ini, suara Ivan Illich dalam *Celebration of Austerity as Call for Institutional Revolution* (1969) perlu kita hidupakan kembali untuk mengengjot mentalitas pejabat agar bersungguh-sungguh menangani masalah kemiskinan.

Di negeri ini kita menyaksikan banyak pejabat yang kurang *care* dengan realitas, termasuk tindakan yang tidak rasional dilakukan oleh legislasi seperti di tengah-tengah rakyatnya dihimpit kemiskinan malahan mereka menuntut kenaikan insentif, gaji, tunjangan, dan sebagainya. *Sense of poor*-nya para pejabat kurang. Gramsci menyebut tindakan seperti itu sebagai hegemoni yang selalu menersikan rakyat pada jurang kemiskinan dan keterpinggiran. Menekan angka kemiskinan yang tidak banyak diupayakan oleh pemerintah ini, kita rindukan kembali hadirnya Hatta dengan sistem ekonomi sosialis “ala” Indonesiannya. Mungkin kita

merindukan berlian yang mau memberdayakan orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Hernando De Soto terhadap masyarakat miskin di Peru. Masalahnya, kemiskinan tidak akan usai jika tidak dijamah oleh kebijakan dan pemberdayaan yang signifikan dengan permasalahan yang menyelimuti kemiskinan tersebut.

Buktinya, kita masih ingat dengan program Inpres Dana Tertinggal (IDT) masa Orde Baru, Jaringan Pengaman Sosial, dana subsidi untuk orang miskin, dan sebagainya ternyata program tersebut tidak membawa perubahan apa pun. Artinya, program tersebut tidak menguak angka kemiskinan karena tidak dijamah penanganan yang berbasis akar rumput. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu belajar dari kegagalan tersebut, supaya hidup orang miskin di negara ini dapat berubah.

Besarnya kantong kemiskinan di kubu umat Islam adalah realitas yang sangat bertentangan dengan tujuan agama. Dalam konteks ini pula umat Islam terlihat belum mampu membangun manajemen sosial ekonomi religius yang profesional. Institusi-institusi sosial ekonomi Islam belum digerakkan sebagai generator kesejahteraan. Maka di tengah-tengah buramnya potret sosial ekonomi umat Islam ini, zakat harus dioptimalkan melalui kebijakan-kebijakan yang cerdas dan profesional. Zakat harus dijadikan lembaga sosial ekonomi yang tidak dapat dikelola dengan sebelah mata, harus diberdayakan dan dikuatkan. Untuk itu, perguruan tinggi tidak ada salahnya membangun satu akuntabilitas akademik untuk pemberdayaan zakat. Kalau perlu, IAIN/STAIN/UIN sebagai basis Islam memikirkan jurusan yang dapat pengaktualan zakat sehingga lembaga zakat profesional di Indonesia dapat diandalkan untuk membangun kesejahteraan.

Tidak menutup kemungkinan, lembaga zakat yang profesional akan dapat membangun tumbuhnya usahawan-usahawan Islam yang akan mengubah peta perekonomian dalam persaingan global sekarang

ini. Apalagi dalam konteks sekarang, di Indonesia sangat kecil sekali jumlah usahawan sehingga Indonesia terkendala mencapai target sebagai negara yang berkesejahteraan. Zakat mempunyai potensi ke arah itu, hanya tinggal pengelolaan.

Pengelolaan zakat profesional tentu akan dapat menjadi *spirit* atau motivasi berusaha bagi umat Islam. McClelland menyebutkan untuk mencapai perubahan tidak terlepas dari adanya *virus-virus* motivasi yang mendorong orang membangun karya untuk mengubah nasibnya. Oleh sebab itu, zakat yang profesional akan menjadi sumber motivasi bagi umat Islam untuk mengembangkan sosio ekonomi yang lebih bergairah.

C. Pendidikan Islam dalam Membangun Semangat Entrepreneur

Pada 2009, terjadi pencerahan anggaran pendidikan, dimana 20% dari APBN akan dialokasikan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa yang berpenduduk 224 juta jiwa ini. Berdasarkan Pidato Presiden di hadapan anggota DPR, anggaran pendidikan untuk tahun 2009 menjadi Rp.244,44 triliun, sedangkan pada 2008, anggaran pendidikan hanya mencapai Rp.154,2 triliun. Kenaikan anggaran pendidikan pada 2009 cukup signifikan dan perlu ditanggapi secara serius oleh semua pihak.

Walaupun anggaran pendidikan di Indonesia sudah disetujui 20% dari APBN, hal ini tetap saja rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Malaysia mempunyai anggaran untuk pendidikan 25% dari APBN dan Thailand 30 persen. Persoalannya sekarang adalah konsep dan strategi apa yang akan dilakukan oleh pihak terkait sehingga kenaikan anggaran pendidikan ini tepat sasaran sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat didongkrak.

Rendahnya kualitas pendidikan dapat diukur pula secara profesional melalui *Knowledge Economy Indicators* (KEI) sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia pada 2005, Indonesia menempati urutan ke-92 dan pada 2007 menjadi urutan ke-91. Urutan tersebut hanya melompat satu angka. Sementara Malaysia pada 2005 berada pada urutan ke-53 dan melompat tajam memperbaiki diri menjadi urutan ke-40 pada 2007. KEI-terbaik dunia tahun 2007 adalah Swedia sekaligus negara yang mempunyai kualitas pendidikan terbaik di dunia. Selanjutnya, urutan KEI tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Urutan *Knowledge Economy Indicators* (KEI)

Country	2007		1995		Country	2007		1995	
	Rank	KEI	Rank	Change		Rank	KEI	Rank	Change
Sweden	1	9.26	9	8	Malaysia	40	6.18	53	13
Denmark	2	9.22	1	-1	Thailand	56	5.41	48	-8
Norway	3	9.17	4	1	Phillippines	73	4.48	65	-8
Finland	4	9.07	2	-2	China	75	4.42	104	29
USA	10	8.8	6	-4	Indonesia	91	3.29	92	1
Japan	17	8.46	17	0	Vietnam	97	3.1	109	12

Sumber: www.worldbank.org

Berdasarkan masalah-masalah seperti yang telah dijelaskan di atas maka yang perlu dibangun adalah semangat entrepreneurship. Pendidikan Islam harus membangun semangat entrepreneur tersebut dengan berbagai cara, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membangun kurikulum entrepreneur;
2. Membangun aktivitas usaha ekonomi;
3. Memperkuat keterampilan siswa.



BAB VIII

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Korupsi di Indonesia

Menyaksikan Indonesia akhir-akhir ini, betapa sangat mengecewakan hati nurani kita sebagai anak bangsa yang dididik untuk jujur dan bermoralitas dalam kehidupan. Saat sekarang kita sedang melihat ajaran luhur itu terjungkal balik dan tidak bermakna dalam lintas kiprah elite-elite penyelenggara negara. Hal ini salah satunya dapat kita lihat dari perilaku korupsi yang muncul sangat mengerikan dalam negara Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hasil kajian *Transparency International* tahun 2009 mencapai skor 2,8 dan merupakan negara dengan tingkat korupsi sangat parah untuk kawasan ASEAN. Hari-hari pun kita menyaksikan, berita di media massa padat dengan perilaku korupsi tersebut. Perilaku korupsi telah merusak sampai ke akar rumput sehingga negara ini, seolah menjadi sarang korupsi, rumah korupsi, dan gua yang menyejukkan bagi koruptor. Hampir semua lini terjerah oleh perilaku paradoks ini. Bahkan, penjara pun di Indonesia menjadi lahan korupsi. Ini sebuah paradoksial dari sebuah negara yang mengagung-agungkan moralitas dan etika. Lebih sadis lagi, tentu sebuah 'kekecewaan bagi pendidik dalam mengolah anak bangsa yang berkualitas secara lahir dan batin. Apakah ini juga sebuah peranda runtuhnya pendidikan moral di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan di negeri kita saat ini sehingga perilaku anak bangsa berkeliranan mencabik-cabik esensi moralitas sehingga negara tidak sepenuhnya dikelola oleh kejujuran dan moral itu.

Pada akhir Maret 2010, dalam simposium pendidikan karakteristik lintas agama menyimpulkan bahwa keamburadulan moralitas bangsa saat ini diakibatkan oleh "matinya" pendidikan moral di sekolah-sekolah. Pendidikan moral sudah tidak dianggap sebagai bagian penting dalam membangun manusia sebagai makhluk ber peradaban.

Pendidikan moral terkesampingkan dan tidak ditara melalui kajian-kajian yang mendalam. Walaupun diajarkan hanya dikenalkan sambil lalu, bukan diinternalisasikan. Akhirnya, yang terjadi adalah moralitas hanya sebagai "bahan kenangan" bukan menjadi bahan yang digunakan dan dijadikan nilai-nilai mendasar dalam kehidupan.

Inilah sebuah risiko dalam negara yang sedang diobok-obok oleh wacana-wacana modernisasi. Negara yang sedang mabuk dalam zona-zona kemajuan tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan atas dasar basis-basis kearifan-kearifan yang membangun manusia dari nilai-nilai lokalitasnya. Sebuah kekalahan bagi dunia pendidikan membangun manusia yang berkarakteristik, akibat lembaga pendidikan itu berpacu dalam melahitkan manusia seperti tawaran egoisme modernis dengan mengecilkan peranan moral dalam membangun peradaban.

B. Pendidikan Antikorupsi

Di tengah-tengah negara yang sedang gusar dan absurd sekarang ini, sesungguhnya yang paling mendesak direkonstruksi secara sadar kembali oleh lembaga pendidikan sebagai penghasil manusia yang berkualitas adalah meracik dengan cermat kembali pendidikan moral. Isu pendidikan moral ini menguat dalam wacana kebangsaan dengan nama pendidikan karakteristik, pendidikan yang meluhurkan manusia dalam bertindak, berbuat, dan bertanggung jawab.

Melihat permasalahan korupsi yang telah mengendemi di tataran kebangsaan dan melanda semua lini maka pendidikan antikorupsi harus menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakteristik kebangsaan. Sebuah pendidikan yang menara moralitas anak bangsa dengan prinsip kemanusiaan dengan pertanggungjawaban yang tinggi sekaligus membangun mentalitas kejujuran. Dalam

konteks inilah, anak bangsa dicerahtakan dengan penguatan-penguatan mentalitas kemanusiaan yang prinsipil dan universal. Sekolah dan institusi pendidikan harus membangun pendidikan antikorupsi sebagai bentuk loyalitas lembaga pendidikan dalam membangun mentalitas di samping membangun keagungan akal pikiran.

Pendidikan antikorupsi dapat dibangun melalui penggalan nilai-nilai luhur lokalitas dan agama. Indonesia yang memiliki beragam etnis dan budaya lokal, pasti mempunyai nilai-nilai lokal yang sangat berpotensi membangun manusia. Nilai-nilai lokal itu yang tumbang dalam masyarakat lokal karena tidak dianalisis, dikaji, dan diapresiasi sebagai sebuah dimensi yang membangun kesejahteraan manusia. Padahal, setiap budaya lokal selalu memiliki produk-produk penggunaan manusia dengan pendidikan moral. Namun, nilai-nilai lokal yang melekat dalam cerita-cerita rakyat, legenda, dan sebagainya sudah punah sebagai pembentukan moralitas anak bangsa. Cerita menjelang tidur anak-anak sudah digantikan dengan cerita-cerita horor yang hanya memuar khayalan tanpa memberikan ruang pendidikan moral.

Di tengah kehilangan penginternalisasian nilai-nilai lokal, kita juga tengah mengalami kehilangan tokoh-tokoh referensi moral, tokoh yang menjadi teladan dan rujukan. Di tengah-tengah kekosongan tokoh rujukan itu, ternyata ranah pendidikan tidak memopulerkan khazanah-khazanah moralitas yang pernah dicerminkan oleh para tokoh pendahulu. Bagaimana misalnya, Hatta mengajarkan makna kejujuran dan kesederhanaan, bagaimana Soekarno mengajarkan keberanian dan seterusnya tidak pernah lagi tersentuh di ruangan pendidikan. Padahal, dalam pendidikan moral, pengenalan perilaku tokoh-tokoh rujukan tersebut sangat diperlukan.

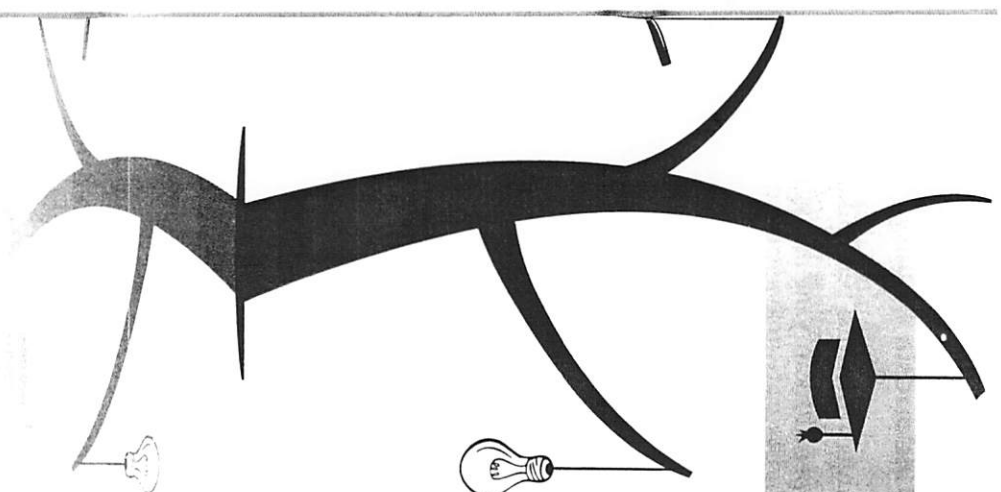
Hal yang terpenting saat sekarang adalah bangsa ini harus memutuskan pendidikan antikorupsi dengan penggalan-penggalan

nilai-nilai luhur tersebut. Kajian tentang pendidikan antikorupsi harus mampu menjelaskan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak dapat diajarkan dengan sistem pengajaran teoretik-teoretik hafalan, tetapi mesti menyentuh pada ranah moralitas dengan menekankan penginternalisasian nilai-nilai.

Kelalahan pendidikan moral selama ini di Indonesia adalah karena pendidikan moral direkonstruksi atau dibangun dengan penekanan teoretik hafalan dengan mengabaikan penginternalisasian nilai-nilai yang membangun kemanusiaan sehingga pendidikan moral atau akhlak hanya menjadi bagian mata pelajaran “pajangan” di sekolah-sekolah. Kerika ranah pendidikan moralitas dijabarkan seperti itu yang terjadi adalah perilaku harapan atau yang diharapkan tidak muncul dan yang berkembang adalah perilaku yang berseberangan dengan pendidikan moral tersebut. Seperti realitas yang kita saksikan sekarang, ternyata dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik di akademik, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang menempuh pendidikan berjenjang-jenjang. Padahal, semestinya kurva perolehan pendidikan akademik berbanding lurus dengan mentalitas, kenyataannya tidak.



BAB IX



MENGUGAT "CUKONG" DI DUNIA PENDIDIKAN

A. Kondisi Suram Pendidikan di Indonesia

Belakangan di Indonesia, perkembangan institusi pendidikan dan tawaran-tawaran berbagai program pendidikan yang menggiurkan dengan nuansa tebar pesona yang mencerahkan. Perkembangan tersebut sangat menggiurkan bahkan sangat wajar untuk bangsa Indonesia yang berpenduduk 240 juta jiwa ini dan sangat berharap perkembangan pendidikan dapat mengatasi ketertimpangan, ketertinggalan, dan sebagainya. Bahkan pendidikan syarat mutlak bagi suatu negara untuk mencapai kemajuan seperti yang dikatakan oleh Giddens, dimana pendidikan sudah menjadi harga mati untuk dikembangkan sebagai tangga menuju kemajuan sebuah negara di era global.

Namun, jika membandingkan dengan kondisi kebangsaan kita saat ini yang tengah berada dalam berbagai benturan maka perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tersebut seakan-akan berbanding terbalik. Bahkan, dunia pendidikan terasa mengalami kelemahan peranan. Dunia pendidikan seakan-akan mati suri dalam gagap gempita wajah sosial Indonesia yang berantakan, dunia pendidikan bagaikan serdadu kalah perang dalam kecamuk anak bangsa. Padahal, Pemerintah juga telah berupaya menggenjot 20% anggaran untuk pendidikan. Walaupun anggaran tersebut kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga, hal ini dapat dimaknai sebagai salah satu iktikad positif untuk peningkatan kualitas pendidikan karena selama ini kecilnya anggaran pendidikan itu dituding sebagai penyebab rendahnya kualitas pendidikan.

Ini sebuah realitas yang harus dicermati. Ada apa sesungguhnya dalam darah daging dunia pendidikan kita sehingga dunia pendidikan yang paling diharapkan membangun wajah Indonesia berkesejahteraan dan berkeadaban kandas dirobek-robek zaman? Pendidikan tak mampu memberikan penyelesaian bangsa yang

tengah galau, tak mampu menjadi lokomotif penarik bangsa keluar dari krisis multidimensi ini.

Iniilah sebuah risiko, pendidikan yang ditampilkan sebagai topeng pelengkap dan dihargai dengan selembar kertas ijazah. Ijazah itu ternyata dipublikasikan menjadi peningkat prestise. Jadilah, peran populer sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai pencetak ijazah. Fenomena inilah yang bergelinding di tengah tawaran-tawaran heboh dari dunia pendidikan. Tawaran program itu diusung kian kemari tanpa mencermati kualitas dan implikasi yang jelas dalam membangun sumber daya manusia. Akhirnya, lembaga pendidikan tidak ubahnya sebagai supermarket yang menjajakan berbagai produk-produk “pinjaman”, yang penting produk itu laku menghasilkan uang.

Lantas kalau sudah demikian, ternyata idealisme dunia pendidikan kehilangan aura. Kehilangan aura ini diperparah lagi dengan pengelolaan pendidikan bukan berbasis kualitas, melainkan berdasarkan “kongkalingkong” pertemanan yang mengabaikan kepakaran, idealisme, dan sebagainya. Akhirnya, sadar atau tidak ini menghilangkan kelompok-kelompok keilmiahan dan tradisi-tradisi keintelektualan sekaligus terjadinya penghijrahan *brain drain*. Kemudian kita mencibir dan gigit jari betapa hebatnya orang Indonesia di luar negeri.

Di Malaysia saja misalnya, hampir semua perguruan tinggi terkemuka di negeri sarang Tenaga Kerja Indonesia itu memanfaatkan *brain drain* ini. Secara langsung atau tidak langsung, para *brain drain* berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi negara tersebut yang menampungnya itu.

B. Menggugat Cukong Intelektual

Penabur andil kelemahan dunia pendidikan menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang lain lagi adalah bertebarnya cukong-cukong pembuat tugas, skripsi, tesis, dan disertasi. Jasa para cukong ini hadir dalam dunia pendidikan sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak lagi hadir dengan malu-malu dan sudah dimanfaatkan secara sadar oleh para intelektual yang haus dengan selembarnya ijazah. Artinya, praktik percukongan dalam keilmiahannya bukan lagi menyeredup di bawah tanah malah sudah ke permukaan bahkan menjadi lahan ladang bisnis yang menggiurkan (*Kompas*, 1 Oktober).

Ini salah satu pembuat tumpulnya keintelektualan di negeri yang sedang dirundung malang ini. Pembuat hilangnya daya nalar, daya ilmiah, dan daya kerja keras. Pada satu sisi menggambarkan betapa hancurnya nilai-nilai kejujuran dalam dunia pendidikan itu sendiri. Betapa salahnya pemaknaan pendidikan dalam kekinian, dimana pendidikan itu hanya sebuah pencarian sebuah gelar dan ijazah.

Terminologi yang demikian itu yang marak berkembang sehingga pendidikan tidak dipandang sebagai sebuah proses, yakni proses pendewasaan, pencerahan, pembangunan *skill*, pemanusiaan manusia, dan sebagainya. Akhirnya, pendidikan salah satunya menjadi identik dengan pencipta pengangguran-pengangguran terdidik yang menjadi permasalahan di Indonesia. Bayangkan saja, hampir setiap tahunnya pengangguran terdidik menjadi kelas dominan dalam angka pengangguran di Indonesia. Hal ini karena pendidikan tidak memberikan bagaimana manusia dapat menyelesaikan masalah hidupnya, kurang mampu membangkitkan kreativitas dalam berpikir, dan seterusnya. Kreativitas berpikir itu pun dibunuh pula dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh para cukong-cukong skripsi, tesis, dan disertasi yang semakin menjamur adanya. Ini tentunya juga sebuah

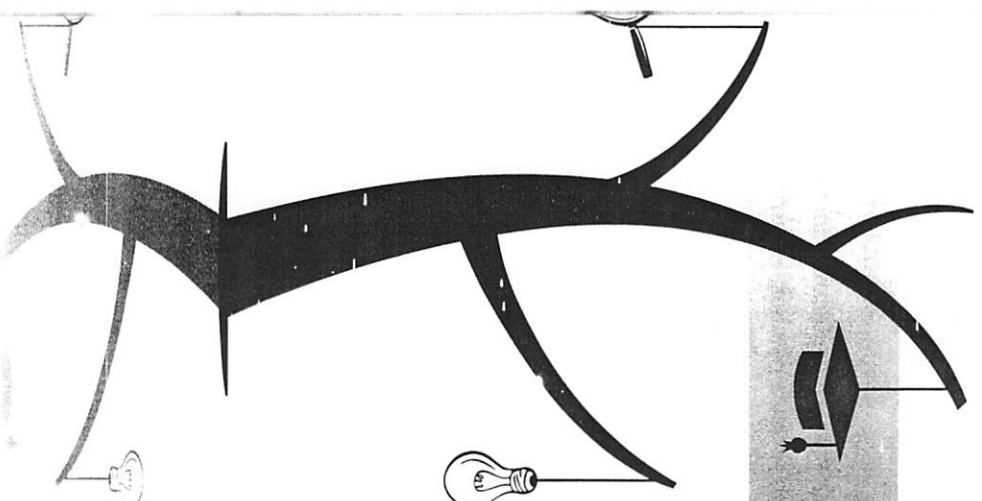
pengangkangan loyalitas intelektual di tengah-tengah perang tradisi plagiat.

Praktik percukongan ini belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Praktik percukongan diprediksikan semakin laku dan laris manis jasanya, mengingat dunia pendidikan yang tidak menentu pula menawarkan program-programnya yang penting bisa menjembatani orang mendapatkan ijazah, sebagai legalisasi untuk mendapatkan kedudukan. Bahkan, belakangan di Sumatra Barat seperti dilansir oleh beberapa media massa lokal berkembang "sagu" pelicin untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari dosen. Mulai dari kemudahan penulisan skripsi sampai pada tawaran untuk mendapatkan nilai yang baik. Bayangkan, betapa terdamparnya pendidikan dari kerja ilmiah yang bermoral. Mau dibawa ke mana duka keintelektualan ini?

Di sinilah, kita membutuhkan kata kunci membangun pendidikan sepenuh hati dengan menyertai manajemen institusi pendidikan yang berkualitas, dengan tidak menjadikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai supermarket yang menjajakan produk-produk "murahan". Produk-produk jalan pintas yang membuat manusia termarginal dari proses pendidikan itu sendiri, tetapi membuat manusia sadar dirinya berada dalam proses pendidikan.



BAB X



MENGEMBALIKAN PENDIDIKAN PERTANIAN DI NEGERI AGRARIS

A. Krisis di Bidang Pertanian

Krisis pangan merupakan salah satu krisis yang mengancam planet dunia dalam ranah global sekarang. Ini adalah sebuah paradoks dalam dunia peradaban manusia yang serbaceanggih dan modern. Saat teknologi dan ilmu pengetahuan membumbung tinggi, pangan sebagai satu keharusan dalam kelangsungan hidup turun dengan mengkisris. Pertumbuhan pangan dan kemajuan teknologi kurangnya terbalik. Di sini tampak bahwa manusia di dunia sedang menghadapi sebuah dilema terhadap masa depan kehidupannya. Bahkan, krisis pangan menjadi salah satu krisis global yang tengah dihadapi penduduk bumi sekarang ini.

Lantas di Indonesia, ancaman krisis ini diperparah dengan ketidakseriusan dalam memajukan sektor pertanian sehingga pertanian sebagai salah satu aset kerahanan pangan selama ini mengalami dilema yang sangat tidak mendukung terhadap kerahanan pangan bangsa. Kondisi yang mencemaskan ini salah satunya terlihat dari kehilangan ribuan varietas padi lokal di Indonesia. Dilaporkan bahwa di Indonesia saat sekarang penanam padi varietas lokal hanya tinggal 10–15 persen, sedangkan produksi benih berada dalam jumlah yang stagnan dari tahun ke tahun (*Kompas*/14/9/2008). Sebuah fakta yang sangat paradoks di tengah-tengah negara yang agraris dan sebagian besar mata pencaharian rakyatnya petani.

Di samping kehilangan varietas lokal, krisis pertanian juga diikuti oleh kehilangan lahan pertanian akibat terjadinya alih guna tanah pertanian untuk kepentingan nonpertanian. Alih guna tanah pertanian di Indonesia terjadi dengan begitu cepat. Lihat misalnya, untuk pengembangan pertokoan dan kawasan industri di Indonesia pada umumnya banyak mengorbankan lahan pertanian sehingga tidak mengherankan kehilangan lahan pertanian ikut memicu krisis pangan bahkan hilangnya lapangan kerja banyak manusia.

Kelawatiran lain yang akan memperburuk kondisi pertanian di Indonesia adalah terjadinya krisis perhatian dan minat generasi muda Indonesia terhadap pertanian. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun turunya peminat peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) memilih fakultas pertanian dan peternakan. Hal ini pertanda sebagai sebuah krisis yang sangat monumental dalam dunia pertanian. Dunia pertanian akan kehilangan tenaga-tenaga inovatif yang profesional. Ilmuwan-ilmuwan pertanian kita akan berkurang sehingga pertanian akan mengalami inovasi-inovasi yang tidak profesional. Mestinya Pemerintah belajar dari kegagalan inovasi benih *super toy* gagal total dalam mencerahtakkan nasib petani. Mestinya pemerintah membuka mata mencermati hal ini. Kita harus khawatir tentang ketidakberminatn anak-anak muda bangsa ini dalam mengelola pertanian. Padahal, pertanian merupakan sektor yang mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Kita lihat negara tetangga Malaysia, hampir seluruh sektor pertaniannya menyerap tenaga kerja dari negara kita.

Sementara di negara kita, pertanian tidak menjanjikan masa depan. Akibat hilangnya inovasi dan pengembangan pertanian yang profesional tersebut sehingga sektor ini tidak mampu membuka lapangan pekerjaan untuk anak bangsa. Padahal, setiap tahunnya jumlah pengangguran selalu bertambah terutama di kalangan terdidik atau generasi muda. Banyaknya jumlah pengangguran ini diakibatkan oleh kecilnya jumlah dunia usaha yang dapat menampung mereka. Jika kita hayati analisis Ciputra dalam berbagai kesempatan mengemukakan bahwa di Indonesia hanya ada 0,18 persen pengusaha maka dapat dibayangkan sangat terbatasnya jumlah dunia usaha untuk menjembarani angka pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah harus membidik pada sektor pertanian ini untuk dikembangkan

menjadi penyelamat pengukuran tersebut. Jika sektor pertanian bisa diperhatikan secara serius, tidak berlebihan akan dapat menyerap tenaga kerja banyak sehingga angka pengangguran yang jumlahnya selalu membengkak itu dapat ditekan dan krisis pangan yang sedang mengancam dapat ditanggulangi.

Melihat kondisi dunia pertanian Indonesia yang tengah mengalami mati suri sekarang ini, pemerintah tidak punya jalan lain selain meningkatkan keseriusan dalam menangani sektor pertanian. Kalau tidak, akan terjadi kelawatiran yang lebih buruk lagi, dimana anak bangsa ini sebagian tidak akan dapat pangan yang mencukupi. Sementara pertumbuhan penduduk berjalan dengan begitu cepatnya, dimana ada angka yang mencemaskan dimana untuk tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia menjadi 247,7 juta jiwa dan diprediksikan untuk tahun 2025 menjadi 273 juta jiwa, sedangkan sektor pertanian untuk tahun 2025 menjadi 273 juta jiwa, sedangkan sektor pertanian kita berkembang secara teratur-tatit dalam keidakterdayaan. Saat ini konsumsi beras di Indonesia rata-rata 139,15 kilogram per kapita setiap tahun dengan produksi 33 juta ton. Diproyeksikan untuk tahun 2025, ketika jumlah penduduk Indonesia 273 juta jiwa, kebutuhan terhadap beras meningkat sebanyak 38,85 juta ton (*Kompas* 22/8/2008). Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan tambahan produksi beras sekitar 15 persen dari jumlah produksi beras s-ekarang atau sebanyak 5 juta ton lagi. Jumlah itu harus dipenuhi, dan jika tidak, akan banyak anak bangsa tidak mendapatkan pangan yang cukup.

Di sinilah letak pentingnya kebijakan pertanian yang betul-betul mencerahkan dunia pertanian. Kebijakan yang dapat meningkatkan sektor pertanian menghasilkan produksi yang lebih. Kebijakan ini harus didukung dengan peranti-peranti yang signifikan untuk memajukan dunia pertanian dengan perencanaan yang matang. Tidak dengan *trial and error* dan bersifat sesaat. Pemerintah harus membongkar

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pertanian sampai ke akar-akarnya, tidak cukup hanya melihat pada satu sisi permasalahan saja. Pemerintah harus pula melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh petani secara keseluruhan. Selama ini petani hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah dan mempunyai posisi tawar yang lemah sehingga petani menjadi terpinggirkan dari dunianya sendiri.

Akibatnya, petani tetap dalam garis kemiskinan karena dunia usaha mereka tidak dapat menjanjikan perubahan masa depan yang lebih cerah. Sementara tuntutan terhadap permintaan guna memenuhi kebutuhan hidup semakin bertambah, sedangkan hasil pertanian mereka stagnan sehingga kemiskinan di pihak petani tidak dapat dielakkan. Jika saat sekarang, jumlah orang miskin di Indonesia berjumlah 34% dari jumlah penduduk atau versi Bank Dunia 46% maka separo dari jumlah yang miskin itu dapat diprediksikan adalah petani-petani pedesaan.

Di balik permasalahan kebijakan pertanian yang masih separo hati ternyata di akar rumput juga sudah terjadi krisis sistem ketahanan pangan. Kearifan-kearifan lokal yang dahulu mampu menjadi pendulang ketahanan pangan kini hilang dan tertikis akibat struktur yang tidak berpihak dalam membangun kearifan lokal. Misalnya, dahulu masyarakat lokal mempunyai lumbung padi dengan berbagai bentuk aktualisasi warisan budaya, kini hampir tidak ditemukan. Masyarakat-masyarakat lokal memiliki budaya tersendiri dalam mempertahankan pangsanya. Namun, akibat dipaksakan untuk makan nasi dan menanam padi akhirnya budaya lokal tersebut hilang digilas oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sepihak.

Di samping itu, kearifan-kearifan budaya yang berupa simbolik ketahanan pangan dan pertanian sebagai satu dunia usaha masa depan

yang tidak boleh diabaikan, juga pupus dalam etnis-etnis masyarakat Indonesia. Di Minangkabau misalnya, dikenal adanya *rangkiang* sebagai tempat penyimpanan pangan sekaligus sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat lokal, kini produk budaya lokal itu hanya tinggal kenangan. *Rangkiang* sudah tidak ditemukan, tidak lagi tampak berdiri di hadapan rumah gadang. Begitu pula dengan di daerah-daerah lain di Indonesia ini, simbol-simbol ketahanan pangan yang diajarkan oleh budaya sudah terkikis oleh dunia pertanian yang tidak menjanjikan kehidupan yang lebih layak, karena turun ke sawah bagi petani tidak lagi menjanjikan hidup sejahtera selepas panen, tetapi menjadi pemberi masalah baru akibat mahal biaya operasional untuk mengelola sawah. Mulai dari harga benih yang tidak berpihak kepada petani sampai harga pupuk yang tidak terjangkau maka pada akhirnya sawah menjadi simbol agraris masa lalu. Akibatnya tidak mengherankan bangsa ini terpaksa juga mengimpor beras. Sebuah dinamika yang paradoks di negara yang dikenal agraris ini.

Dunia pertanian yang tidak menjanjikan dan hilangnya peranti-peranti penopang kemajuan pertanian telah menyebabkan hilangnya lahan pekerjaan masyarakat pedesaan. Akhirnya, terjadi pelarian tenaga kerja desa ke kota yang pada akhirnya juga menjadi masalah bagi Pemerintah dalam menanggulangnya. Salah satu jalan bagi Pemerintah sekarang adalah menjadikan desa sebagai sentra pertanian. Desa sebagai lumbung kerja bagi masyarakatnya melalui pemberdayaan pertanian, menciptakan pertanian pedesaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, perlu keseriusan dalam menangani masalah pertanian tersebut. Hingga pada akhirnya, merencanakan dan melaksanakan proyek ketahanan pangan memiliki dampak yang luas terhadap kelayakan hidup orang banyak.

B. Mewujudkan Pendidikan Pertanian yang Diminati

Salah satu yang harus dipersiapkan untuk mengatasi kegundahan menghadapi ketahanan pangan dan pertanian adalah mewujudkan pendidikan pertanian yang diminati oleh anak-anak muda. Masalahnya, pendidikan pertanian terlanjur dipersepsikan oleh anak-anak muda bangsa ini sebagai pendidikan “pemiskinan”, pendidikan yang tidak mencerahkan kehidupan sehingga pendidikan pertanian dalam ruang akademik tidak banyak diminati. Padahal, negara ini merupakan negara agraris sehingga bangsa ini telah kehilangan aset-aset potensi ekonomi dari sektor pertanian. Pedesaan tidak lagi hidup dan cerah dari sektor pertanian. Sektor pertanian tidak dilirik sebagai pekerjaan yang mencerahkan. Akibat tidak terkelolanya sektor pertanian secara profesional ini, anak bangsa kehilangan lapangan pekerjaan dan kehilangan sektor-sektor potensial.

Dalam konteks inilah, pendidikan pertanian yang akademik melakukan pembaruan dan terobosan agar pertanian tidak lagi dilihat oleh anak muda dengan sebelah mata, tetapi sebagai sebuah pekerjaan yang menjanjikan masa depan. Jika sektor pertanian terkelola dengan baik, pengangguran yang terbesar dari kalangan muda akan dapat diatasi. Di samping itu, pendidikan pertanian juga harus membuka peluang besar melahirkan interpreneur atau usahawan pertanian yang mampu mengubah wajah-wajah pertanian yang terlanjur dianggap pekerjaan yang suram. Padahal, jika sektor pertanian ini hidup maka penyerapan pekerjaan di kalangan tidak terdidik dipastikan akan banyak. Masalahnya, kalangan yang tidak terdidik ini menyeberang ke negara tetangga yang pada umumnya dipekerjakan di sektor perkebunan dengan upah yang tidak memadai.

Dari laporan Institut Penelitian Karet Malaysia, semenjak tahun 1980, di Malaysia telah terjadi kekurangan tenaga kerja

untuk perkebunan kecil sebanyak 40%. Menurut catatan Nayagam, dari tahun 1978 sampai tahun 1982, sektor perkebunan Malaysia mengalami peningkatan kekurangan tenaga kerja dari 38 % menjadi 45%. Sementara menurut hasil penelitian Persatuan Perlindungan Bessau Malaysia, setiap tahun Malaysia selalu mengalami kekurangan buruh, terutama di sektor perkebunan dari tahun 1987 dari 485 perkebunan atau ladang yang diteliti terdapat 37,1 % atau sebanyak 9.395 orang, sektor perkebunan mengalami kekurangan pekerja. Pada 1988, kekurangan pekerja tersebut meningkat menjadi 39,9% atau 96.000 orang. Sementara pada 1991, meningkat menjadi 57% atau 12.277 orang. Daerah-daerah yang mengalami kekurangan tenaga kerja perkebunan paling dominan berada di Johor, Pahang, Selangor, dan Terengganu. Untuk mengatasi kekurangan ini, telah dipasok buruh atau pekerja asing paling dominan berasal dari Indonesia untuk perladangan sebanyak 270.000 orang untuk kebun sawi dan sebanyak 45.000–50.000 orang untuk kebun karet dan cokelat. Tetapi jumlah itu tetap saja belum mencukupi untuk keseluruhan kawasan Malaysia (Nayagam, 1990).

Jika dilihat lebih lanjut serapan tenaga kerja Indonesia untuk negara tetangga pada sektor perladangan dan pertanian, cukup besar jika dibandingkan di sektor-sektor lainnya selain menjadi Pembantu Rumah Tangga. Perbandingan itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10.1
Pos Pekerjaan TKI di Malaysia Juli 2007-Juni 2008

No	Nama Pekerjaan	KAWASAN		
		Sabah	Serawak	Semenanjung
1	Konstruksi	4.904	3.683	199.036
2	Perladangan	41.853	139.209	106.561
3	Kilang/Pabrik	5.567	24.987	169.230

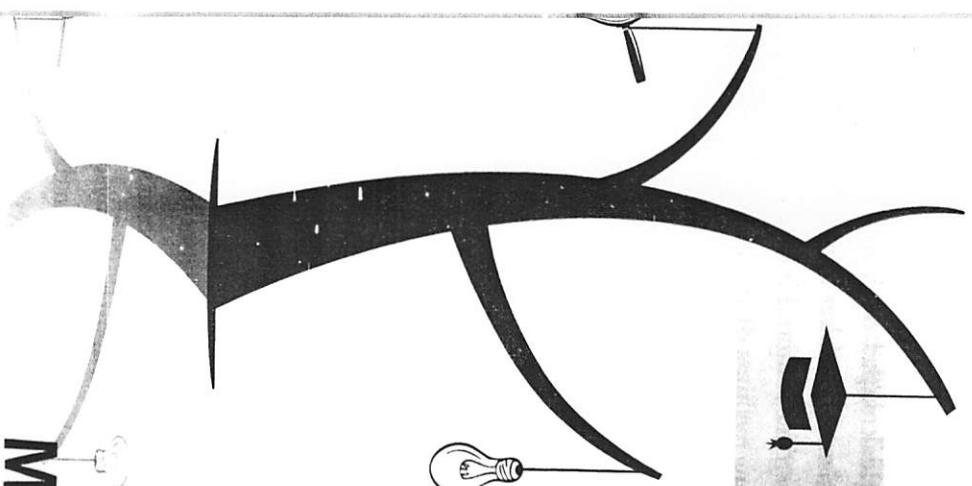
4	lasi	1.137	4.804	35.080
5	Pertanian	4.243	21.281	99.061
6	Penata laksana Rumah Tangga	12.961	13.322	252.851

Sumber: Kompas, 4 Desember 2008.

Tidak tanggung-tanggung jumlah orang Indonesia yang bekerja di lahan pertanian negara tetangga ini. Pekerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian Malaysia sebagai berikut di Sabah 4.243 orang, di Serawak 21.181 orang, dan di Semenanjung 99.061 orang. Sementara yang ditampung di perladangan untuk di Sabah 41.853 orang, di Serawak 139.209 orang, dan di Semenanjung 106.561 orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja yang sangat fantastis dan sangat signifikan untuk menanggulangi angka pengangguran. Dengan demikian, kita semakin yakin bahwa sesungguhnya pendidikan pertanian di Indonesia harus menciptakan strategis yang diminati oleh anak muda di negeri ini karena secara langsung pendidikan pertanian selain mewujudkan ketahanan pangan juga sebagai salah satu langkah strategis untuk menanggulangi angka pengangguran.



BAB XI



MERUMUSKAN KEMBALI SASTRA LISAN DALAM PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBANGUN MORAL

Perubahan dalam kesastraan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dunia. Dalam hiruk-pikuk perubahan, kesastraan sangat kita butuhkan untuk menjabarkan kronik-kronik yang melintas di aras kehidupan, sebagaimana halnya ditulis Aveling dalam *Rahasia Membutuhkan Kata* yang dieksplorasinya melalui puisi-puisi Indonesia 1966–1998 (2003). Bahkan, Tony Devis dalam sejarah peradaban dunia, kesusastraan ikut andil dalam menyikapi kondisi sosial (Faruk, 1999). Tidak itu saja, kesastraan juga dapat merekonstruksi realitas sosial masyarakat.

Hal ini sebagai konsekuensi dari keberadaan kesusastraan sebagai salah satu aspek yang berpengaruh dalam membentuk peradaban. Dalam konteks ini, kesusastraan juga sebagai salah satu yang lahir dari firrah manusia yang humanis, manusia yang berestetik, dan bemanifestasi melalui keindahan dan juga bisa sebaliknya. Arah mana yang dibangun oleh pengubahnya.

Dalam sejarah kebudayaan manusia di dunia, sebelum manusia mengenal tulis baca telah tumbuh dan berkembang kesusastraan sesuai dengan kondisi manusia pada masa itu sendiri dengan bentuknya yang beragam pula. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sastra lisan dalam setiap masyarakat di dunia ini. Sastra lisan sebagai bukti apresiasi dari manusia yang berfirrah humanis. Di Indonesia, sastra lisan sudah menjadi ciri khas dari setiap etnis yang ada. Tidak ada etnis yang tidak mempunyai sastra lisan, hampir semuanya memiliki sastra lisan dengan bentuk varian sendiri-sendiri. Sastra lisan ini merupakan identitas sastra pertama bagi masyarakat dunia karena sastra lisan dibangun berdasarkan keadaan atau realita yang terwujud dalam masyarakat yang pada mulanya belum mengenal dunia tulis baca. Tidak dapat dimungkiri pula, sastra lisan dalam masyarakat tertentu sebagai salah satu sarana

atau medium pendidikan. Sebab, sastra lisan tidak hanya menciptakan cerita-cerita yang bersifat menghibur belaka, tetapi menjadi corong penyampai nilai-nilai kehidupan, bahkan motivasi yang menantang karya dan sebagainya.

Keberadaan sastra lisan yang demikian, tidak ayal pula menjadikan sastra lisan juga dapat memainkan peranan penting dalam pendidikan moral. Bahkan, etos perjuangan yang diangkat dalam cerita sastra lisan misalnya, setidaknya mengacu pada pendidikan moral bangsa tersebut. Dalam konteks ini, sastra lisan juga mempunyai identitas yang jelas karena keidentitasannya itu sastra lisan memiliki perannya yang jelas pula.

Sastra lisan secara sederhana dapat dipahami sebagai sastra yang akrab dalam pengungkapan. Tradisinya banyak bermain melalui ranah kata-kata. Kata-kata itu menjadi jembatan komunikasi kepada pendengar. Berdasarkan penguapan ini pula, yang memperkuat sastra lisan sebagai sastra awal mula yang berkembang dalam masyarakat dunia. Sastra yang terapresiasi melalui penuturan dan percakapan. Dengan demikian, dapat pula ditarik satu kesimpulan bahwa sastra lisan merupakan sastra yang tumbuh dan berkembang sebelum hadirnya dunia tulis baca dalam peradaban manusia.

Walaupun demikian, sastra lisan sebagai produk budaya masyarakat tradisional, secara faktual telah memainkan peranan penting dalam masyarakat. Sebab, keberadaannya pada awalnya tidak hanya sebagai hiburan dan seni, tetapi juga menjadi media pendidikan, media komunikasi, dan sebagainya. Bahkan, tidak berlebihan sastra lisan membangun perilaku dan merekonstruksi budaya sendiri karena pada sastra lisan ada akar *world view* sosiokultural lokal yang membinaanya. Akar kultural lokal sekaligus melabelkan identitas pada sastra tersebut karena sastra lisan pada mulanya lebih banyak menurut ulang peristiwa,

legenda, dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Rekaan ini sejalan dengan apa yang didefinisikan tentang sastra lisan oleh pengkajinya, seperti Wiget berpendapat kemunculan sastra lisan diawali dari zaman pra-aksara yang pada umumnya lebih dominan mengambil *setting* cerita pendidikan, kepahlawanan, nyanjian pujiran, dan petualangan. Lebih lanjut, Wiget menemukan bahwa sastra lisan merupakan sastra pribumi dari sebuah bangsa, suku, atau etnis. Artinya, memperkuat bahwa sastra lisan sudah berwujud sebagai sastra awal dari sebuah bangsa. Hal ini juga ditemukan di Amerika, dimana puisi lisan dan prosa lisan Amerika telah lahir lebih awal, terbukti melalui temuan-temuan kesusastran pribumi seperti puisi Zuni, Aztec, Inuit, Aleut, dan lain-lain; dan cerita-cerita dari suku-suku Indian Hirtchiti, Zuni, Navajo, Lakota, Iroquois, dan lain-lain (http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_elektronik).

Sastra lisan merupakan salah satu sastra yang paling awal berkembang dalam masyarakat Nusantara. Sastra ini merupakan sastra yang diangkat dari cerita rakyat. Menurut Antri Aarne dan Stith Thompson (1964), sastra rakyat merupakan cerita dalam genre sastra rakyat yang sangat terkenal karena sifatnya yang menghibur dan banyak mengandung teladan, sesuai untuk penampaian nilai-nilai murni.

Dalam konteks yang sama, di Indonesia sastra lisan juga menjadi sastra awal bagi bangsa ini. Perkembangannya cukup dinamik sehingga masing-masing etnis atau suku bangsa yang ada di negara ini pada umumnya mempunyai sastra lisan. Hal didukung dengan, pertama sosial budaya masyarakat Indonesia yang teokrasi dan birokris, yang mana kedua-duanya menghendaki pola-pola keasutan dan penghargaan-penghargaan terhadap yang posisinya lebih tinggi.

Bentuk penghargaan-penghargaan terhadap yang lebih tinggi, disampaikan dengan bahasa seni, bahasa yang sopan dan santun menurut budaya setempat. Kemudian, menceritakannya penuh dengan keindahan bahasa dan tutur yang halus. Hal-hal seperti ini memengaruhi secara langsung terhadap perkembangan sastra lisan dan sangat mendukung berkembangnya cerita-cerita atau epos-epos rakyat dalam bentuk cerita yang diungkapkan dengan irama dan lirik-lirik tertentu sehingga terdengar indah dan mudah diserap maknanya oleh pendengar. Menurut Teeuw dalam studi yang dilakukan oleh Parry dan Lord, terlihat bahwa epos-epos rakyat banyak menjadi nyanjian yang dinyanyikan oleh tukang cerita (http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_elektronik).

Perkembangan sastra lisan di Nusantara termasuk juga di Melayu sangat ditentukan oleh pengaruh kehadiran agama, terutama agama Islam. Pada awal kedatangan Islam di Nusantara, sastra rakyat ini mendapat perhatian. Hal ini didukung oleh sifat kedatangan Islam yang ramah terhadap produk budaya lokal dan sekaligus menjadikan produk lokal sebagai sarana penyebaran ajaran agama. Mungkin saja yang terjadi perubahan adalah modifikasi bentuk syairnya, dari lokalitas menjadi religius atau syair yang tidak menentang ajaran agama.

Namun, sastra lisan ini juga menghadapi tantangan dari perkembangan sastra tulis dan masuknya seni-seni modern ke dalam pentas budaya Indonesia. Secara tidak sadar, seni-seni modern yang diperkenalkan secara tidak langsung oleh penjajah juga ikut memengaruhi sastra lisan ini. Perkembangan sastra lisan, akhirnya lebih terfokus dalam kerangka lokal dan sangat kuat mengambil identitas lokal dimana sastra lisan tersebut tumbuh dan berkembang.

Saat ini, sastra lisan lokal mengalami perkembangan yang pasang surut. Bahkan, ikut terpinggirkan oleh hingar-bingar pertumbuhan

sastra dengan berbagai aliran. Hal ini dipengaruhi oleh pertama, tidak jelasnya sistem pewarisan tradisi karena sastra lisan tidak diajarkan secara fundamental, hanya melalui keinginan masyarakatnya saja. Kedua, pertumbuhan sastra modern yang mendapat tempat di kalangan masyarakat Indonesia, kenyataannya telah membuat kehidupan sastra lisan lokal dipandang sebelah mata.



- "Anggaran Pendidikan Jangan Dipotong." Dalam *Kompas*, 27 Februari 2008.
- "Dana Perpustakaan di Pangkas." Dalam *Kompas*, 21 April 2008.
- Anonim. *Media Indonesia*. 8 September 2000.
- Anonim. *Kompas*. 1 Februari 2000.
- Anonim. *Media Indonesia*. 27 Agustus 2006.
- Anonim. *Republika*. 20 Mei 2000.
- Anonim. *Republika*. 20 Mei 2000.
- Anonim. *Republika*. 28 Januari 2008.
- Anonim. *Media Indonesia*. 8 September 2000.
- Anonim. *Kompas*. 1 Februari 2000.
- Anonim. *Media Indonesia*. 27 Agustus. 2006.
- Anonim. *Republika*. 20 Mei 2000.
- Anonim. *Republika*. 20 Mei. 2000
- Anonim. *Republika* 28 Januari 2008
- Adam, Bert. N dan Sydie R.A. 2000. *Sociological theory*. New Delhi: Vistaar Publication.

Association for Evaluation of Educational Achievement (IAEEA) 28 Noveber 2007.

Azra, Azyumari. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Bellah, Robert N. 2000. *Beyond Belief Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern*. Jakarta: Paramadina.

Berger, Peter. L. 1991. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Burns, Susan. 1998. *Starting Out Right*. t.t.mpt. t.t

Calne, Donald B. 2004. *Batas Nalar Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. Jakarta: KPG.

Capra, F. 1999. *Jatuh Bangunnya Peradaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Castells, M. 2004. *The Power of Identity*. United Kingdon: MPG Books Ltd.

Ciputra, 2008. *Menjadi Pengusaha Tanpa Modal*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Coser, L. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.

Cullinane, B. & Bageri, B. 1996. *Helping Your Child Learn to Read*. Washington, D.C.: Office of Education Research and Improvement., US Dept. of Education

Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford-California: Stanford University Press.

Dove, M.R. 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia.

Duncan, O.D. 1964. *William F. Ogburn on Culture and Social Change*. Chichago: The University of Chichago Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT. Gramedia.

Edles, L.D & Appelrouth, S. 2005. *Sociological Theory in the Classical Era*. London: Pine Forge Press.

Eisenstadt, S.N. 1978. *Revolution and the Transformation of Society a Comparative Study of Civilization*. New York: The Free Press.

Engels, F. 1942. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. New York: International Publishers.

Fadjar, Malik. 2008. Peran Pendidikan dalam Demokratisasi. *Siposium Puslitjaknov Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Puslitjaknov.

Faruk, 1999. *Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Freire, Paulo. dkk. 2009. *Menggugat Pendidikan Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Giddens, A. 2000. *The Third Way Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.

Haferkamp, H & Smelser, J. N. 1992. *Social Change and Modernity*. Los Angeles: University of California Press.

Hasan Shadily. 1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Hanani, Silfia. 2002. *SURAU ASET LOKAL yang Tercecer*. Bandung: PT. Humaniora.

_____. 2006. *Peranan Ulama dalam Penyebaran Islam di Nusantara*. Kuala Lumpur: Karyanet, Dewan Bahasa dan Pustaka.

_____. 2006. "Kebangkitan Islam di Aras Lokal, Kontruksi Identitas Kebangsaan di tengah-tengah Transisi. ACIS 2006. Bandung

- _____. 2007. "Membangkitkan Kembali Peranan Kemajuan Institusi Agama: Kajian Terhadap Tradisi Intelektual Surau di Minangkabau, Sumatera Barat." Universiti Sains Malaysia. Penang.
- Hikmat, Budiman (ed). 2005. *Hak-Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Yogyakarta: Tifa.
- Huntington, Samuel. P. 2000. *Benturan Antara Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- <http://www.e-dukasi.net/artikel.php?id=30>
- http://www.idp-europe.org/enethnewsletter4_indonesiaidpage42.php
- http://republika.co.id/kolom_detail.asp?id=327560&kat_id=16: 22 Maret 2008.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_elektronik
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_elektronik
- <http://m.inilah.com/read/detail/75397/menguk-hantu-kekerasan>
- Illich, I. 1969. *Celebration of awerness: A Call for Institutional Revolution*. New York, USA: Pantheon Books.
- Infid. 1999. *Indonesia Demokratisasi Di Era Globalisasi*. Jakarta: Infid.
- Ismail, A Muh Rifqi. 2008. *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*. SMAN 2 Makassar - Multikulturalisme Dan Pendidikan Multikultural.
- Johnson, D. P. 1987. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Propek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaplan, David. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kelly-Vance, L., & Schreck, D. 2002. "The Impact of a Collaborative Family/School Reading Program on Student Reading Rate." *Dalam Journal of Research in Reading*. 25, 43-53.
- Kluckhohn, C. 1952. "Universal Categories of Culture." *Dalam A.L. Kroeber. Anthropology to Day*. Chicago: Chicago University Press.
- Koenjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Khun, S. Thomas. 2000. *The Structure of Scientific Revolution (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: Rosada Karya
- Laeyendecker, L. 1983. *Tata Perubahan dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Laporan World Bank Tahun 1998.
- Laporan Association for Evaluation of Educational Achievement (IAEEA) dari tahun 1996-1998.
- Laporan Association for Evaluation of Educational Achievement (IAEEA) 28 Noveber 2007.
- Lauer, H. Robert. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Maslow, Abraham H. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Hasper & Row Publisher.
- Mayo, M. 2005. *Global Citizens Social Movement & the Challenge of Globalization*. London: Zed Books.
- McCarthy, Thomas. 2011. *Metode Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta. K्रेसi Wacana.
- McClelland, D. 1961. *The Achieving Society*. USA: Van Nostrand Company.
- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Rajawali: Jakarta.

- Nugroho, Fera. 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES. Jakarta.
- Osborne dan Gealbert dalam Anthony Giddens. 2000. *The Third Way*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Parson, Talcott. 1968. *The Structure of Social Action*. The Free Press. New York.
- Paloma, M. Margaret. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* Yogyakarta: Kanisius
- Perpustakaan Nasional Indonesia. 2002. *Pembinaan Minat Baca Masyarakat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Philpott, Simon. 2000. *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*. Great Britanian: Macmilland Pres.
- Rahimah Abdul Azizi. 1997. *Pembaratan pemerintahan Johor (1800-1945) suatu analisis sosiologi sejarah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ritzer, G. & Goodman, J. D. 2004. *Modern sociological theory*. USA: McGraw-Hill.
- Said, Edward W. 1978. *Orientalisme*. London and Henley: Routledge&Kegan Paul
- _____. 1993. *Culture and Imperealisme*. London: Chatto&Windus
- Sanderson, K Stephen. 1995. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soewardi, Herman. 1999. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Civilisasi*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. "Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia." Dalam *Kompas* 21 Januari 2006.
- Steward, Julian H. 1955. *Thory of Culture Change the Methodology of Multilinear Evolution*. USA: University of Illinois Press.
- Taryadi, Alfons. 2003. *Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Times Higher Education Supplement* (THES) tahun 2006.
- Tsaqafah*, Vol I No 2 Tahun 2003
- UNESCO 2000. Laporan HDI masyarakat Indonesia.
- Wertheim, F.W. 1964. *Indonesian Society In Transssition A Study of Social Change*. W. Van Hoeve LTD.
- Wells, Alan (ed). 1978. *Contemporary Sociological Theories*. California: Santa Monica.
- Wasim, dkk. 2004. *Harmoni Kehidupan Beragama; Problem Praktik dan Pendidikan*. Yogyakarta: Oasis Publis'ier.
- Weber, M. 1974. *On Charisma and Institution Building*. Chicago: Chicago University Press.
- Yekti, Maunati. 2004. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- www.bps.go.id
- www.cscr.ugm.ac.id
- www.wahidinstitute.org



A

Aarne, Antti 200
akhlakul kharimah 110, 111,
112
anarkisme 24, 108, 130, 140,
161

B

Bell, Daniel 111

C

Ciputra 64, 69, 144, 151, 189,
204
Comte 22, 43, 44
Court, Deborah 151

D

demokrasi 40, 42, 114, 166
De Soto, Hernando 172
Deviz, Tony 198
dialektika 158, 160, 161
dialektika kekuasaan 158
Dove 22, 126, 204
Dunia Ketiga 24
Durkheim 31, 43, 44, 158

E

Earl, George 155
Era Reformasi 65
Esposito 156
etnosentrisme 39, 40

F

Freire, Paulo 40

G

Gandhi 41, 110
Geabler 71, 86
Geertz 156, 158
Giddens 12, 70, 144, 168,
182, 205, 208
globalisasi 39, 106
Gramsci 171

H

Habermas 18
Hantintong 39
Hatta 171, 178
Hattie 67, 145
Homans 44
humanisme 41, 131, 133, 134,
140
Huntington, Samuel P. 48
hyper hedonisme 13

I

Ibn Khaldun 23, 43, 44, 104
identitas lokal 158, 162, 201
identitas nasional 157, 159

Illich, Ivan 14, 65, 110, 147,
171
industrialisasi 25

J

jugernaut 12

K

kecerdasan emosional 108
kesadaran moral 18
Ki Hajar Dewantara 109, 112
Kluckhohn 16, 120, 207
Koentjaraningrat 114, 120,
207
Kohlberg 18
kolonialisme 23, 24, 25, 157,
163, 164
konsumerisme 168
krisis kemanusiaan 13
krisis moralitas 108, 132, 143

L

Luther, Martin 23

M

Machiavelli 165
Maslow 126, 127, 207

McClelland 96, 126, 135, 173,
207

modal sosial 42, 65
modernisasi 12, 13, 17, 24,
113, 124, 132, 177
modernisasi pembangunan 24

N

Naisbitt 162
nasionalisme 108, 154, 161

O

Ogburn 44, 204
Orde Baru 159, 170, 172
Osborne 71, 86, 208
otonomi daerah 71, 108, 143

P

Pancasila 112, 124, 143, 154
Parekh 41
Parsons 43, 44, 60, 114, 135,
136
pendidikan multikultural 39,
40, 41, 42, 48, 110, 139
perubahan sosial 12, 26, 42,
43, 44, 45, 159, 198
Philpott 155, 208

Pontefract, Caroline 145
postmodernisme 112

R

Reffles, Stanford 155
Revolusi Industri 24, 43
Revolusi Prancis 42
Ritzer 42, 43, 44, 208

S

sastra lisan 198, 199, 200, 201
sekularisasi 23
shock culture 38
sistem sosial 44, 59, 156, 158,
160
Soekarno 178
sosial groups 26, 27
sosiologi pendidikan 19, 27,
42, 43, 61
struktur sosial 44
Sudarwan Danim 150

T

teori pembangunan 22, 24
Thompson, Stith 200
Tonnies 44

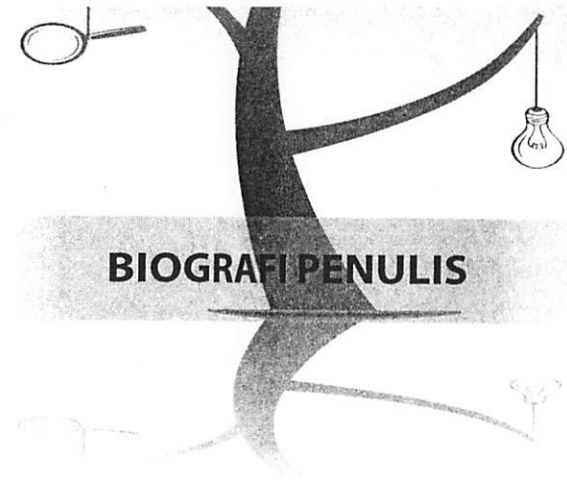
tradisi lokal 22, 23, 24, 129,
158
transformasi sosial 155, 164
truth claim 41
tut wuri handayani 109, 112,
142

U

UUD 1945 141, 142

W

Weber 43, 126, 134, 161, 171,
209
Wiget 200



Silfia Hanani, pernah kuliah S1 di IAIN Imam Bonjol dan Sosiologi Universitas Andalas Padang, S2 pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dan terakhir menyelesaikan pendidikan Ph.D di Universiti Kebangsaan Malaysia (2009). Dosen Sosiologi Pendidikan STAIN Bukittinggi dan Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang ini juga pernah menjadi wartawati. Di antara karyanya adalah *Surau Aset Lokal yang Tercecer* (2002, Bandung), *Dialog Filosof dengan Teolog tentang Tuhan dan Alam* (2004, Bandung), *Peranan Ulama Nusantara* (2007, Malaysia), *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama* (2011). Juga terlibat dalam beberapa buku antologi puisi, di antaranya *Puisi untuk Palestina* (UPM, 2009), *Musibah Gempa Padang* (2009), *Suara-Suara Hawa* (2010), *Suara Hati Nurani dan Kalbu* (2010), *Sebilah Sayap Bidadari* (2010). Di samping itu, masih aktif menulis makalah yang dimuat dalam proseding dan jurnal, serta menyajikan makalah dalam berbagai seminar dan simposium, baik nasional maupun internasional. Untuk korespondensi bisa dialamatkan ke silfia_hanani@yahoo.com